

D.N. AIDIT.



**KAUM TANI MENGGANJANG
SETAN² DESA**

Rosmo

PERHIMPUNAN
DOKUMENTASI
INDONESIA
NAALDWIJKSTRAAT 36
1059 GH AMSTERDAM

D. N. AIDIT



KAUM TANI MENGGANJANG SETAN-SETAN DESA

(Laporan singkat tentang hasil
riset mengenai keadaan kaum tani
dan gerakan tani Djawa Barat)

I



Jajasan „Pembaruan”
Djakarta 1964.

Rentjana kulit :
Djoni Trisno

ISI

Pendahuluan	7
I Pentingnja pekerdjaan riset dan pentingnja kaum tani	10
II Pembagian klas ² didesa dan bentuk ² penghisapan terhadap kaum tani dan nelajan di Djawa Barat	19
1. Pembagian klas ² didesa	19
2. Bentuk ² penghisapan atas kaum tani dan nelajan	27
3. Taraf-hidup Rakjat didesa dan ketjenderungan perkembangan ekonomi didesa	36
III Kekuasaan politik setan ² desa dan aksi ² kaum tani terhadapnja	41
IV Perdjuaan kaum tani terhadap setan ² desa dibidang ekonomi	50
V Taraf pengorganisasian dan aksi ² kaum tani dan nelajan mengganjang „7 setan desa” ...	53
1. Tentang pentingnja klasifikasi desa	53
2. Tentang kader tani dan nelajan	54
3. Pengalaman aksi kaum tani dan nelajan di Djawa Barat	57
4. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengkonsolidasi aksi	59
VI Kesedaran politik kaum tani dan propaganda politik revolusioner didesa	63
Kesedaran politik meluas dan meningkat didesa-desa	63
Usaha ² kaum reaksioner untuk membendung kesedaran politik kaum tani	68
Propaganda politik revolusioner didesa	70
VII Kaum tani dari „serba salah” mendjadi „serba benar”	73
VIII Kebudajaan dan moral revolusioner dikalangan kaum tani dan nelajan	79

IX Lawan koperasi palsu, djadikan koperasi sendjata ditangan kaum tani dan nelajan	85
1. Koperasi desa Kemang, Ketjamatan Bodjongpitjung, Kabupaten Tjiandjur	85
2. Koperasi perikanan laut Misaja Mina, Desa Eretan Wetan, Ketjamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramaju	86
3. Koperasi garam Rakjat, desa Eretan Wetan, Ketjamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramaju	87
1. <i>Lumbung patjeklik dan arisan²</i>	88
2. <i>Usaha leliuran (arisan atau simpan-pindjam), desa Sukamadju, Ketjamatan Tjimanggis, Kabupaten Bogor</i>	88
3. <i>Usaha gotongrojong, desa Sukatani, Ketjamatan Tjimanggis, Kabupaten Bogor</i>	88
4. <i>Koperasi² konsumsi</i>	89
Lampiran I	
Pembagian klas ² didesa Eretan Wetan, Ketjamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramaju ...	92
Lampiran II	
Anggaran belandja buruhtani, tanimiskin, tani-sedang dan tanikaja didesa Tegalsari, Ketjamatan Wanaradja, Kabupaten Garut	93
Arti kata ²	96



Salah satu rapat riset di Djawa Barat yang dipimpin langsung oleh D.N. Aidit

PENDAHULUAN

Risalah ini saja tulis disuatu tempat didaerah pegunungan Djawa Barat. Ketika menulis ini saja berhadapan dengan gunung Pangrango yang mendjulang tinggi, disebelah kiri saja nampak gunung Gede dan disebelah kanan gunung Salak. Tempat yang tenang dan sedjuk ini sungguh baik sekali untuk menulis risalah atau untuk pekerdjaan² lain yang menghendaki ketenangan.

Selama 7 minggu, mulai tanggal 2 Februari sampai dengan 23 Maret 1964 saja telah memimpin serombongan petugas² riset (research) terdiri dari lebih daripada 40 orang dan tiap orang telah bekerdja dengan dibantu oleh sebuah tim (team) terdiri dari pemimpin² kaum tani tingkat ketjamatan dan desa.

Para petugas riset umumnja terdiri dari kader² yang banjak pengalaman dalam gerakan tani, diantara mereka terdapat kawan² yang telah terudji dalam memimpin aksi² kaum tani yang sengit dan sukses. Mereka umumnja berasal dari keluarga buruhtani, tanimiskin dan tanisedang, sebagian dari klas buruh, burdjuis ketjil kota dan seorang dari keluarga tanikaja. Pendidikan umum mereka bermatjam². Jang dari keluarga buruhtani dan tanimiskin umumnja hanja berpendidikan Sekolah Dasar, ada yang tidak tamat, sedang lainnja dari Sekolah Menengah Pertama dan Atas atau Sekolah Menengah Kedjuruan, dan beberapa orang diantaranya mahasiswa.

Desa² jang diriset jalah desa² di-ketjamatan²: Rantjah dan Padaherang (Kabupaten Tjiamis), Tjisompet dan Wanaradja (Garut), Karangnunggal (Tasikmalaja), Djatitudjuh (Madjalengka), Tjipeundeuj dan Tjiwidej (Bandung), Tjimalaka (Sumedang), Bodjong Pitjung (Tjandjur), Sagaranten dan Nagrak (Sukabumi), Haurgeulis dan Kandanghaur (Indramaju), Lemahabang (Tjirebon), Segalaherang (Subang), Rengasdengklok (Krawang), Tjimanggis, Tjiomas dan Tjidjeruk (Bogor), Serpong dan Legok (Tangerang), Warunggunung (Lebak) dan Labuhan (Pandeglang).

Diseluruh Djawa Barat terdapat lebih dari 350 ketjamatan. Djadi tidak semua ketjamatan diriset. Tetapi ketjamatan² yang diriset telah dipilih begitu rupa sehingga hasil riset dapat mentjerminkan keadaan desa, kaum tani dan gerakan tani diseluruh Djawa Barat, karena ia meliputi desa² dimana terdapat tuantanah bumiputera, dju-ragan perahu pentjari ikan, perkebunan, kehutanan, bekas tanah partikelir, bekas daerah basis gerombolan kontra-revolusioner DI-TII, aksi² kaum tani yang sedang berlangsung dengan hebat dan desa² dimana kaum tani baru mulai bangkit dan baru menjusun organisasinja (BTI). Untuk mengetahui keadaan burung geredja atau kelintji, tidak perlu semua burung geredja atau kelintji dibunuh dan diperiksa, tjukup membunuh dan memeriksa beberapa ekor sadja. Demikian pula untuk mengetahui keadaan desa² Djawa Barat tidak perlu semua desa diriset.

Pada tanggal 1, 2 dan 3 Maret saja telah mendengar laporan sementara dan berdiskusi setjara mendalam dengan kepala² tim riset dari ketjamatan Rantjah, Tji-peundeuj, Tjiwidej, Bodjong Pitjung, Tjidjeruk dan Tji-manggis. Dari mereka saja mengetahui bahwa petundjuk² riset yang diberikan pada pokoknja sudah tepat, mereka bisa bekerdja atas dasar petundjuk² itu. Tetapi diantara petugas² ada yang kurang konsekwen melaksanakan prinsip „3 sama”, jaitu *sama* bekerdja, *sama* makan dan *sama* tidur dengan buruhtani atau tanimiskin. Sama bekerdja berarti mengerdjakan apa sadja yang dikerdjakan petani tempat menginap, sama makan berarti makan apa sadja yang dimakan petani dan sama tidur berarti tidur ditempat petani dan setjara petani. Praktek „3 sama” harus dilakukan dengan buruhtani dan tanimiskin. Untuk melengkapi bahan djuga dirumah tanisedang. Riset dengan menempuh „tanja-djawab” setjara dangkal telah dikritik keras dalam diskusi itu. Djuga ada petugas yang terlalu memberi tekanan pada pengumpulan angka² tentang tanah dan penghidupan kaum tani, tetapi kurang memberikan perhatian pada kehidupan organisasi, kesedaran politik, keadaan moral dan kebudayaan kaum tani. Kekurangan² ini segera disampaikan kepada semua petugas riset diseluruh Djawa Barat supaya mendapat perhatian, supaya tidak ditiru dan djika ada yang membikin kesalahan yang sama supaya segera diatasi.

Supaja soal pengorganisasian kaum tani mendapat perhatian yang se-besar²nja, karena tudjuan mengadakan riset tidak lain adalah untuk memperhebat gerakan tani, saja telah memberikan petundjuk agar desa² dan ketjamatan² diklasifikasi. Desa² yang keluarga taninja sudah 75% terorganisasi dalam BTI dinamakan desa klas I, yang 50% sampai 75% klas II, yang 25% sampai 50% klas III, yang dibawah 25% klas IV dan yang belum ada BTI sama sekali klas V. Tetapi klasifikasi berdasarkan keanggotaan BTI belumlah mentjerminkan kekuatan politik kaum tani, oleh karena itu perlu sekali diriset taraf kesedaran politik, keadaan moral dan kebudayaan kaum tani.

Dari tanggal 18 sampai dengan 23 Maret saja telah mengadakan pembijtaraan perseorangan setjara langsung, mengadakan diskusi² dan rapat² dengan semua petugas riset. Segera sesudah itu, tanggal 24 Maret, saja mulai menulis risalah ini. Risalah ini tidak lain maksudnja jalah untuk memberikan laporan singkat tentang berbagai *keadaan* dan *kesimpulan* yang ditarik dari pembijtaraan², diskusi² dan rapat² tentang laporan petugas² riset.

Risalah ini tidak dimaksudkan untuk memberikan laporan lengkap, karena djika demikian akan mendjadi buku yang tebal yang tidak diperlukan oleh kader² gerakan tani dalam kegiatannja se-hari². Risalah ini ditudjukan untuk membantu kader² dalam memperbaiki pekerdjaan mereka memimpin gerakan tani, chusunnja gerakan tani di Djawa Barat.

Riset di Djawa Barat yang saja pimpin kali ini dilangsungkan dibawah sembojan „Perhebat pengintegrasian dengan penelitian!”

I

PENTINGNJA PEKERDJAAN RISET DAN PENTINGNJA KAUM TANI.

PKI sudah agak lama memadukan kegiatan politik dan organisasinya dengan pekerjaan riset. Inilah salahsatu sebab penting mengapa PKI maju dengan pesat dalam masa belasan tahun belakangan ini. Saja berpendapat, Partai Komunis yang tidak melakukan riset pantas diragukan kemurniannya sebagai Partai Marxis-Leninis. Tidak melakukan riset berarti tidak mengenal keadaan, tidak mencari kebenaran dari kenyataan².

Sedjak tahun 1951 kaum Komunis Indonesia sudah berusaha menggunakan metode riset dalam pekerjaan Partai. Misalnja, kita pernah berusaha untuk mengetahui persoalan agraria, kaum tani dan gerakan tani setjara „tanya-djawab”, setjara angket (questionnaires), dengan jalan mengedarkan formulir² yang memuat daftar pertanyaan dengan kolom² yang harus diisi oleh kader-kader Partai tertentu. Kebanyakan dari formulir² ini tidak kembali kepada Komite² yang mengirimkannya, hanya sedikit yang kembali dengan memuat angka² resmi dari kelurahan, ketjamatan atau djawatan. Metode demikian ini adalah keliru, karena tidak mengadakan kontak langsung dengan kenyataan² kongkrit, makaitu tidak mungkin memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai soal yang ingin kita ketahui. Apalagi djika sumbernja se-mata² dari djawatan, ketjamatan atau kelurahan, tentu sadja tidak mungkin memberikan gambaran yang benar mengenai hubungan kelas² dan tjara² penghisapan didesa. Memang metode yang demikian ini bukanlah metode kaum Marxis-Leninis mengadakan riset dan oleh karenanja metode ini segera kita tinggalkan.

Meskipun demikian, metode riset yang salah inipun telah membawa pengaruh yang baik terhadap sementara kader² PKI. Mereka mulai berorientasi kepada kaum tani dan diantaranya mulai memperbaiki pekerjaannya dikalangan kaum tani. Dalam kontak langsung dengan massa

kaum tani ini, mereka telah memperhatikan dan men-tjatat perasaan dan fikiran kaum tani yang sebetulnja tidak menjetudjui sembojan „nasionalisasi semua tanah” dan „hak negara atas semua tanah” dari BTI dan RTI ketika itu. Rasa milik atas tanah pada kaum tani Indonesia adalah sangat kuat, dan „nasionalisasi semua tanah” atau „hak negara atas semua tanah” diartikan oleh mereka sebagai usaha merampas tanah yang sudah mereka miliki. Berhubung dengan itu menjelang Kongres Nasional ke-V (1954), Partai telah mengadakan banjak diskusi tentang soal² agraria dan kaum tani, dan sebagai kesimpulannya politik agraria Partai dirumuskan dalam Program Partai sbb. : „semua tanah yang dimiliki oleh tuantanah² asing maupun tuantanah² Indonesia harus disita tanpa peng-gantian kerugian. Kepada kaum tani, per-tama² kepada kaum tani takbertanah dan kaum tanimiskin, diberikan dan dibagikan tanah dengan tjuma²”. Sebagai sembojan ditetapkan : „tanah untuk kaum tani” dan „milik per-seorangan tani atas tanah”.

Dalam Kongres Nasional ke-VI Partai (1959) telah di-simpulkan bahwa kader² Partai „harus bekerdja berdasar-kan hasil² riset atau bekerdja setjara ilmiah untuk mem-perbaiki pekerjaan praktis mereka dalam membangkit-kan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama massa kaum buruh dan kaum tani”. Semendjak itu pe-kerdjaan riset Partai dikalangan kaum tani telah menem-puh jalan yang tepat, jaitu dengan melaksanakan metode „3 sama”. Dengan menggunakan metode ini telah banjak pekerjaan riset dilakukan dengan mengirimkan kader² penting ke-desa².

Dengan bersandar pada hasil² riset tentang soal² agraria dan gerakan tani, makin lama makin mampulah Partai menganalisa dan menjimpulkan setjara tepat pekerjaan-nja dikalangan kaum tani. Ini sangat membantu dalam memperbaiki pekerjaan Partai dikalangan kaum tani. Sebagai akibatnja, kalau anggota BTI-RTI ketika berfusi dalam tahun 1953 seluruhnja hanya berdjumla 400.000, sekarang telah meningkat mendjadi lebih dari 7 djuta anggota BTI.

Kita telah menjimpulkan dengan baik tentang maha-pentingnja kaum tani atau desa dalam revolusi. Berdasar-kan pengalaman² kita sendiri selama Revolusi Agustus '45, kita telah menarik kesimpulan bahwa kaum tani atau

desa² dinegeri kita memainkan 4 peranan penting dalam revolusi, jaitu sebagai: 1) sumber bahan makanan; 2) sumber pradjurit revolusioner; 3) tempat mundur apabila terpukul di-kota²; 4) pangkalan untuk melakukan serangan-serangan dan merebut kembali kota². Inilah peladjaran mahapenting dari Revolusi Agustus '45. Peladjaran ini kita bajar dengan banjak korban. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan peladjaran itu.

Pentingnja peranan kaum tani dalam kehidupan bangsa makin lama makin dirasakan dan diakui oleh semua golongan. Diwaktu ini masalah tani sudah diakui setjara luas sebagai masalah jang paling pokok dalam kehidupan politik dalam negeri. Tidak ada masalah nasional jang besar jang bisa diselesaikan tanpa menghubungkannya dengan penyelesaian masalah tani. Hal ini bukan hanya kejakinan PKI sadja, tetapi makin lama makin mendjadi kejakinan setiap Manipolis jang djudjur dan konsekwen. Dalam dokumen² resmi Pemerintah sudah ditekankan berkali² tentang pentingnja pertanian dan perkebunan sebagai dasar perekonomian negeri, tentang pentingnja landreform, sedangkan kaum tani sudah diakui didalam Manipol sebagai sokoguru Revolusi Indonesia disamping kaum buruh.

Walaupun disatu fihak peranan penting kaum tani sudah diakui setjara resmi dan makin banjak orang² kota jang bersimpati pada gerakan tani, tetapi difihak lain di-kota² masih tjukup banjak kakitangan tuantanah dan setan-setan desa lainnja jang setjara memuakkan memfitnah dan me-njalah²kan kaum tani. Badjingan² tengik ini senaknya sadja menjalahkan kaum tani djika produksi padi berada dibawah taksiran mereka jang ngelantur, djika ada bandjir atau kemarau, djika kaum tani tidak mau diusir se-wenang² dari tanah garapannya dan sampai berani melawan pentraktor jang dikawal dengan bedil, djika ada lurah djahat jang didaulat kaum tani, dsb. Dan semuanya ini mereka hubungkan dengan kaum Komunis. Sudah tentu, kaum Komunis harus merasa gembira dan bangga, karena ini merupakan pengakuan tentang sudah takterpisahkannya kaum Komunis dengan kaum tani. Disamping gembira dan bangga kita harus membuktikan, bahwa kaum Komunis memang tidak terpisahkan dari kaum tani, bahwa walau bagaimanapun kaum Komunis harus membela kaum tani, karena kaum tani tidak mungkin

bersalah dalam segala jang difitnahkan oleh penjambung-lidah² setan² desa itu.

Mengingat perkembangan gerakan tani dewasa ini jang sudah tidak bisa di-tahan² lagi, setiap pemimpin dan anggota PKI harus lebih memperdalam pengetahuannya mengenai soal tani dan gerakan tani. Oleh karena itulah pekerdjaan riset tentang soal agraria, soal kaum tani dan gerakan tani harus lebih diperhebat dalam seluruh barisan Partai.

Sudah tentu harus diperingatkan, berhubung dengan adanya antusiasme jang besar dalam barisan Partai kita untuk pekerdjaan riset, bahwa dengan memperhebat pekerdjaan riset bukanlah maksudnja untuk memerosotkan Partai kita mendjadi „lembaga riset”. Pekerdjaan riset tidak boleh menarik terlalu banjak kader sekaligus sehingga pekerdjaan se-hari² dibidang politik, ideologi dan organisasi daripada Partai mendjadi terlantar. Lagipula, riset harus selalu dihubungkan dengan taraf perdjuaan pada saat riset itu dilakukan.

Pelaksanaan riset harus didasarkan atas kegiatan, pengalaman dan pengetahuan kaum tani sendiri, dengan disertai persiapan jang menjeluruh dan terperintji. Persiapan jang baik merupakan djaminan suksesnja pekerdjaan riset dengan tidak banjak mengganggu pekerdjaan Partai se-hari².

Seperti djuga dalam mempersiapkan pekerdjaan² Partai lainnja, dalam melakukan riset di Djawa Barat djuga terbukti, bahwa jang per-tama² harus dilakukan ialah menentukan setjara djelas tudjuan, sasaran dan tjara² mengorganisasi riset. Djika hal² ini tidak dirumuskan setjara djelas, maka tidak mungkin petugas-petugas riset melaksanakan pekerdjaannya dengan sukses. Bagi petugas² jang telah ambilbagian dalam pekerdjaan riset di Djawa Barat sudah djelas, bahwa tudjuan riset adalah untuk mengetahui keadaan kaum tani dan gerakan tani di Djawa Barat, artinja mereka harus mengumpulkan bahan² jang terbaru mengenai keadaan² didesa. Sebagai sasaran risetnja ialah semua desa disesuatu ketjamatan. Untuk men-tjapai tudjuan riset, jang sangat penting ialah adanya pedoman riset jang terperintji, dan berdasarkan pedoman ini para petugas diindoktrinasi selama beberapa hari. Dalam menetapkan desa² mana sadja jang akan diriset, oleh CDB terlebih dulu diadakan penggolongan daerah² kabu-

paten menurut kechususannja masing², jaitu dimana terdapat tuantanah bumiputera, djuragan perahu pentjari ikan, perkebunan, kehutanan, bekas tanah partikelir, daerah bekas basis DI-TII, aksi² kaum tani jang sedang menghebat dan jang baru mulai, dsb. Berdasarkan kechususan² ini oleh CDB ditetapkan ketjamatan² jang tipikal sebagai daerah sasaran riset. Dengan meriset ketjamatan² ini, maka akan diperoleh gambaran jang menjeluruh mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani discluruh Djawa Barat.

Pekerdjaan selandjutnja adalah menetapkan djadwal riset jang harus dilaksanakan oleh petugas². Dalam melakukan riset di Djawa Barat, ternjata dibutuhkan waktu seluruhnja 7 minggu, mulai dari persiapan sampai kepada penjimpulannja, dimana riset jang sesungguhnya di-desa² dilakukan selama rata² 1 bulan. Djadwal seperti ini penting, agar Komite² Partai jang daerahnja diriset dapat mengadakan persiapan² dan penjesuaian dengan pekerdjaan se-hari² masing².

Setelah ketjamatan² jang tipikal ditetapkan, maka pekerdjaan jang sangat penting adalah memilih dan menetapkan petugas² riset. Riset di Djawa Barat dilakukan dengan menetapkan dua orang petugas untuk tiap ketjamatan jang masing² dibantu oleh satu tim riset terdiri dari pemimpin² tani tingkat ketjamatan dan desa.

Menarik peladjaran dari pengalaman Djawa Barat petugas² riset sebaiknya terdiri dari (1) fungsionaris² Partai, (2) fungsionaris² ormasrev (buruh, tani, wanita, pemuda, kebudayaan) serta (3) kader² intelektual Komunis (sardjana, pekerdja² teori Partai, mahasiswa, guru dan peladjar), jang djumlahnja masing² kira² sepertiga dari djumlah seluruh petugas jang ditetapkan. Ikutsertanja kader² wanita sangat membantu pelaksanaan riset, chususnja jang berhubungan dengan masalah wanita dan keadaan keluarga kaum tani. Dalam menempatkan petugas riset didesa djuga harus diperhatikan ketjotjokan petugas dengan iklim, bahasa dan adat-istiadat penduduk desa jang akan diriset.

Sebagaimana djuga berlaku untuk pekerdjaan Partai lainnja, untuk suksesnja pekerdjaan riset harus dilaksanakan metode memimpin jang tepat dan dipadu dengan langgam kerdja Partai, baik dari CDB kepada petugas² riset maupun dari petugas riset kepada tim pembantunja. Tiap petugas riset, disamping harus langsung meriset ada-

lah pemimpin riset jang mempunyai pembantu² disemua desa dari ketjamatan jang dirisetnja, dan sebagai pemimpin riset ia harus melaksanakan metode memimpin sebaik-baiknya.

Dari pengalaman riset di Djawa Barat dapat ditarik kesimpulan, betapa pentingnja masalah memilih tempat-tinggal petugas riset selama ia berdiam didesa. Tanpa pilihan jang tepat riset bisa gagal samasekali. Petugas riset jang bertempattinggal dirumah tanikaja, apalagi tuan-tanah, akan tidak dapat kepertjajaan dari buruhtani dan tanimiskin. Karena itu tuanrumah jang harus dipilih ialah buruhtani dan tanimiskin jang keluarganya berada dalam keadaan normal, misalnja, bukan jang sedang menderita hongerudim (busunglapar). Djika keadaan keluarga jang ditempati tidak normal, maka petugas riset tidak akan mendapat keterangan dan bantuan jang setjukupnja dari tuanrumah.

Ada pengalaman dimana petugas riset begitu datang dirumah buruhtani atau tanimiskin, segera sджа menjerahkan semua bekalnja kepada tuanrumah dengan permintaan supaya dibelikan beras, tanpa terlebih dulu mengetahui apa jang dimakan se-hari² oleh keluarga itu. Djika tuanrumah se-hari² sudah tidak makan nasi lagi, maka ini adalah tindakan pertama dari petugas riset jang memisahkan dirinja dari tuanrumah, djadi melanggar prinsip „3 sama”. Ada pula petugas² riset jang karena tidak tahan melihat penderitaan buruhtani dan tanimiskin, lantas membelandjai ongkos² keperluan hidup keluarga jang bersangkutan untuk beberapa hari supaya bisa meningkat sedikit dari biasa. Sudah tentu ini djuga bukan tjara jang tepat, sebab dengan berbuat demikian bukanlah petugas riset jang menyesuaikan diri dengan buruhtani dan tanimiskin, melainkan keluarga tuanrumah jang menyesuaikan diri dengan petugas riset. Dengan berbuat „dermawan” demikian, kesulitan² kaum tani tidak akan teratasi, sedangkan petugas riset akan gagal, karena disamping melanggar prinsip „3 sama” ia harus tjepat pulang berhubung kehabisan bekal. Seharusnja, sebelum menjerahkan bekalnja kepada tuanrumah, petugas riset harus berusaha mengetahui terlebih dulu apa jang dimakan se-hari² oleh tuanrumah dan memberikan belandja untuk makanan jang biasa dimakan tuanrumah. Ini langkah pertama dalam mempraktekkan „3 sama”. Dengan mem-

praktekkan „3 sama” petugas riset bukan hanya tidak memberatkan beban hidup petani yang ditempati, bahkan sebaliknya, petani tersebut merasa dibantu dan dibesarkan hatinya.

Untuk dapat mengetahui soal tani dan gerakan tani didesa, petugas riset harus bertempat tinggal di satu desa paling kurang 1 minggu. Untuk dapat membuka hati tuan rumah sija umumnya dibutuhkan waktu 2 sampai 4 hari. Tetapi dalam hal ini banjak tergantung kepada tepatnya memilih tuan rumah dan tepatnya sikap petugas riset dalam menghadapi tuan rumah. Sikap rendah-hati dan sopan-santun penting sekali. Kalau ingin membuka isi hati buruhtani dan tanimiskin sekali-kali janganlah menggurui mereka. Petugas riset harus bersikap tepat sebagai orang Komunis yang menganggap kaum tani dan Rakjat pekerdja pada umumnya sebagai gurubesarnya. Hanya dengan demikianlah bisa dipraktekkan pengintegrasian dengan kaum tani.

Dalam melakukan „3 sama”, petugas riset harus melakukan kerdja produksi dan kerdja rumahtangga. Djadi harus mengerdjakan apa sija yang dikerdjakan oleh buruhtani dan tanimiskin, meskipun mula² mereka mentjegahnja karena penghargaan yang tinggi kepada kader² Partai atau menganggap petugas riset sebagai „tamu” yang seharusnya tidak bekerdja. Pengalaman di Djawa Barat membuktikan bahwa apabila kita gigih dalam bekerdja, maka buruhtani dan tanimiskin akan lebih lagi merasa bahwa kita satu dengan mereka. Mengenai pekerdjaan rumahtangga banjak sekali yang dapat dikerdjakan, mulai dari menjapu dalam rumah dan halaman sampai kepada memandikan dan mentjeboki anak petani. Pembikinan kakus dan tempat mandi umum yang tertutup setjara gotongrojong sangat disambut oleh kaum tani.

Selama melakukan „3 sama” petugas riset harus betul² berusaha jangan sampai merugikan tuan rumah atau kaum tani lainnya, betapapun ketjilnja. Sebaliknya, harus berusaha supaya membantu tuan rumah mengatasi kesulitan-kesulitannya, demikian pula kesulitan² kaum tani di desa dan kesulitan² Partai dan BTI setempat.

Dalam tidur di rumah buruhtani dan tanimiskin, petugas tidak boleh ber-pindah² semalam di rumah si Udjang dan semalam lagi di rumah si Atong, meskipun mereka sama²

buruhtani atau tanimiskin. Dengan ber-pindah² demikian petugas tidak akan berhasil meresapi sungguh² segala penderitaan buruhtani dan tanimiskin dan djuga tidak akan bisa membuka hati mereka dalam waktu semalam sija.

Dalam melakukan „3 sama”, djuga tidak tepat untuk memilih keluarga fungsionaris Partai sebagai tempat tinggal, walaupun ia adalah buruhtani atau tanimiskin. Fungsionaris Partai adalah elemen yang paling maju didesa, sehingga tidak merupakan pentjerminan mayoritas penduduk desa. Riset harus bersandar kepada kenjataan² sebagaimana ditjerminkan oleh keadaan dan oleh fikiran massa buruhtani dan tanimiskin.

Satu hal yang sangat penting dalam melakukan riset adalah untuk mengetahui tanggapan buruhtani dan tanimiskin mengenai hubungan soal² tani dan gerakan tani dengan Partai, serta tanggapannya mengenai soal² diluar desanja.

Riset berhasil baik apabila petugas melihat sendiri keadaan dan mendengarkan sendiri fikiran² buruhtani dan tanimiskin langsung dari hatinya. Dalam mentjatat semua ini ada pengalaman yang baik ketika riset di Djawa Barat. Misalnja, untuk mentjatat isi rumahnya, alat kerdja, milik tanahnya apalagi fikiran²nya, ternyata tidak tepat untuk mengadakan pentjataan dihadapan buruhtani dan tanimiskin. Pentjataan terlalu mengingatkan mereka kepada tjara² yang lazim digunakan terhadap mereka oleh tuan-tanah, lintahdarat, penguasa djahat atau setan² desa lainnya, yang akibatnja pasti membikin susah mereka. Tjara yang tepat adalah omong² biasa, ngobrol yang nampaknja tanpa atjara tertentu dan tanpa pentjataan. Pentjataan bisa dilakukan kemudian dari ingatan dengan tidak perlu diketahui oleh buruhtani dan tanimiskin.

Dalam mengumpulkan angka², petugas riset harus mentjatat darimana sumbernja. Dalam hal ini kita tidak boleh per-tama² mendasarkan diri pada angka² atau daftar² dari pemerintah desa, lurah, djawatan kehutanan dsb. Ini tidak berarti bahwa daftar² atau angka² ini tidak perlu. Ia perlu dan petugas harus berusaha mendapatkannya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan terhadap bahan² yang dikumpulkan sebagai hasil riset sendiri.

Dalam melakukan tugas² riset, petugas sudah pasti akan menghadapi kesulitan², kesulitan bagi dirinya sendiri, kesulitan keluarga, kesulitan² Rakjat didesa, serta kesulitan² Partai dan BTI setempat. Dalam mentjari djalankeluar dari kesulitan² tersebut, petugas harus menjandarkan diri pada kolektif organisasi dan pada massa.

Mengenai kesulitan² petugas sendiri harus segera didiskusikan dan diselesaikan dengan Komite Partai bersama pimpinan ormasrev² setempat. Mengenai kesulitan² yang dihadapi tuanrumah petugas harus seperlunya menjelaskan sebab²nja kesulitan dengan bertitiktolak dari pengalaman dan keadaan kaum tani sendiri. Menurut pengalaman, petugas riset biasa didatangi dan dikerumuni oleh massa buruhtani dan tanimiskin. Hal ini sudah tentu harus dihadapi se-baik²nja. Dalam pertemuan demikian petugas riset tidak boleh banjak bitjara, tetapi harus mendorong para petani mengajukan pendapat²nja dalam bentuk omong² biasa dengan selalu mentjegah tjara tanja-djawab formil.

Dari pengalaman riset di Djawa Barat dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan „3 sama” harus dipegang teguh „4 djangan” dan „4 harus”. „4 djangan” ialah : 1). djangan tidur dirumah kaum penghisap didesa; 2). djangan menggurui kaum tani; 3). djangan merugikan tuanrumah dan kaum tani; 4). djangan mentjatat dihadapan kaum tani. „4 harus” ialah : 1). harus melaksanakan „3 sama” sepenuhnya; 2). harus rendah-hati, sopansantun dan suka beladjar dari kaum tani; 3). harus tahu bahasa dan mengenal adat-istiadat setempat; 4). harus membantu memetjahkan kesulitan² tuanrumah, kaum tani dan Partai setempat.

Dari uraian diatas djelaslah, bahwa soal mengintegrasikan diri dengan kaum tani adalah soal tekad revolusioner. Tekad revolusioner kita belumlah bulat kalau masih segan membantu kerdja produksi dan kerdja rumah-tangga kaum tani, kalau masih segan memakan apa yang dimakan oleh kaum tani dan masih tidak kerasan tidur diatas tikar tua kaum tani dengan bantal yang kumal, berdaki dan keras karena diisi dengan sabut atau tumbukan sulur djagung (djanggal), dan bahkan mungkin tidak berbantal samasekali. Ja, untuk mengintegrasikan diri dengan kaum tani kaum Komunis harus bertekad : *kalau perlu harus mau mentjeboki anak petani*. Praktek „3 sama” ikut membentuk watak kader² Komunis.

II

PEMBAGIAN KLAS² DIDESA DAN BENTUK² PENGHISAPAN TERHADAP KAUM TANI DAN NELAJAN DI DJAWA BARAT

Laporan² hasil riset dari semua daerah yang diriset memberikan bahan² yang kaya mengenai pembagian klas dan bentuk² penghisapan didesa. Analisa dan kesimpulan PKI yang sudah lama mengenai pembagian klas² didesa Indonesia dan ber-matjam² bentuk penghisapan feodal dan kapitalis ternjata mendjadi sendjata yang ampuh bagi para petugas riset untuk mengenal setjara kongkrit keadaan desa² yang diriset. Dalam pada itu, sikap para petugas yang bertitiktolak dari kenyataan kongkrit, yang melaksanakan sembojan beladjar dan bekerdja PKI „*Tahu Marxisme dan kenal keadaan*”, banjak memperkaja analisa² itu dan memperlihatkan keadaan klas² dan bentuk² penghisapan² di-desa² Djawa Barat dalam segala keanekaragamannja. Seperti sudah didjelaskan diatas, daerah² yang diteliti sangat ber-matjam². Ada daerah² yang terutama terdapat pertanian persawahan, ada daerah² kehutanan, daerah² perkebunan, daerah² pantai, daerah² dimana belum lama berselang teror² DI-TII masih meradja-lela, daerah² tanah subur dan daerah² tanah tandus, dan daerah² dimana terdapat kombinasi dari berbagai kechususan² itu. Tetapi semua daerah itu memperkuat kesimpulan PKI bahwa di-desa² Indonesia, djadi djuga di-desa² Djawa Barat, masih terdapat sisa² feodalisme yang berat, bahwa ekonomi Indonesia, disamping masih bersifat kolonial djuga masih setengah-feodal.

1. PEMBAGIAN KLAS² DIDESA

Di-desa² Djawa Barat terdapat kaum penghisap seperti tuantanah, lintahdarat, tukang-idjon, tengkulak, kapitalis birokrat dan tanikaja. Kaum tani pekerdja terbagi dalam buruhtani, tanimiskin dan tanisedang. Di-daerah² pantai

dimana jumlah terbanjak penduduk adalah nelajan, dju-raganperahu atau tuannelajan memegang peranan penghisap yang sedjenis dengan tuantanah. Kaum nelajan terbagi dalam klas²: nelajankaja (penghisap seperti tanikaja), nelajansedang, nelajanmiskin dan buruhnelajan. Dan di-daerah², djuga terdapat klas² penghisap lain seperti lintahdarat, tukang-idjon, tengkulak dan kapitalis birokrat.

Disamping itu, di-desa² masih terdapat berbagai klas dan golongan lain seperti guru² desa yang merupakan kaum intelektual desa, pandai besi, tukang² keradjinan-tangan dan tukang² lainnja, pedagang² ketjil, buruh kehutanan, perkebunan atau industri. Suatu gambaran tentang ber-matjam²nja klas didesa dapat dilihat pada pembagian klas didesa Eretan Wetan, Ketjamatan Kandang-haur, Kabupaten Indramaju (Lampiran I, hal. 92).

Dibawah ini akan disorot berbagai klas dan golongan didesa, chusunjia dalam perwujudannja sebagaimana dapat disimpulkan dari hasil² riset di Djawa Barat.

Tuantanah. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh tuantanah didesa ada yang berdjumlah beberapa hektar, ada yang beberapa puluh, beberapa ratus atau beberapa ribu ha (umpamanja tanah kesultanan di Lemahabang yang berdjumlah ribuan ha). Tetapi walaupun ada tuantanah yang milik tanahnja hanya 3-4 ha, penghasilannja sangat besar karena tanahnja subur sekali dan penghisapannja intensif, selain dengan sewatanah, djuga lewat idjon, gadai dan renten. Hal ini kita lihat misalnja didaerah Garut, ketjamatan Wanaradja dimana seorang tuantanah bernama M. memiliki tanah sawah 3 ha, waduk (kolam besar) seluas 500 tumbak (1 bau = 0,7 ha) yang dalam saban tiga bulan menghasilkan dua ton ikan, dan sawah seluas 2 ha yang diperolehnja dengan gadai. Tuantanah ini djuga mendjalankan praktek lintahdarat dengan memindjamkan uang yang berbunga-madjemuk.

Hasil² riset membuktikan, bahwa tuantanah² yang memiliki luas tanah yang relatif ketjil, melakukan penghisapan yang sama kedjamnja seperti mereka yang memiliki luas tanah yang besar, bahkan ada kalanja djustru karena memiliki tanah yang ketjil itu, lebih kedjam.

Perlu ditjatat pula, bahwa hasil² riset tentang pemilikan tanah tuantanah² di-desa² yang diriset sering tidak lengkap karena tuantanah bersangkutan djuga memiliki tanah di-

tempat lain, baik atasnamanja sendiri maupun dengan nama orang lain.

Mengenai tuantanah, kaum tani sudah mengerti akan kedjahatannja sebagai penghisap kedjam tetapi kaum tani membedakan antara tuantanah yang patriotik, anti-DI-TII, yang tidak berkepalabatu menentang UUPBH dan UUPA, dengan „tuantanah djahat” yang aktif menentang gerakan tani dan menentang politik negara yang madju (UUPBH, UUPA, konfrontasi dengan „Malaysia” dsb.).

Pada umumnja kaum tuantanah di-desa² Djawa Barat adalah tuantanah djahat yang dengan segala daja-upaja menentang gerakan tani revolusioner. Hanja sebagian ketjil tuantanah bersikap pasif terhadap gerakan tani revolusioner dan tidak menentang politik Pemerintah yang madju. Kaum tuantanah djahat dengan aktif menjebarkan propaganda anti-Manipol, banjak hadji tuantanah yang menjalahgunakan agama untuk memperluas milik tanahnja dan memperhebat penghisapan terhadap kaum tani. Karena menurut ajaran Islam sistim gadai adalah haram, maka ada tuantanah yang melakukan praktek gadai terhadap pohon buah²an di Ketjamatan Tjimanggis, Bogor, dengan memakai nama „sistim sewa titip pohon”.

Tuantanah² djahat itu biasanja adalah bekas anggota² partai terlarang Masjumi-PSI, penjokong aktif gerombolan² DI-TII ketika masih meradjalela, dan pengandjur serta peserta aktif tindakan² rasialis kontra-revolusioner yang terdjadi dalam bulan Mei tahun 1963. Kini mereka bersarang dalam *Madjelis Ulama (MU)*, jaitu yang sesungguhnya merupakan „*Masjumi gaja baru*”, dan menjtjari perlindungan pada alat² kekuasaan sivil dan militer setempat seperti lurah, Koramil (Komando Rajon Militer, setingkat ketjamatan), Bintara Pembina Wilajah, Hansip (Pertahanan Sipil), OPR (Organisasi Pertahanan Rakjat), dll.

Kaum tuantanah djahat dengan keras melawan pelaksanaan UUPBH dan UUPA. Mereka dengan buru² „menghibahkan” tanah-lebihnja kepada sanak-keluarganja supaja tidak terkena oleh UUPA. Bahkan ada tuantanah yang untuk mempertahankan tanahnja sampai menjtjeraikan isterinja setjara formil dan dengan demikian „membagi” tanah miliknja. Didalam hasil riset telah diperoleh banjak bukti, bahwa tanah² lebih yang „dihibahkan” itu tetap dikuasai oleh tuantanah yang tetap me-

nerima segala hasil dari penghisapan terhadap kaum tani yang mengerdjakan tanah itu. Dibanjak tempat, perbuatan² tjurang tuantanah itu dapat dibongkar oleh kaum tani yang sudah bangkit. Di Wanaradja (Garut), misalnja, kaum tani telah membongkar kedjahatan tuantanah H. jang „mendjual” 60 ha tanah darat dengan segel tahun 1959. Perbuatan ini bisa dibongkar karena tjamat jang menandatangani segel itu baru mendjadi tjamat ditempat itu pada tahun 1962. Riset jang dilakukan di-desa² Djawa Barat menundjukkan bahwa UUPBH dan UUPA hanja mau dilaksanakan oleh tuantanah² djika dipaksa oleh gerakan tani jang revolusioner.

Diantara tuantanah² ada gejala² bahwa mereka memindahkan sebagian kegiatannja ke-usaha² kapitalis. Umpamanja di Ketjamatan Rantjah, Tjiamis, seorang tuantanah mendjual sebagian tanahnja untuk didjadikan modal perdagangan dan setelah 10 tahun ia sudah memiliki 11 buah toko dikota. Tetapi ia tidak sepenuhnya melepaskan penghisapan setjara feodal, ia masih tetap memiliki tanah didesa jang disewakan dengan bagihasil dan kemudian djuga menggunakan sebagian dari keuntungannja jang diperoleh dari usaha² dagang untuk membeli tanah lagi. Ada pula tuantanah jang tidak mau lagi menjewakan sawahnja, tapi menggunakan tenaga-upahan buruhtani. Hal ini pada satu fihak dilakukan untuk mengelakkan UUPBH dan pada fihak lain djuga menambah keuntungan materiil tuantanah akibat inflasi, karena kenaikan upah buruhtani sangat ketinggalan djika dibandingkan dengan kenaikan harga padi. Tetapi walaupun mereka menggunakan tenaga-upahan dan dengan demikian penghisapan mereka mengandung sifat kapitalis, tetapi penghisapan mereka atas buruhtani masih banjak mengandung sifat² feodal. Buruhtani jang mereka pergunakan itu boleh dikatakan bekerdja tanpa batas djamkerdja dan melakukan berbagai kerdja-paksa sehingga mendjadi setengah budak atau hamba.

Penelitian di-desa² Djawa Barat membuktikan bahwa ekonomi didesa masih betul² ditjengkeram oleh tuantanah jang djuga masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masjarakat desa.

Tanikaja. Pada umumnja kaum tanikaja masih turut dalam pekerdjaan produksi pertanian dan tanahnja sebagian dikerdjakan dengan menggunakan tenaga-upahan buruhtani. Tetapi sebagai akibat terbelakngnja ekonomi

desa maka penghisapan kaum tanikaja djuga banjak mengandung sifat² feodal. Misalnja, buruhtani jang dipekerdjakan itu bukan buruh jang bebas, tapi sedikitbanjak masih ada ikatan jang bersifat perhambaan. Begitu pula ada tanikaja² jang sebagian tanahnja digarapkan dengan tjara menjewakan.

Banjak tanikaja djuga melakukan praktek lintahdarat, idjon dan tengkulak. Mereka mempunyai ketjenderungan kuat untuk memusatkan tanah dan ada jang berkembang mendjadi tuantanah.

Tetapi peranan tanikaja didesa berbeda dengan tuantanah. Mereka tidak langsung bermusuhan dengan gerakan tani revolusioner dan dalam soal² tertentu bisa bersatu dengan gerakan tani, umpamanja dalam melawan kebiasaan² dan kewadajiban² feodal didesa. Pada umumnja tanikaja bisa dinetralisasi dalam perdjungan melawan tuantanah.

Tanisedang. Pada umumnja memiliki tanah jang dikerdjakan sendiri dan penghasilannja sekedar tjukup untuk hidup sekeluarga. Dalam keadaan ekonomi sekarang, diantara tanisedang terdapat dua ketjenderungan perkembangan. Sebagian ketjil tanisedang, jaitu tanisedang lapisan atas, berkembang mendjadi tanikaja dengan mengkombinasikan penggarapan tanah dengan usaha² lain seperti dagang, dan dengan menggunakan hubungan² dengan penguasa² setempat. Tetapi sebagian besar tanisedang tidak stabil ekonominja dan terus terantjam kebangkrutan. Peraturan² ekonomi 26 Mei 1963 sangat memukul tanisedang, sehingga usaha-dagangnja umumnja hantjur. Tanisedang djuga bisa djatuh ketangan tengkulak djahat atau lintahdarat. Maka ia harus hidup sangat hati². Misalnja di Ketjamatan Sagaranten (Sukabumi) tanisedang pada musim kemarau hanja makan satu kali sehari supaja dapat menghemat persediaannja dan tidak usah memburuh pada tanikaja atau tuantanah.

Sebagai akibat kemadjuan gerakan tani revolusioner dan hasil² aksi kaum tani maka di-desa² Indonesia djuga di-desa² Djawa Barat ada petani² jang mendjadi tanisedang baru. Mereka tadinja adalah buruhtani atau tanimiskin dan memperoleh tanahgarapan sebagai hasil kemenangan aksi². Umpamanja buruhtani U. di Ketjamatan Sagaranten memperoleh tanah sawah 200 tumbak dan kebun 300 tumbak karena berhasilnja aksi kaum tani di-

bawah pimpinan BTI untuk mensahkan tanahgarapan kaum tani yang berasal dari tanah kehutanan. Maka U. berpindah klas dari buruhtani menjadi tanisedang.

Kaum tanisedang, baik yang lama maupun yang baru, sangat memerlukan pengkoperasian dibawah pimpinan orang² revolusioner agar kepentingan mereka tetap terjamin dan mereka tetap dapat berjuang dalam barisan² tani yang revolusioner.

Tanimiskin. Tanimiskin atau semi-proletar desa memiliki tanah yang hasilnya tidak cukup bagi keperluan hidupnya. Misalnja, tanimiskin K. didesa Tjidadap, Ketjamatan Sagaranten, hanya memiliki tanah 100 tumbak dan alat² kerdja 1 tjangkul, 1 parang, 1 garpu dan 1 golok. Penghasilan dari tanahnya hanya cukup untuk makan 6 bulan, sedangkan untuk 6 bulan lainnya ia harus memburuh pada orang lain. Tanimiskin D. didesa Paledah, Ketjamatan Padaherang, menggarap sawah tuantanah Dul. seluas 400 bata dengan tjara maro, dan mempunyai alat-kerdja 1 tjangkul dan 1 arit. Makannya sehari² ojek (nasi singkong) dan djagung, jarang makan nasi.

Ada pula tanimiskin yang tidak mampu lagi menyediakan modal untuk mengerjakan tanah miliknya, maka tanahnya diserahkan kepada tanisedang, tanikaja ataupun tuantanah dengan sistim *bajur*. Dengan sistim ini tanah itu jatuh ketangan pemegang bajur, misalnja selama 2-3 tahun, tanpa membayar sewa samasekali kepada tanimiskin. Sesudah 2-3 tahun itu hasilnya diparo dengan tanimiskin jbs. Tetapi karena tanimiskin selalu kekurangan uang, ia sering menghutang kepada yang memegang tanahnya. Pada akhirnya karena terdjerat oleh hutang²nja yang tak dapat dibayar kembali, tanah yang dibajurkan itu menjadi milik pemegang tanah bajur. Jadi, sistim bajur merupakan sematjam gadai tanah.

Untuk menjambung hidupnya tanimiskin harus juga memburuh atau melakukan ber-matjam² pekerdjaan sambilan. Misalnja, tanimiskin A. di Ketjamatan Warunggunung (Lebak), memiliki tanah sawah 8 petak, yang 5 petak digarapnja sedangkan 3 petak digadaikan untuk memodali usaha dagang ketjil²an guna mentjukupi kebutuhan beras. Ada juga yang mengerjakan berbagai matjam keradjinantangan, seperti membuat bongsang (kerandjang buah²an), tali, kukusan dll. Banjak pula yang terpaksa meninggalkan desanja dan pergi kekota, daerah

lain atau pulau lain. Ditempatnja yang baru, mereka mengharapkan bisa hidup dari hasil bawonnja, hasil upah-kerdja pada tuantanah atau tanikaja dan klas² penghisap lainnya serta pada perkebunan swasta atau negara. Mereka pergi ke-kota² untuk bekerdja menjadi kuli, tukang betjak, buruh pelabuhan, tukangdjual es, djual djamu dls, sedangkan wanita² muda karena gagal mentjari pekerdjaan dikota ada yang sering terpaksa melatjurkan diri. Ditempat² kerdja yang barupun mereka tidak bisa terlepas dari berbagai matjam bentuk penghisapan. Pada musim panen didesa asalnya, banjak diantara mereka pulang kembali kekampungnja.

Buruhtani. Buruhtani atau proletar-desa tidak memiliki tanah samasekali dan sepenuhnya hidup dari pendjualan tenagakerdjanja. Kafena ia tidak selalu mendapat pekerdjaan menggarap sawah, maka terutama dimusim patjeklik ia mengerdjakan ber-matjam² pekerdjaan sambilan, seperti misalnja mentjari dan mendjual kaju-bakar, dsb. Misalnja buruhtani M. di Ketjamatan Rantjah, Tjiamis, tidak memiliki tanah dan alat² kerdjanja hanya berupa 1 tjangkul, 1 golok, 1 sabit dan 1 pisau. Pekerdjaan sehari²nja mentjangkul dengan upah Rp. 70,— sehari dengan dua kali makan. Pekerdjaan sambilannya ialah membikin ajakan, kukusan, tudung dan lain² dari bambu. Biasanja keluarga buruhtani hanya bisa makan nasi 2 kali sehari selama tiga bulan sesudah panen. Pada bulan² berikutnya mereka makan nasi hanya 1-2 kali sehari atau samasekali tidak makan nasi, tapi djagung dan gaplek. Pada musim patjeklik yang lamanja juga tergantung pada musim kemarau, kehidupan buruhtani sangat sulit, makannya bersifat „korek² tjok”, artinja seperti ayam, mentjari makanan buah²an, daun²an dan apa saja yang ditemukan terds dimakan. Dengan demikian makannya tidak menentu, kadang² ada, kadang² tidak ada samasekali dan makan apa saja yang dapat ditemukan dan bisa dimakan. Sama seperti kaum tanimiskin, kaum buruhtani sering meninggalkan desa pergi kekota, daerah lain dan pulau lain. Umpamanja didaerah Banten banjak yang menjeberang ke Sumatera Selatan (Lampung), ada yang pergi dari Indramaju ke Krawang, dari Sindanglaut ke Djakarta mentjari makan setiap hari tanpa persediaan bahan makanan. Pada musim panen banjak yang kembali kedesa asalnya, tapi banjak juga yang sudah mengubah

pekerdjaannya jang pokok. Misalnja didaerah pantai Eretan Wetan, Indramaju, banjak buruhtani meninggalkan pekerdjaan bertjotjoktanam dan mendjadi buruh-nelajan.

Lintahdarat. Mereka jalah kaum ber-uang jang merentankan uangnya dengan bunga jang sangat tinggi. Pindjaman setjara renten (riba) ini langsung merusak daja produksi kaum tani dan mendjerumuskan mereka kedalam tumpukan hutang jang tak ada habis²nja.

Tukang-idjon. Mereka jalah orang² jang mengambil keuntungan dari kebutuhan kaum tani akan uang tunai dengan membeli hasil² bumi setjara murah pada waktu tanaman masih belum matang (masih hidjau). Dengan demikian mereka menguasai hasil produksi kaum tani.

Praktek *lintahdarat* dan *tukang-idjon* merupakan praktek penghisapan jang djahat sekali jang langsung merusak daja produksi kaum tani dan mempertjepat proses pembangkutan mereka.

Tengkulak. Mereka jalah pedagang² jang membeli hasil produksi kaum tani pada waktu panen dan djuga mendjual barang² keperluan se-hari² dari kota kepada kaum tani. Diantara tengkulak² terdapat „tengkulak² djahat“, jaitu mereka jang mendjalankan usaha² dagangnja dengan mengeruk keuntungan² sangat besar berkat kedudukannya jang bersifat monopoli (pembeli tunggal). Tengkulak² djahat djuga menggunakan sistim idjon dan tempah (pandjar) untuk menguasai dan memonopoli hasil produksi kaum tani termasuk hasil² keradjinan tangan, dan djuga mendjual kepada kaum tani barang² keperluan se-hari² setjara tjitjilan atau kredit dengan harga jang sangat ditinggikan.

Kapitalis birokrat. Kaum kapitalis birokrat (kabir) didesa menekan kaum tani untuk mendjual hasil produksinja kepada perusahaan² kabir dikota dengan menggunakan uang negara, antara lain dengan menjalahgunakan nama PDN², PN² dan PPN. Hubungan mereka erat terdjalin dengan kepentingan tuantanah djahat, tengkulak djahat dan tukang-idjon.

Bandit² desa adalah mereka jang melakukan kedjahatan² didesa untuk membela kepentingan klas² penghisap, terutama tuantanah dan kabir. Dalam golongan ini termasuk tjenteng² djahat tuantanah, tukangpukul², djawara² (djuara²) djahat dll.

Pekerdja² keradjinantangan dan pertukangan djuga terdapat di-desa² Djawa Barat seperti tukang bikin barang² anjaman, tukang bikin topeng, wajang, pajung, kelom dsb, pandai besi, tukang kaju, tukang djahit dll. Pekerdjaan tukang dan keradjinantangan dan pertukangan djuga biasa dilakukan oleh tanimiskin dan buruhtani untuk mendapat penghasilan tambahan.

Kaum intelektual dan seniman desa. Dalam kategori intelektual desa termasuk terutama guru² Sekolah Dasar. Karena hidup guru² ini dari gadji tetap jang kenaikannya djauh tertjetjer djika dibandingkan dengan kenaikan harga dalam inflasi, maka tidak sedikit jang mentjari tambahan dari kerdja produksi, perdagangan ketjil dsb. Seniman desa hidupnya djuga tidak menentu.

Gambaran mengenai pembagian klas² didesa memperlihatkan bagaimana Rakjat pekerdja didesa mengalami penghisapan dan penindasan jang kedjam dari (1) *tuantanah djahat*, (2) *lintahdarat*, (3) *tukang-idjon*, (4) *kapitalis birokrat*, (5) *tengkulak djahat*, (6) *bandit desa*. Disamping itu ada lagi : (7) *penguasa djahat*, jaitu penguasa desa jang membela kepentingan² kaum penghisap desa atau ia sendiri adalah djuga penghisap. Mereka sungguh-sungguh merupakan *tudjuh setan desa* jang menghisap darah kaum tani. Bahkan diantara mereka ada jang mendjadi tuantanah djahat merangkap lintahdarat, tukang-idjon, kapitalis birokrat dan lain² sehingga merupakan *setan dasamuka*. Hanja dengan mengachiri penghisapan dan penindasan setan² desa ini kaum tani dapat mentjapai pembebasan jang sungguh². Tanpa berbuat demikian, adalah omongkosong berbitjara tentang penjelesaian revolusi nasional-demokratis, apalagi tentang masjarakat adil dan makmur.

2. BENTUK² PENGHISAPAN ATAS KAUM TANI DAN NELAJAN

Hasil² riset memperkuat kesimpulan PKI bahwa di Indonesia terdapat empat tjiri feodalisme jang berat, jaitu : (1) monopoli tuantanah atas tanah; (2) sewatanah dalam wujud hasilbumi; (3) sewatanah dalam bentuk kerdja ditanah tuantanah; dan (4) hutang² jang mentjekik leher kaum tani. Fakta² jang ditemukan selama riset di Djawa Barat memperlihatkan tjiri² itu dalam segala variasi dan kombinasinja.

A). Monopoli tuantanah atas tanah. Sekalipun sudah ada Undang² Pokok Agraria, proses pemusatan tanah ke-dalam tangan tuantanah berlangsung terus di-desa² dan dilakukan lewat sistim gadai-tanah (gadai biasa, dijual akad atau dijual sandak), hutang, sistim bajur, sistim kedok, dll. Tuantanah D. di Ketjamatan Karangnunggal, Tasikmalaja, memiliki 11 ha tanah sawah dan palawidja. Sebagian tanah itu dirampasnja dari petani A. dan I. karena mereka tidak mampu membajar hutang.

B). Bentuk penghisapan feodal yang terpokok ialah sewatanah. Jang paling luas tersebar ialah sewatanah berwujud hasilbumi dengan ber-matjam² sistimnja, seperti : maparonan atau maron, marampat, mertilu, merlima dll.

Sistim maparon atau maron : pada pokoknja hasil panen dibagi dua, satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. Tapi ada berbagai matjam ketentuan mengenai pemotongan pajak, bibit, pantjen dsb. Ada jang pemiliknja minta separo bersih, artinja segala beaja harus ditanggung penggarap, ada jang beaja itu dibagi dua djuga (ini antara lain dibuktikan oleh laporan riset Ketjamatan Padaherang).

Sistim marapat : menurut sistim ini penggarap pada hakekatnja hanya menerima seperlima dari hasil panen. Jaitu pemilik tanah mendapat tiga bagian, penggarap mendapat satu bagian dan satu bagian lagi diterima oleh jang „ngepak”. Orang jang „ngepak” ialah tanimiskin atau buruhtani kepertjajaan tuantanah jang melakukan pekerdjaan² tidak pokok disawah, seperti memperbaiki pematang, nandur dan njiangi.

Sistim mertilu : hasil panen dibagi : dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik tanah.

Sistim merlima : hasil panen dibagi : dua bagian untuk pemilik tanah dan tiga bagian untuk penggarap.

Ada djuga tuantanah jang menetapkan sewatanah dalam bentuk hasilbumi jang tetap, misalnja untuk satu hektar selama satu tahun 1 tjaeng 12 gedeng (1 tjaeng = 100 gedeng, 1 gedeng padi = kira² 5-6 liter beras). Bila ada kegagalan panen, misalnja karena bentjana alam, hama dls. maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penggarap.

Disamping sewa berwujud hasilbumi djuga terdapat sewa berupa kerdja, jaitu bentuk sewatanah jang lebih bersifat perhambaan. Umpamanja di Banjubiru (Pande-

glang) ada petani jang menggarap 8 petak tanah tuantanah, untuk jang 3 petak berlaku sistim maron, tapi untuk jang 5 petak hasil seluruhnja mendjadi milik tuantanah. Maka kerdja tani di 5 petak itu adalah tak lain daripada tambahan sewatanah dalam wujud kerdja.

Ada pula sewatanah berupa uang, misalnja antara lain di Ketjamatan Lemahabang, jaitu untuk 1 bau (0,7 ha) sewanja Rp. 60.000,— setahun.

Oleh karena sewatanah merupakan sumber penghisapan jang pokok bagi tuantanah, maka mereka dengan segala daja melawan aksi² kaum tani untuk turun sewa, baik didalam maupun diluar rangka pelaksanaan UUPBH. Boleh dikatakan bahwa didaerah Djawa Barat semua perdjandjian bagihasil jang sesuai dengan UUPBH dilaksanakan sebagai hasil aksi² sefihak kaum tani.

C). Dalam keadaan dimana terdapat kemerosotan ekonomi setjara umum dan meningkatnja inflasi, maka penghisapan terhadap kaum tani djuga makin menghebat. Terutama jang paling menondjol ialah bentuk² penghisapan jang langsung menarik keuntungan dari keadaan inflasi, dari ketidakstabilan harga² dan dari keadaan bahwa kaum buruhtani, tanimiskin dan tanisedang selalu membutuhkan uang setjara mendesak baik untuk kebutuhan² produksi maupun untuk kebutuhan² konsumsi. Bentuk² penghisapan itu ialah :

1). Praktek² lintahdarat jang bunga-pindjamannja sampai beberapa ratus persen sebulan dan sering bersifat bunga-madjemuk. Umpamanja lintahdarat H. S., desa Kawunglarang, Ketjamatan Rantjah, memindjamkan uang Rp. 100,— jang dalam satu bulan harus dikembalikan Rp. 400,—. Didesa Tjibogo, Ketjamatan Padaherang, seorang tuantanah merangkap lintahdarat, H. A., bekas anggota Masjumi menghutangkan uang Rp. 1000,— dengan ketentuan tiap minggu harus mengangsur dengan bunga Rp. 150,— selama 11 minggu. Ada lagi jang merentankan kepada kaum tani dan pedagang ketjil dipasar dengan bunga 4% dalam waktu 12 djam. Seorang tuantanah merangkap lintahdarat di Ketjamatan Wanaradja memindjamkan Rp. 10.000,— dengan renten 1 pikul padi jang dibajar selama satu musim panen (6 bulan). Djika pada musim panen itu bunga belum bisa dibajar, maka bunga itu ditambahkan mendjadi pokok (bunga-madjemuk). Seorang lintahdarat disalahsatu desa Ketjamatan

Karangnunggal memindjamkan uang Rp. 4.000,— dengan djandji akan bisa dibayar kembali dalam bentuk hasilbumi (ubi kaju). Setelah panen, ubi tak djadi diambil oleh lintahdarat dan ia meminta hutang dibayar dengan uang jang djauh melebihi hutang semula. Karena tidak mampu membayar djumlah itu, sipetani achirnja menjerahkan tanahnja sebanjak 40 batu dan djuga rumahnja kepada lintahdarat. Maka praktek² penglepas uang-panas ini sungguh merupakan penghisapan jang sangat kedjam jang mendjerat leher kaum tani.

2). Sistim *idjon*, baik idjon hasil produksi pertanian, hasil keradjinantangan maupun tenagakerdja buruhtani. Di Ketjamatan Sagaranten, Sukabumi, pada tahun 1963 pembelian padi setjara idjon dilakukan dengan harga Rp. 1.000,— sekwintal pada waktu dua bulan sebelum panen. Pada waktu panen harga padi ialah Rp. 2.000,— sekwintal. Untuk tahun ini tukang-idjon membeli padi setjara idjon dengan harga Rp. 3.000,— sekwintal, sedangkan pada musim patjeklik sekarang harganja Rp. 8.500,— sampai Rp. 10.000,— sekwintal. Karena tukang-idjon sudah menguasai hasil produksi pada panen tahun jang lalu, maka ia dapat mendjual padi jang dibelinya dengan harga Rp. 1.000,— sekwintal (harga idjon tahun 1963) dengan harga musim patjeklik (Rp. 8.500,— — Rp. 10.000,—). Maka keuntungan jang diperolehnja adalah besar sekali.

Idjon djuga dilakukan terhadap djagung, dan buah²an seperti djeruk, rambutan, pisang dsb. Bahkan tenagakerdja seorang buruhtani djuga diidjon. Pada waktu musim patjeklik ketika tidak ada pekerdjaan dan buruhtani berada dalam kesulitan ia diberi upah sebesar Rp. 60,— sehari untuk pekerdjaan jang akan dilakukan nanti pada waktu panen, sedangkan pada waktu panen upah harian adalah Rp. 150,—.

3). Sistim *tempah* jang dilakukan oleh tengkulak². Pemberian tempah atau pandjar bisa berwujud barang atau uang. Tempah ini dilakukan dengan maksud untuk menguasai hasil produksi, baik hasil² pertanian seperti padi, kelapa, gula aren, djagung dan palawidja lainnja, maupun hasil² keradjinantangan seperti samak, tikar, dll. barang anjaman dsb. Misalnja, tengkulak gula aren menempah untuk membeli gula aren dengan harga Rp. 70,— sampai Rp. 80,— sebondjor (1 bondjor = kl. 1¼ kg),

sedangkan harga sebondjor gula aren dipasar Rp. 125,— sampai Rp. 130,—. Tempah itu biasa djuga dilakukan dalam bentuk memberikan bahan² baku jang diperlukan pekerdja keradjinantangan.

4). Ber-matjam² tjara *gadai*. Pada umumnja penggadaian tanah dilakukan setjara gelap, dibawah tangan seperti jang dinamakan „djual akad” atau „djual sandak”. Djuga pohon buah²an dan ternak sering digadai. Misalnja, didesa Sukamadju, Ketjamatan Tjimanggis, pohon buah²an digadai dengan Rp. 500,— dan hasil pohon kemudian diparo. Kalau misalnja hasilnja ternjata Rp. 2.000,—, maka sipemilik pohon menerima Rp. 1.000,—, tapi dengan ini tidak berarti bahwa ia dengan sendirinja terlepas dari ikatan gadai; untuk melepaskan diri sipemilik pohon harus djuga mengembalikan Rp. 500,—. Adakalanja pemilik pohon samasekali tidak memperoleh bagian daripada hasil pohon, semua diambil oleh pemegang gadai. Karena kaum tani sering tidak mampu menebus gadainya pada waktu jang ditentukan, maka tanah atau pohon buah²an mendjadi milik pemegang gadai jang biasanja tuantanah, lintahdarat atau tengkulak.

5). *Peningkatan harga setjara se-wenang⁸* dari barang² keperluan hidup se-hari² jang didjual oleh tengkulak² djahat kepada kaum tani. Misalnja sehelai kain jang berharga Rp. 750,— didjual kepada tani dengan harga Rp. 1.000,— jang harus dibayar 40 hari kemudian pada waktu panen dengan 1 kwintal padi, sedangkan pada musim patjeklik harga padi itu sudah Rp. 8.500,— sekwintal.

Hasil² riset mengenai masalah gadai, idjon, tempah dan lain² tjara penghisapan jang pada hakekatnja merupakan bentuk² hutang menundjukkan suatu variasi jang sangat berbeda mengenai besarnya bunga jang dibayar oleh kaum tani. Bukan hanya terdapat per-bedaan² mengenai besarnya bunga antara desa² dan ketjamatan², tapi bahkan djuga disatu desa. Ini membuktikan betapa kaum tani dihisap setjara sewenang-wenang oleh pemegang gadai, tukang idjon, lintahdarat dan tengkulak. Dan dengan kemerosotan dajabeli kaum tani jang semakin keras, maka setiap kebutuhan termasuk kebutuhan paling minimal, apalagi djika ada hal² jang luarbiasa seperti chitanan, perkawinan, kematian dsb, memaksa kaum tani untuk tergesa² mentjari pindjaman dengan menggadaikan sekedar

miliknja jang masih ada. Semakin terdesak keadaan ekonomi kaum tani, maka semakin se-wenang² kaum penglepas uang.

6). Ber-matjam² bentuk *hutang lainnja*, antara lain dengan borg tanah, sehingga djika hutang tidak dilunasi pada waktunja, tanah itu mendjadi milik dari orang jang memindjamkan.

D). Praktek² idjon, tempah dan hutang² jang tak dapat dilunasi oleh kaum tani mengakibatkan bahwa di-desa² terdapat monopoli atas hasil² produksi sehingga sangat menurunkan harga pendjualan hasil² produksi kaum tani. Pada umumnja pemonopolian itu dilakukan oleh tengkulak² djahat, kaum kapitalis birokrat jang beroperasi atasnama „djuragan” PDN² dan PPN, atau oleh „koperasi” palsu kaum penghisap seperti KPP (Koperasi Pembelian Padi) jang oleh Rakjat lebih dikenal sebagai „Koperasi Perampas Padi” dan KPL (Koperasi Perikanan Laut).

Dengan demikian kaum tani sudah mendjadi sasaran penghisapan mulai dari ketika mereka menanam padi sampai pada panennja dan djuga waktu mereka mau mendjual hasil panennja dan membeli barang² keperluan hidup se-hari² dan barang² untuk berproduksi kembali seperti alat² pertanian, pupuk dsb. Maka sjarat² produksi kaum tani dikuasai betul oleh kaum tuantanah, lintahdarat, tukang-idjon, kapitalis birokrat dan tengkulak.

E). Di-daerah² pantai, kaum nelajan pekerdja mengalami penghisapan jang bersifat feodal dari djuraganperahu atau tuannelajan. Hingga kini belum ada undang² jang mengatur pembagian hasil setjara agak adil bagi kaum nelajan. Peraturan² jang berlaku dalam praktek adalah sangat rumit dan memberi kesempatan manipulasi jang besar bagi tuannelajan. Di Ketjamatan Eretan Wetan misalnja, djika hasil penangkapan ikan dari satu perahu berharga Rp. 10.000,— maka seorang buruhnelajan hanya mendapat Rp. 289,20 jang belum dipotong ongkos untuk makan diperahu. Djadi bagian seorang buruhnelajan itu belum sampai 3% dari hasil seluruhnja.

Sedangkan bagian djuragan atau tuannelajan walaupun resminja berdjumlah kl. 15%, tetapi pada hakekatnja berdjumlah kl. 40% dari seluruh hasil, karena berbagai potongan seperti tjitjilan hutang kepada djuragan (10%, dengan tidak perduli buruhnelajan itu mempunyai hutang

kepada djuragan atau tidak) dan matjam² „tjelengan” serta simpanan wadajib (12%) jang dalam prakteknja masuk kantong djuragan. Potongan² untuk apa jang dinamakan „tjelengan” itu djuga berarti mengikat kaum nelajan kepada djuragannelajan sebab „tjelengan” itu hanya akan dikembalikan (tidak penuh !) pada waktu jang ditentukan oleh djuragan dan djika nelajan berbuat sesuatu jang tak disukai oleh djuragan maka hak atas „tjelengan” itu dinjatakan batal.

Selain daripada itu, kaum nelajan djuga menderita penghisapan tukang-idjon, lintahdarat, kapitalis birokrat dan tengkulak. Pelelangan hasil² penangkapan ikan sepenuhnya dikuasai oleh „koperasi” jang keanggotaannja terbatas pada djuragan². Djuragan² djuga memegang monopoli atas persediaan dan pendjualan garam melalui apa jang dinamakan „Koperasi Garam Rakjat”. KGR ini melakukan berbagai kedjahatan seperti penghisapan kedjam atas kaum buruh upahan, mematikan usaha² garam Rakjat, menentukan harga garam jang sangat tinggi, dsb. Sifat *dasamuka* menondjol sekali dikalangan djuragan jang melakukan berbagai penghisapan dalam bentuk pemilikan perahu² penangkap ikan, pemilikan tanah garapan, penguasaan atas perdagangan ikan dan garam, atas „koperasi”, praktek lintahdarat dsb.

F). Di-daerah² kehutanan dan daerah² perkebunan, dimana kaum tani sudah ber-tahun² menggarap sebagian dari tanah perkebunan dan kehutanan, mereka selalu menghadapi antjaman pengusiran dan pentjabutan tanahgarapannja. Banjak diantara kaum tani sudah menggarap tanah² itu sedjak sebelum Revolusi Agustus 1945, dan selama revolusi mereka mendjamin bahan makanan untuk tentara, laskar dan pengungsi. Dulu perkebunan² itu merupakan perwujudan langsung dari penguasaan imperialis atas ekonomi didesa Indonesia. Setelah sebagian besar dari perusahaan² imperialis itu diambilalih, tangan imperialis telah diganti oleh kaum kapitalis birokrat (kabir). Sebab dengan ambilalih itu hubungan imperialisme dengan perkebunan kita belum putus. Pasaran tradisional dari hasil² perkebunan² itu adalah tetap pasaran jang dikuasai imperialis, dan kaum kapitalis birokrat jang menguasai PDN² dan PPN jang memonopoli hasil² perkebunan itu tetap berorientasi pada pasar imperialis. Maka perdjjuangan melawan kaum kapitalis birokrat adalah

di juga perjuangannya langsung melawan imperialisme. Dalam pada itu perlu kita lebih teliti menetapkan siapa² kapitalis birokrat didesa. Umpamanya, mandor² kehutanan seringkali menyalahgunakan kedudukannya untuk memaksa kaum tani membayar „uang kuntji” sampai Rp. 4.000,— untuk bisa menggarap 1 ha tanah kehutanan dengan tjara tumpangsari. Tindakan ini sudah barang tentu merupakan perbuatan yang merugikan kaum tani. Tetapi tindakan ini saja tidak bisa dianggap tjukup untuk menjatuhkan mandor itu „kapitalis birokrat”. Lain halnya, jika mandor atau pegawai kehutanan lainnya itu menggunakan hasil korupsi untuk memiliki alat² produksi dengan mendirikan suatu perusahaan kapitalis, misalnya perusahaan penggergajian atau perusahaan pertanian yang dikerjakkan setjara kapitalis, maka dengan demikian ia menjadi kapitalis birokrat yang sesungguhnya. Kalau mandor atau pejabat kehutanan lainnya mempersewakan tanah kehutanan setjara besar² kepada kaum tani, maka dalam keadaan demikian itu ia dapat juga disebut tuantanah birokrat.

G). Disamping bentuk² penghisapan yang disebut di atas masih banyak bentuk² penghisapan tambahan lainnya yang sangat ber-matjam². Antara lain dapat disebut pajak hasilbumi (PHB), kerdja rodi atau „hirsan”, pantjen, tugur tundan, nganteran wadjiab kaum tani yang punya hadjat kepada lurah dan sumbangan wadjiab kaum tani kepada lurah jika lurah punya hadjat, pemberian daging yang paling baik („kèredan” atau „lamosir”) kepada lurah jika tani memotong hewan, penyalahgunaan „gotong-rojong” sebagai kerdjapaksa, iuran untuk Hansip, ronda malam, OPR, dan 1001 matjam pungutan atau kerdja-wadjiab lainnya. Istilah „gotongrojong” memang baik jika isinya demokratis, tetapi dalam masyarakat desa yang masih setengah feodal dan otokratis, istilah ini sangat mudah disalahgunakan untuk menutupi penghisapan dan penindasan. Hanya gerakan tani revolusioner yang dapat melawan penyalahgunaan ini.

H). Walaupun diberbagai daerah Djawa Barat yang diriset ada pula penduduk dari golongan keturunan asing (Tionghoa), tetapi dikalangan kaum tani tidak terdapat samasekali perasaan rasialisme. Ketika bulan Mei 1963 terjadi huru-hara rasialis di Djawa Barat, yang ambilbagian adalah pemuda dan mahasiswa kontra-

revolusioner dibantu oleh orang² gelandangan kota, sedangkan kaum tani tidak ikut. Perasaan rasialis hanya hidup dikalangan klas² penghisap dan disebarkan untuk membelokkan perhatian kaum tani dari musuh²nya yang sesungguhnya, yaitu setan² desa. Ternyata pula bahwa pengintegrasian kaum tani keturunan asing sudah lama berdjalan lantjar dimana banyak diantara mereka memegang peranan aktif dalam organisasi BTI didesa-desa, diantaranya juga sebagai pemimpin². Masalah yang dihadapi oleh kaum tani ialah penghisapan dan dalam hal ini kaum tani, termasuk yang dari golongan keturunan Tionghoa seperti didaerah Tangerang, merasakan bahwa penghisapan tuantanah bumiputera tidak kalah kedjamnya, malahan sering lebih kedjam daripada yang dilakukan oleh beberapa gelintir tuantanah atau tengkulak keturunan asing. Kaum penghisap bumiputera mempunyai alat² extra dalam melakukan prakteknya antara lain kebiasaan² feodal, penyalahgunaan agama, hubungan keluarga dll.

Ditjelaskan bahwa pedagang² etjeran keturunan asing dari ketjamatan² ternyata sangat mempengaruhi kelantjaran perdagangan antara kota dan desa, disamping memperkuat kedudukan monopoli lintahdarat² dan tengkulak², yang umumnya juga dirangkap oleh tuantanah² bumiputera. Pengrusakan² kendaraan² bermotor yang dilakukan oleh kaum rasialis pada tahun jl. dan politik yang menghapuskan trajek² pendek keretaapi pasar dan tidak memetjahkan serta mengurus setjara baik onderdil² untuk alat² pengangkutan, lebih² lagi mengatjaukan lalu-lintas barang antara kota dengan desa. Kesulitan angkutan ini menyebabkan pedagang² ketjil tidak bisa sampai kekota, sehingga memberi kesempatan lebih besar kepada tengkulak² dan kapitalis² birokrat untuk memonopoli pasar.

Demikianlah lukisan yang diberikan oleh hasil² riset mengenai bentuk² penghisapan feodal dan kapitalis yang diderita oleh kaum tani dan nelajan. Lukisan ini membantah sepenuhnya otjehan kaum sardjana ekonomi burdjuis terutama soska, yang menjatakan se-akan² di Indonesia penghisapan feodal tidak terlalu djahat karena „tidak terdapat” tuantanah² besar yang memiliki tanah beribu² hektar seperti di India, Amerika Latin, Tionghok lama, dsb. Padahal djustru pemilikan tanah oleh tuantanah yang relatif ketjil itu merupakan salahsatu faktor

sangat intensifnya penghisapan yang dilakukan oleh tuan-tanah.

Lukisan dari hasil² riset menunjukkan bahwa penghisapan atas kaum tani Indonesia adalah sangat hebat dan ber-tingkat². Lukisan itu memperkuat sekali lagi pendirian kaum Komunis Indonesia bahwa revolusi Indonesia adalah per-tama² revolusi kaum tani dan bahwa tanpa pembebasan kaum tani dari penghisapan yang sudah dideritannya ber-abad² itu, tidak mungkin berbitjara tentang kemenangan revolusi tahap pertama, apalagi tahap kedua.

3. TARAF-HIDUP RAKJAT DIDESA DAN KETJENDERUNGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DIDESA

Dari hasil² riset dapat juga diketahui taraf-hidup berbagai klas dan golongan didesa. Suatu gambaran tentang taraf-hidup Rakjat didesa dapat dilihat dari anggaran belanda buruhtani, tanimiskin dan tanikaja didesa Tegal-sari, Ketjamatan Wanaradja, Kabupaten Garut (Lampiran II, halaman 93).

Taraf-hidup kaum buruhtani dan tanimiskin Djawa Barat adalah sangat rendah dan terus merosot. Perumahan, perabot-rumah dan pakaiannya serba kurang dan buruk. Buruhtani dan tanimiskin sering tidak mempunyai pakaian untuk ganti, sehingga dengan menjindir pakaian woleta dari orang² berpunya didesa, mereka mengatakan bahwa yang dipakainya adalah „djolèta”, jaitu „djol deui, èta deui” (tiap² kali tampil, pakaiannya itu-itu juga), atau juga dikatakan pakaian mereka sama seperti „pakaiannya wajang”, artinya siang dan malam itu, di rumah dan bepergian itu, pendeknya tidak pernah berganti. Makanan mereka juga sangat kurang, jika bukan musim panen djarang makan nasi dan jika makan nasi hanya satu kali sehari. Apalagi pada musim patjeklik atau untuk nelajan pada musim Barat (angin kentjang). Menurut istilah nelajan „tjul dajung, adol sarung”, artinya sudah tidak ada pekerjaan, harus mendjual pakaian.

Tanisedang juga makin sulit penghidupannya, walaupun mereka umumnya memiliki tanah dan alat² produksi yang dapat mentjukupi kebutuhan makanan mereka yang pokok. Selama riset didjumpai tanisedang yang, walaupun masih memiliki persediaan makanan, namun hanya makan sekali sehari untuk mendjaga djangan sampai barang mi-

liknya yang masih ada harus didjual atau digadaikan jika persediaan makan telah habis sebelum panen.

Sebaliknya, tuantanah dan tanikaja tetap hidup mewah disegala musim. Golongan² inilah yang tahun² belakangan ini membikin banjak gedung² baru di-desa² dengan perabot² rumah yang mewah dan dengan membawa barang² mewah seperti transistor, pick-up dan piringanhitam² à la „ngak-ngik-ngok” sehingga „kebudayaan” imperialis mulai bikin brisik didesa-desa. Perbandingan antara taraf-hidup buruhtani dan tanimiskin disatu fihak dengan tuantanah dan tanikaja difihak lain mempertadjam kontradiksi² antara klas² yang menghisap dengan klas² yang dihisap di-desa².

Kaum keradjinantangan dan tukang² juga mengalami kemerosotan taraf-hidup, demikian pula guru² sekolah sebagai penerima gadji tetap, karena harga² barang² pokok terus membubung. Gadji seorang guru ada kalanya lebih rendah daripada upah seorang buruh tjangkul, sedangkan guru memerlukan standar hidup yang lebih tinggi.

Kemelaratan dan kemerosotan taraf-hidup yang dialami oleh mayoritas penduduk desa, jaitu buruhtani, tanimiskin dan juga tanisedang serta tukang² keradjinantangan, kaum intelektual dan seniman desa, dll. dengan jelas membuktikan bahwa selama sisa² feodalisme didesa belum dikikis habis, tidak mungkin terdapat pasaran nasional yang kuat dan stabil sebagai syarat mutlak untuk memperkembangkan industri nasional yang modern. Oleh karena itulah betapa omongkosongnya mereka yang berbitjara tentang mengindustrialisasi dan memodernisasi negeri, tetapi bungkam seribu bahasa tentang pengikisan sisa² feodalisme.

Kemerosotan taraf-hidup klas² yang merupakan tenaga produktif pokok didesa mengakibatkan kemerosotan daya produksi pertanian. Disamping kekurangan makanan yang menurunkan dajakerdja buruhtani dan tanimiskin, kemampuan tanimiskin dan tanisedang untuk mengongkosi produksi terus merosot. Hal ini langsung membahayakan proses produksi pertanian itu sendiri.

Kaum tani terpaksa mentjari pekerjaan sambilan, dan dalam musim patjeklik kerdja-sambilan malahan menjadi kerdja-pokok. Urbanisasi, jaitu mengalirnya penduduk desa ke-kota², menjadi masalah besar karena mereka belum tentu mendapat lapangan-kerdja dikota, sehingga

menambah jumlah penduduk yang terlepas dari kerja produktif.

Hasil² riset membuktikan bahwa kemerosotan taraf-hidup merupakan akibat daripada struktur ekonomi Indonesia yang kolonial dan setengah-feodal, dan proses kemerosotan itu semakin dipertajam dengan adanya inflasi hebat yang dialami akhir² ini, terutama setelah terornya ekonomi 26 Mei 1963.

Berbeda dengan pandangan tjéték dan reaksioner yang di-sebar²kan oleh sardjana² ekonomi burdjuis yang djahat, seperti profesor Sadli, yang menganggap bahwa kaum tani tidak dirugikan oleh inflasi, karena mereka tidak termasuk golongan yang berpendapatan tetap, kenjataanja ialah bahwa justru kaum tani, khususja kaum buruhtani dan tanimiskin yang merupakan mayoritas dari penduduk desa, langsung menjadi korban dari peningkatan harga², karena mereka harus membeli sebagian besar dari kebutuhan-kebutuhan pokok mereka dipasar.

Ketidakmampuan kaum tani dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan² mereka yang paling elementer memaksa mereka untuk semakin sering meminjam uang atau mengidjonkan hasil² produksi mereka. Hutang dan idjon yang dalam keadaan tidak ada inflasi sudah merupakan penghisapan yang berat, lebih² bersifat memeras dalam keadaan inflasi dimana pinjaman atau idjon diberikan misalja dalam bentuk uang dan harus dibayar kembali dengan bunga yang tinggi atau dalam bentuk natura sewaktu harga² pasar djauh lebih tinggi.

Inflasi serta kemerosotan taraf-hidup kaum tani mengakibatkan bahwa sistim idjon semakin meradjalela dan tengkulak² djahat semakin keras mentjekik leher kaum produsen melalui tjara² perdagangan yang bersifat monopoli.

Keadaan² tersebut memaksa kaum tanimiskin dan juga sebagian tanisedang untuk menggadaikan tanahnja yang biasanja menyebabkan tanah itu praktis menjadi milik tanikaja atau tuantanah. Dengan demikian, inflasi dan kemerosotan taraf-hidup memperkuat pemusatan kepemilikan tanah ditangan tuantanah dan tanikaja. Malah banjak tanikaja yang dalam proses ini berkembang menjadi tuantanah.

Berhubung dengan faktor² tersebut diatas dan dalam keadaan inflasi serta matjetnja pelaksanaan UUPBH dan

UUPA, maka dapat disimpulkan bahwa penghisapan sisa² feodalisme didesa bukannya berkurang, tapi bahkan lebih diintensifkan.

Unsur² kapitalis juga sudah tumbuh di-mana² di-desa², terutama dikalangan tanikaja dan tuantanah. Tuantanah sering mengkombinasikan penghisapan feodal dengan penghisapan kapitalis melalui kegiatan² sebagai tengkulak. Dalam keadaan inflasi, tuantanah juga berusaha menggantikan sistim bagihasil dengan penggunaan tenaga-upahan, hal mana dilawan keras oleh kaum tanimiskin dan buruhtani karena menyebabkan kemerosotan lebih lanjut dalam pendapatan riil mereka. Ada pula tuantanah² yang memindahkan usahanja kebidang industri atau perdagangan dikota. Usaha² ini antara lain didorong oleh keinginan menghindari UUPBH dan UUPA dan aksi² kaum tani.

Dalam usaha mengatasi kemelaratan dan kemerosotan taraf-hidup, klas² lain didesa juga menunjukkan ketjenderungan untuk bergeser keproduksi atau pertukaran barangdagangan, seperti misalja keradjinantangan, perdagangan ketjil²an dsb. Untuk buruhtani dan tanimiskin yang samasekali tidak mempunyai modal, usaha² mereka dimodali oleh klas² yang ber-uang, terutama melalui tjara tempah, pemberian pinjaman dengan borg tanah dan tjara² penghisapan kapitalis lainja.

Tetapi walaupun unsur² kapitalis ini terus-menerus muntjul setjara spontan, namun dalam keadaan dimana perkembangan tenaga² produktif dirintangi oleh hubungan produksi feodal, hubungan-hubungan kapitalis itu tidak dapat berkembang dengan subur dan luas. Juga tuantanah² yang sudah menanam modalnja disektor industri dan perdagangan dikota umumnja tidak melepaskan sepenuhnya kedudukannja sebagai tuantanah, sehingga mereka mempunyai satu kaki kapitalis dan satu kaki lagi feodal, mereka ter-katung² antara desa dan kota. Berbarengan dengan ketjenderungan kearah kapitalisme dikalangan tanikaja, ada juga ketjenderungan kuat kearah kepemilikan tanah setjara feodal. Bahkan kaum kapitalis birokrat dikota banjak yang membeli tanah dan menjadi tuantanah. Ketjenderungan sematjam ini, jaitu kearah kepemilikan tanah yang diusahakan setjara feodal juga merupakan akibat dari adanya inflasi karena OKB² di-kota² menanam kekajaannja yang ber-limpah² dalam kepemilikan

tanah untuk menjaga nilai riil daripada kekajaan itu. Dengan demikian lahirlah dari dua djurusan, jaitu dari djurusan desa dan kota, *kaum feodal kapitalis birokrat*.

Struktur ekonomi jang kolonial, jaitu perpaduan antara ekonomi imperialis dan ekonomi feodal, merupakan rintangan jang pokok bagi perkembangan unsur² kapitalis di-desa. Penghisapan imperialis tetap meresap ke-desa², karena bekas² perusahaan imperialis (terutama "the Big Five") sekarang pada pokoknja dikuasai oleh kaum kapitalis birokrat jang melanjutkan penghisapan melalui sistim perdagangan export-import dan moneter jang tetap meng-gantungkan ekonomi Indonesia pada pasaran imperialis.

Kontradiksi² tadjam antara hubungan² produksi feodal dan hubungan² produksi kapitalis, serta kematjetan dalam perkembangan kapitalis seperti jang diketemukan didalam riset, membuktikan bahwa satu²nja tjara untuk membe-baskan tenaga² produktif dalam ekonomi Indonesia ialah dengan menggantang semua setan desa dalam rangka mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme, untuk dapat membangun ekonomi nasional jang merdeka sebagai landasan dalam menudju ekonomi sosialis.

Pembitjaraan langsung antara D.N. Aidit dengan petani² jang ambilbagian dalam pekerdjaan riset di Djawa Barat.



III

KEKUASAAN POLITIK SETAN² DESA DAN AKSI² KAUM TANI TERHADAPNJA

Sisa² feodalisme didesa menampakkan diri dibidang politik pada susunan pemerintah desa jang menempatkan kepala desa sebagai penguasa tunggal dan jang pembiajaan-nja sepenuhnya dibebankan kepada penduduk desa. Karena susunan pemerintah desa jang demikian itu, maka tjorak pemerintah desa banjak tergantung pada aliran politik kepala desa dan pada penguasa² diatasnja.

Sedjak zaman kolonial Belanda dan Djepang sampai sekarang, susunan pemerintah desa di Djawa Barat belum mengalami perubahan fundamental, sesuai dengan belum adanya perubahan fundamental daripada klas² jang ber-dominasi didesa. Perubahan ketjil²an, jang tidak funda-mental, telah terdjadi. Misalnja kalau dulu pada zaman kolonial kepala desa hanja dipilih oleh pemilik tanah, se-karang dipilih oleh semua penduduk dewasa pria dan wanita jang berumur 18 tahun keatas; kalau dulu orang jang terang²an revolusioner tidak mungkin mendjadi ke-pala desa atau pamong desa lainnja, sekarang sudah mungkin; kalau dulu kaum wanita dilarang menduduki djabatn pamong desa, belum lama berselang sudah di-perbolehkan, berkat perdjuaan revolusioner untuk emansipasi wanita.

Susunan pemerintah desa di Djawa Barat biasanja ada-lah sebagai berikut : lurah desa atau kuwu, wakil lurah atau ngabihi, djurutulis terdiri dari seorang atau dua orang, raksabumi atau ulu², kepala kampung (atau *wakil* atau *lugu blok*) jang banjaknja menurut djumlah kampung, polisi² desa dan lebe (lebai).

Djumlah pegawai desa tergantung pada luasnja dan banjaknja penduduk. Misalnja didesa Pilangsari, Ketja-matan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaja, djumlah pegawai desa 19 orang, terdiri dari : seorang lurah, dua orang djurutulis, 10 orang kepala kampung, 1 orang lebe, 5 orang polisi desa.

Pegawai² desa menerima penghasilan dari sumber² sbb. :

(a) di Kabupaten² Tjirebon, Kuningan, Madjalengka, Krawang, Subang, beberapa tempat di Priangan Timur, dari bengkok (kelungguhan) kira² 5 s/d 30 ha untuk lurah, 2,5 s/d 7 ha untuk wakil lurah dan djurutulis, 1 s/d 2 ha untuk pegawai desa lainnja. Ada daerah² dimana disamping bengkok masih dapat tambahan dari sistim pologoro seperti pantjen, ngahiras dan pungutan² lainnja seperti : kolekteloon, uang surat keterangan, uang saksi 10% dari djual-beli, uang surat nikah, talak dan rudjuk (NTR), bagian dari daging hewan jang dipotong penduduk (biasanja jang paling enak), dan sebagainya;

(b) Dibanjak Kabupaten lainnja tidak mendapat bengkok. Pegawai² desa menerima penghasilan dari pologoro dan pungutan² lainnja seperti tersebut dalam (a).

Didesa Haurkonèng, Ketjamatan Tjimalaka, Kabupaten Sumedang, misalnja, berlaku pantjen, jang perintjiannja sebagai berikut :

1) untuk lurah	2.000 Kg. padi
2) untuk djurutulis	1.200 " "
3) kokolot 3 orang	2.100 " "
4) ulu-ulu	700 " "
5) polisi desa	700 " "
6) lebe	350 " "

7.050 Kg. padi.

Sumber² penghasilan ini jang sesungguhnya didapat lewat penghisapan jang bersifat feodal menjebakkan *pe-djabat² pemerintah desa mempunyai kepentingan ekonomi jang sama dengan tuantanah*. Dengan demikian, dalam bidang politikpun mereka seringkali langsung membela kepentingan politik tuantanah djahat dan setan² desa lainnja. Hanja dengan gerakan tani jang kuat dapat dilaksanakan pendemokrasian pemerintah desa, jang per-tama² harus berarti hapusnja penghisapan jang bersifat feodal oleh pedjabat² pemerintah desa. Disinilah pentingnja segera dilaksanakan otonomi tingkat tiga.

Sedjak pertengahan 1963 di-desa² Djabar dibentuk Hansip (Pertahanan sipil) jang susunannja biasanja adalah sebagai berikut : Ditiap RT ada 1 regu pasukan Hansip

terdiri dari 5-10 orang, dipimpin oleh komandan regu; komandan Hansip desa adalah seorang polisi desa; pasukan Hansip terdiri dari pemuda² desa termasuk bekas OPR; dan pelatih Hansip adalah Pembina (Bintara Pembina Wilayah, dari Angkatan Darat). Tugas Hansip resmi-nja mengenai bidang keamanan, tetapi dalam praktek apabila tidak ada kekuatan progresif didalamnya Hansip dipergunakan untuk mengawasi dan menindas gerakan kaum tani.

Misalnja susunan Hansip didesa Tegalsari, Ketjamatan Wanaradja (Garut) adalah sebagai berikut: penasehat adalah lurah; komandan adalah polisi desa; wakil komandan dari pemuda; indoprop dari Front Nasional; dan pasukan sebanyak 24 orang terdiri dari bekas² OPR.

Perjuangan revolusioner kaum tani dalam melawan sisa² feodalisme dan melawan gerombolan DI-TII di Dja-bar telah mentjapai hasil² tertentu, djuga dalam menimbulkan perubahan² demokratis disebagian desa, misalnja, djatuhnja kepala desa jang reaksioner dan diganti dengan kepala desa jang madju atau agak madju.

Adanja kepala desa atau pegawai desa lainnja jang masuk kedalam barisan revolusioner menimbulkan perubahan² pada pemerintah desa jang bersangkutan, jang menguntungkan kaum tani.

Berdasarkan aliran politik kepala desa dan pegawai² desa lainnja serta hakekat kekuasaan politik didalam-negeri kita, pemerintah desa dewasa ini dapat dibagi :

a) pemerintah desa jang reaksioner, jang sepenuhnya mendjadi alat kaum tuantanah, lintahdarat, kapitalis birokrat dan setan² desa lainnja.

b) pemerintah desa jang mempunyai dua segi, jaitu segi pro-Rakjat dan segi anti-Rakjat. Termasuk dalam kategori ini ialah pemerintah desa jang kepala desanja progresif. Betapapun kuatnja segi pro-Rakjat sesuatu pemerintah desa, tak mungkin dikatakan sebagai „pemerintahan Rakjat” karena masih dibatasi oleh kekuasaan di atasnja (Ketjamatan, Kabupaten, dst). Pemerintah desa djuga dengan pendirinja setjara mutlak dibatasi oleh kekuasaan politik negara Republik Indonesia jang mengan-dung dua segi.

Walaupun sistim pemerintahan desa sekarang ini adalah sistim setengah-feodal, dan dari sistim ini kepala desa di-tempatkan sebagai penguasa feodal tunggal didesa, tetapi

tidak semua kepala desa mewakili kepentingan kaum tuantanah. Ada yang kedudukan klasnja tuantanah (sudah sedjak sebelum mendjadi kepala desa atau sesudah mendjadi kepala desa), ada yang kedudukan klasnja tanikaja, dan ada yang tanisedang, sedangkan aliran politiknya ada yang kanan, tengah dan kiri.

Sikap kaum tani terhadap pemerintah desa ber-beda², terutama ditentukan oleh sikap politik kepala desa yang bersangkutan. Kaum tani sangat tadjam mengikuti perbuatan² pamong² didesanja, mereka tahu presis siapa yang djahat, yang agak baik dan yang baik.

Karena dalam kenyataan tidak semua kepala dan pegawai desa lainnja mewakili kepentingan kaum penghisap dan aliran politik reaksioner, maka adalah perlu dan mungkin untuk mendorong maju sebagian dari pamong² desa, agar sedapat mungkin membantu perdjuaan kaum tani untuk melawan tuantanah djahat, lintahdarat, kapitalis birokrat dan musuh² kaum tani lainnja. Sedangkan sebagian lagi dari pamong desa harus diritul.

Pamongdesa yang baik dapat djuga mendukung dan menjokong tuntutan kaum tani untuk mendemokrasikan pemerintah desa, dan bersamaan dengan itu kaum tanipun bersedia menjokong tuntutan² tundjangan kepada pemerintah oleh pamongdesa yang tidak mendapat bengkok atau yang bengkoknja tidak mentjukupi untuk hidup.

Kepala desa yang reaksioner tidak sadja mendjadikan kekuasaan politik didesa sebagai alat untuk membantu tuantanah, lintahdarat, kaum kapitalis birokrat dan kaum penghisap dan penindas lainnja, tetapi melalui kekuasaannya djuga melakukan penindasan langsung kepada kaum tani untuk memperkaja diri. Oleh karena itu kaum tani sangat berkepentingan terhadap adanya pemerintah desa yang Manipolis, yang dalam batas² tertentu dapat membantu kaum tani melawan musuh² mereka.

Tetapi tidak mudah untuk mendjatuhkan kaum reaksioner dari kekuasaannya dalam pemerintahan desa, karena kedudukan ini akan dipertahankan mati²an oleh setan² desa yang banyak djumlahnja. Setan² desa akan memobilisasi kekuasaan dan kekuatannya untuk mempengaruhi penguasa atasan guna mempertahankan kedudukan kepala desa yang reaksioner anti-Rakjat dan anti-Manipol. Oleh karena itu aksi² kaum tani untuk meritul lurah djahat harus memperhitungkan: (a) kebulatan tekad

massa Rakjat; (b) kebulatan fikiran dan tekad pimpinan; dan (c) sikap penguasa atasan. Sudah semestinja terhadap aksi² yang demikian itu organisasi atasan memberikan pimpinan yang se-baik²nja.

Menurut pengalaman di Djawa Barat, perdjuaan meritul lurah² djahat dapat berhasil apabila terlebih dulu lurah reaksioner itu didjatuhkan setjara politik, misalnja ditelandjangi perbuatan²nja yang anti-Manipol, yang men-sabot UUPBH dan UUPA, yang menipu Rakjat, yang korup dsb.

Diberbagai tempat sudah terdjadi bahwa kaum tani yang sudah mengetahui ketjurangan² kepala desa reaksioner, dalam rapat desa menuntut supaya kepala desa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Djika kaum tani sudah bersatupadu dan gigih dalam melakukan perdjuaan dalam rapat desa itu, maka kepala desa reaksioner akan terpaksa memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan Rakjat, dan dengan demikian ketjurangan terbongkar dihadapan kaum tani. Kemudian rapat menuntut lurah itu diberhentikan dan tjamat diminta memenuhi tuntutan rapat yang adil itu. Peristiwa demikian misalnja terdjadi disalahsatu desa, di Ketjamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, dan ditempat² lain lagi.

Apabila penguasa atasan tidak memberhentikan lurah yang sudah dituntut oleh Rakjat supaya berhenti, maka Rakjat yang sudah bersatupadu memboikotnja sampai tuntutannja dipenuhi. Dalam keadaan tidak ada rapat desa, kaum tani mengajukan tuntutan untuk memberhentikan lurah djahat melalui organisasi mereka misalnja BTI, Front Nasional dll. Aksi² demikian ada yang sudah berhasil, misalnja disalahsatu desa di Ketjamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dimana lurah berdasarkan tuntutan Rakjat terpaksa „menjerahkan mandatnja” kepada tjamat karena terbukti telah melakukan ketjurangan². Sclain memperhatikan sjarat seperti tersebut diatas, pimpinan harus mendjaga agar djangan sampai aksi berlarut-larut tanpa batas. Perlu ditekankan menurut pengalaman² kaum tani di Djawa Barat, bahwa yang harus diritul setjara demikian hanya lurah² yang kedjahatannya sudah terbongkar dihadapan Rakjat. Lurah² yang tidak terlalu djahat tjukup dituntut supaya berdjandji dihadapan Rakjat untuk memperbaiki diri.

Oleh karena pada hakekatnya yang berkuasa di-desa² yang pemerintah desanya dikuasai oleh orang² reaksioner itu adalah setan² desa, maka dalam hubungan menjatuhkan kekuasaan politik reaksioner didesa penting sekali menjatuhkan tuantanah djahat setjara politik, dengan djalan : (a) menelandjangi tuantanah djahat sebagai pen-sabot pelaksanaan UUPA dan UUPBH; (b) menelandjangi perbuatan² lainnja yang korup dan menipu Rakjat; (c) menelandjangi perbuatan²nja yang melanggar moral (biasanja banjak sekali); (d) menelandjangi kegiatan tuantanah djahat yang masih meneruskan politik Masjumi-PSI yang sudah dilarang serta hubungannya dengan gerombolan DI-TII diwaktu yang lalu atau dengan gerakan rasialis kontra-revolusioner.

Keberanian kaum tani melawan tuantanah djahat itu sadja sudah mengubah pandangan umum terhadap tuantanah. Tiap kemenangan dari perjuangan kaum tani terhadap tuantanah akan lebih memerosotkan „martabat” tuantanah dan ber-angsur² akan memisahkan penguasa² politik didesa yang tidak reaksioner dari pengaruh tuantanah djahat.

Kaum reaksioner berusaha mentjegah terpilihnja orang² progresif sebagai kepala desa dengan menjatuhkan tjalon² progresif didalam udjian² tjalon yang diselenggarakan oleh sebuah komisi yang terdiri dari pedjabat² yang anti-Rakjat (yang diketuai oleh tjamat atau wedana diwaktu masih ada djabatan ini), jaitu dengan mengadakan pertanyaan² yang bukan².

Berhubung dengan itu, untuk mendapatkan pemerintah desa yang agak demokratis, perlu pula diperjuangkan perubahan² peraturan pemilihan kepala desa, supaya didalamnja memuat ketentuan² tentang susunan komisi udjian tjalon dan komisi pemilihan yang berporoskan Nasakom. Perlu dituntut supaya udjian diadakan mengenai pemerintahan desa yang demokratis serta „9 Wedjangan” Presiden Sukarno, djadi tidak ngelantur mengenai soal² yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan desa dan Manipol, dan yang sengadja diadakan untuk menjatuhkan tjalon² yang progresif.

Diadjukannya tuntutan perubahan² demikian itu tidak berarti melepaskan tuntutan prinsipiil untuk mengubah susunan pemerintah desa dengan mentjabut samasekali peraturan kolonial IGO dan membentuk daerah otonomi

tingkat tiga yang demokratis. Tuntutan² tersebut diadjudkan sepanjang IGO belum ditjabut seluruhnja. Perjuangan untuk pentjabutan IGO perlu dilakukan baik melalui tuntutan² organisasi² massa maupun melalui pemerintah² daerah tingkat II dan tingkat I, melalui badan² legislatif dan eksekutif. Dalam pada itu perlu didorong agar supaya para bupati dan walikota melarang bekas² anggota Masjumi, PSI, GPII dan bekas² anggota gerombolan DI-TII serta „PRRI-Permesta” ikut dalam pentjalonan pemilihan kepala desa.

Demi kepentingan mayoritas penduduk desa yang terdiri dari buruhtani, tanimiskin dan tanisedang, kaum Komunis harus dengan gigih memperjuangkan supaya Manipolis² sedjati yang menjjadi kepala desa, agar pemerintah desa yang hidup atas biaya kaum tani itu tidak lagi menjjadi alat penindas kaum tani seperti sudah berlangsung ber-abad² hingga sekarang.

Pengalaman dan bahan² yang dikumpulkan selama riset di Djawa Barat membuktikan, bahwa dalam menghadapi pemilihan kepala desa adalah penting sekali kebulatan dalam Partai, dalam ormas² revolusioner dan kebulatan diantara kaum Manipolis dalam menetapkan tjalon yang akan diadjudkan. Tidak adanya kebulatan dalam menetapkan tjalon dapat menimbulkan kerugian bagi kaum tani dan Rakjat pekerdja lainnja didesa, misalnja dengan akibat dikalahkannya tjalon Manipolis karena massa pemilihnya ter-petjah².

Berbeda dengan pemilihan umum untuk Dewan² Perwakilan Rakjat dimana para pemilih tidak langsung memilih seorang tjalon, dalam pemilihan kepala desa para pemilih langsung memilih tjalon. Karena itu pribadi tjalon yang diadjudkan sangat menentukan dapat atau tidaknja memobilisasi se-banjak²nja pemilih. PKI menuntut kepada setiap tjalon Manipolis, Komunis atau bukan-Komunis, untuk mengikat djandji kepada kaum tani yang akan memilihnja, tentang tindakan² apa yang akan dilakukannya apabila terpilih, sebagaimana seharusnya seorang kepala desa yang baik.

Berdasarkan pengalamannya sendiri kaum tani dapat membedakan kepala desa yang baik dari yang djahat. Kepala² desa yang baik ialah mereka yang : 1) mengembangkan demokrasi didesa, melakukan musjawarah² setjara periodik dengan organisasi² Rakjat untuk membitja-

rakan persoalan² penting desa; 2) mengurangi beban pologoro, misalnja mengurangi atau membebaskan tanisedang kebawah dari kewadajiban pantjen, pungutan paksa dan gelap, dan sebaliknja menambah beban tuantanah dan tanikaja; 3) melaksanakan UUPBH dan UUPA dengan mengutamakan kepentingan kaum tani; 4) menggunakan kekuasaan untuk mengabdikan kepada Rakjat; 5) memperhatikan kesulitan² hidup penduduk, dan melakukan usaha² untuk mengatasinja; 6) menghidupkan Front Nasional yang berporoskan Nasakom; 7) mendjaga supaya koperasi² Rakjat berdjalan baik dan membantu kaum tani untuk meningkatkan produksi; dan 8) mengadakan usaha² untuk mempertinggi tingkat kebudayaan kaum tani.

Kepala² desa yang djabat jalah mereka yang: 1) mengekang demokrasi, tidak suka bermusjawarah dengan organisasi² Rakjat untuk memetjahkan soal² penting desa; 2) selalu berusaha mengintensifkan ber-matjam² pologoro seperti pantjen dan pungutan² lainnja yang bersifat paksa dan gelap; 3) tidak melaksanakan UUPBH dan UUPA, dan membantu tuantanah dalam menghadapi aksi² kaum tani; 4) menggunakan kekuasaan untuk mengintensifkan penghisapan feodal, melakukan penipuan² dan korupsi, seperti makan uang kas desa, uang PHB (Padjak Hasil Bumi) dsb; 5) tidak memperhatikan kesulitan² hidup Rakjat; 6) membiarkan matjetnja Front Nasional dan menentang prinsip Nasakom; 7) merusak nama koperasi guna keuntungan diri sendiri; 8) membiarkan dirusaknja kebudayaan Rakjat oleh tuantanah dan kapitalis birokrat.

Kaum kapitalis birokrat yang tumbuh pesat selama berlakunja SOB, berusaha keras untuk mempertahankan kedudukannja sesudah SOB ditjabat dengan menguasai desa², dengan membentuk apa yang dinamakan „Pembina“, yang dalam prakteknja adalah kekuasaan militer atas pemerintah desa. Ini adalah usaha untuk „men-SOB-kan“ tertib sivil.

Dibanjak desa terbukti, bahwa makin banjak tenaga „keamanan“, makin tidak aman djadinja desa itu, karena tenaga² „keamanan“ ternjata melindungi berbagai tindakan djahat. Praktek² „Pembina“ dibanjak desa yang menakut-nakuti kaum tani agar tidak melawan tuantanah, ikut mengintensifkan pungutan² paksa dan gelap terhadap kaum tani, mengingatkan kaum tani pada kedjahatan² Keibodan ketika pendudukan Djepang. Praktek² ini meng-

akibatkan renggangnja hubungan Rakjat dengan Angkatan Perang. Adanja „Pembina“ yang mengontrol pemerintah desa di Djawa Barat bukan hanja tidak mempunyai dasar hukum tetapi djuga tidak diperlukan menurut perundang-undangan yang mengatur susunan pemerintah daerah sekarang ini. Lebih² sesudah berlakunja penjerahan wewenang Pemerintah Umum kepada daerah. Djika pengawasan yang diperlukan, maka pemerintah desa *tijkup diawasi dari atas, jaitu oleh pemerintah ketjamatan dan kabupaten, dan dari bawah, jaitu oleh Rakjat yang membelandjai pemerintah desa yang mempunyai hak memilih dan hak memberhentikan kepala desa apabila terdjadi penjelewengan.*

Oleh karena itu „Pembina“ yang oleh kaum tani di Djawa Barat sudah dinamakan „pembinasas“ harus dibubarkan. Perdjuangan untuk membubarkan „Pembina“ dapat dilakukan melalui djalan: a) tuntutan² setjara massal dari ormas², terutama ormas tani. Aksi ini harus dilakukan ber-sama² organisasi pamongdesa dan polisi yang umumnja tidak suka dengan tertib sivil yang di-SOB-kan; b) tuntutan² melalui DPRD Tingkat II dan tingkat I, dan dalam forum „Pantja Tunggal“; c) mengingat sangkut-paut soalnja dengan politik reaksioner tingkat nasional, perlu pula dilakukan kegiatan ditingkat pusat, misalnja di DPRGR, DPA dsb.

Rakjat Indonesia diluar Djawa Barat harus memberikan perhatian pada SOB gaja baru model „Pembina“ ini, karena djika eksperimen Djawa Barat ini berhasil para konseptornja bermaksud mem-Pembina-kan semua desa Indonesia, dan ini benar² merupakan bentjana bagi kaum tani dan demokrasi Indonesia.

IV

PERDJUANGAN KAUM TANI TERHADAP SETAN² DESA DIBIDANG EKONOMI

Walaupun kekuasaan politik didesa banjak masih di-tangan penguasa² djahat, tetapi pengalaman gerakan tani revolusioner menundjukkan bahwa kekuatan kaum tani yang sudah bangkit, terorganisasi dan terpimpin mampu memberikan pukulan yang tjukup berat kepada setan² desa baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi.

Hasil² riset yang telah menjediakan bahan² yang banjak mengenai keadaan ekonomi didesa memperlihatkan bahwa di-desa² Djawa Barat terdapat objek aksi yang berlimpah². Semangat kaum tani adalah baik sekali dan kini terdapat kebangkitan daripada keberanian kaum tani yang menandjak berkat garis dan pimpinan tepat dalam meng-gangjang setan² desa. Disemua Kabupaten di Djawa Barat kaum tani sudah melakukan aksi² yang pada pokoknja berporos pada Gerakan 6 Baik (1 turun sewatanah; 2 turun bunga pindjaman; 3 naik upah buruhtani; 4 naik produksi pertanian; 5 naik tingkat kebudayaan kaum tani; 6 naik tingkat kesedaran politik kaum tani).

Aksi² pelaksanaan UUPA setjara sefihak (tidak setor kepada tuantanah djahat yang membangkang terhadap UUPA) mulai berkembang dan ada sjarat²nja untuk di-luaskan dalam musim panen tahun 1964. Disamping itu aksi² menggugat dan membongkar ketjurangan pelaksanaan UUPA telah berlangsung, dan ini menundjukkan bahwa aksi² kaum tani telah meningkat dari menuntut pelaksanaan kitingkat ofensif membongkar ketjurangan² pelaksanaan seperti antara lain terdjadi di Kabupaten² Bandung, Tasikmalaja, Tjiamis, Garut, Krawang dll.

Djuga aksi pelaksanaan UUPBH setjara sefihak mulai meluas. Dalam musim panen tahun ini aksi² sefihak pelaksanaan UUPBH dengan pengertian minimum 6 bagian untuk penggarap dan sisanja dibagi dua, masing² untuk pemerintah dan tuantanah, dapat lebih diluaskan.

Walaupun kedua undang², jaitu UUPA dan UUPBH tidak bermaksud menghapuskan sistim pemilikan dan

penghisapan feodal didesa, tapi pelaksanaan kedua undang-undang itu setjara konsekwen dengan menguntungkan kaum tani, dapat memberikan pukulan² dibidang ekonomi kepada kaum tuantanah dan menghasilkan keuntungan ekonomi tertentu bagi kaum tani. Pembagian tanah-lebih kepada kaum tani penggarap dapat untuk sebagian memenuhi kebutuhan tani akan tanah, sedangkan pembagian hasil yang agak adil akan meringankan penghisapan lewat sewatanah dan dengan demikian dajapro-duksi kaum tani djuga dapat meningkat.

Tetapi pelaksanaan yang sampai sekarang sangat terbatas daripada suatu landreform yang djuga sifatnja amat terbatas (berdasarkan UUPA yang tidak menghapuskan sisa² feodal tapi hanya membatasinja), pun akan segera kehilangan segala efeknja yang agak baik selama kaum tani masih tetap mendjadi mangsa lintahdarat, tukang-idjon dan setan² desa lainnja, karena tanah garapan yang baru diperoleh para penggarap akan segera djatuh ketangan tuantanah, tanikaja, kaum penglepas uang dsb. melalui satu atau lain bentuk yang tidak terang²an.

Pada dewasa ini berhubung dengan kesulitan² pangan, antara lain karena lamanja musim kemarau yang membikin keadaan kurang-pangan lebih parah lagi, telah meluas aksi² pindjam atau aksi² boboko, jaitu aksi² menuntut pindjaman padi, beras atau bahan makanan lain dari tuantanah dan tanikaja yang persediaannya ber-lebih²an. Aksi² ini yang bersemangat menuntut hak dan bukan mengemis, mempunyai daya mobilisasi yang besar dan telah timbul di banjak tempat, seperti Rengasdengklok (Krawang), Subang, Bandung dll. Djika sasaran aksi tepat, jaitu tuantanah dan tanikaja yang persediaannya ber-lebih²an sebagai hasil penghisapan yang ber-lebih²an, maka aksi ini mendapatkan dukungan dari lapisan² masjarakat yang luas dan menggagalkan tipumuslihat kaum reaksioner yang memfitnah gerakan tani. Sesungguhnya, yang dituntut adalah tidak lain daripada hak kaum tani dan yang dipindjam itu hanya merupakan sebagian ketjil sekali dari hasil kerdja kaum tani yang dirampas oleh tuantanah dengan djalani maro, idjon, renten dsb.

Tanahgarapan kaum tani di-daerah² kehutanan dan perkebunan perlu dibela terhadap usaha² kaum kapitalis birokrat dan penguasa² djahat untuk mengusir kaum tani dan mentjabut tanahgarapannya. Disamping itu perlu di-

sedari bahwa aksi² kaum tani membela tanahgarapannya ditanah kehutanan dan perkebunan perlu diimbangi dengan aksi² melawan tuantanah. Sebab pada umumnya kontradiksi pokok didesa adalah antara kaum tani dengan tuantanah dan bukan dengan Djawatan Kehutanan atau Perusahaan² Perkebunan Negara. Musuh pokok kaum tani didesa bukanlah perkebunan atau kehutanan tetapi tuantanah.

Perjuangan untuk menurunkan bunga pindjaman uang-panas juga mempunyai arti ekonomi yang penting. Bunga yang sangat berat dari lintahdarat atau pinglepas uang-panas itu, ditambah lagi oleh sistim idjon, telah dengan hebat memeras kaum tani dan telah lebih memerosotkan penghasilan kaum tani. Pengalaman berbagai desa menunjukkan bahwa para pinglepas uang-panas dapat dipaksa menurunkan bunganya dengan aksi² turun-bunga dari kaum tani. Disamping itu, aksi² ini harus disertai dengan usaha² salingbantu dan koperasi² kredit (simpan-pindjam) untuk memenuhi keperluan kaum tani akan uang-tunai.

Banyak lagi soal² yang merupakan objek aksi kaum tani. Penelitian ilmiah tentang soal agraria dan keadaan kaum tani dapat memberikan bantuan besar dalam membongkar keadaan yang sesungguhnya didesa. Penelitian ilmiah demikian itu hanya berguna jika ditunjukkan untuk mengabdikan pada aksi revolusioner kaum tani, untuk membikin aksi berpadu dengan ilmu sehingga menemukan sasarannya yang lebih tepat lagi. Dengan demikian aksi² akan tjepat meningkat dan kreatif, tidak se-mata² bersifat empiris, bersifat mengulangi pengalaman² yang sudah tanpa peningkatan setjara kwalitatif.

Perjuangan kaum tani dan nelajan melawan setan² desa dibidang ekonomi adalah alat dan djalan yang penting bagi kaum tani dan nelajan untuk dapat melihat musuh²nja dan memahami bahwa „segala yang djelek bagi kaum tani” berasal dari setan² desa itu.

Dengan bertekad „segala yang baik untuk kaum tani” kaum Komunis Indonesia akan dapat memperhebat pengintegrasiannya dengan kaum tani dan ber-sama² kaum tani mengembangkan ofensif mengganjang setan² desa. Hanya dengan kaum Komunis yang tekun membela kepentingan se-hari² kaum tani, yang nampaknya ketjil dan remeh, pengintegrasian PKI dengan kaum tani dapat diperhebat.

V

TARAF PENGORGANISASIAN DAN AKSI² KAUM TANI DAN NELAJAN MEN- GANJANG „7 SETAN DESA”

1. TENTANG PENTINGNJA KLASIFIKASI DESA

Kaum tani di Djawa Barat yang merupakan mayoritas penduduk sedjak lama sudah terorganisasi. Djumlah penduduk Djawa Barat kira² 18.739.000 jiwa dan 70% daripadanya atau 13.117.300 adalah kaum tani. Djumlah tani dewasa diperkirakan 6.558.650 orang. Dari djumlah ini sudah terorganisasi sebanyak 1.810.750 kaum tani, yang tergabung dalam organisasi massa tani seperti BTI, Petani, Pertanu, Getasi, Perta, dll. BTI sebagai organisasi massa revolusioner tani menghimpun 1.250.750 kaum tani atau kira² 19% dari djumlah kaum tani dewasa. Dengan demikian bagian terbesar daripada kaum tani di Djawa Barat yang telah terorganisasi tergabung dalam BTI.

Didaerah Djawa Barat terdapat 23 Kabupaten dan Kotapradja, 347 ketjamatan, dan 3.756 desa pertanian. Ranting² BTI telah tersebar di 2.675 desa pertanian atau kira² 70% dari desa pertanian seluruhnya. Di 321 ketjamatan dari 347 ketjamatan pertanian yang ada di Djawa Barat telah didirikan Anak Tjabang atau kira² 90%, sedangkan Tjabang² BTI sudah didirikan disemua Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kotapradja).

Sampai sekarang di Djawa Barat masih ada 1081 desa dimana BTI belum ada samasekali. Desa² selebihnja umumnya menduduki klas IV, sebagian menempati kedudukan klas III dan II dan sebagian ketjil desa menempati kedudukan klas I. Dilihat dari segi pengorganisasian kaum tani, provinsi Djawa Barat termasuk klas IV, karena belum sampai 25% dari kaum tani dewasa terorganisasi dalam BTI.

Di-desa² dimana belum ada BTI, pimpinan revolusioner terhadap kaum tani tetap terdjamin jika di-desa²

itu sudah ada PKI. Dibanjak desa dimana BTI belum ada, PKI dan Pemuda Rakjat atau ormasrev lainnja sudah ada.

Adanja BTI sebagai organisasi tani revolusioner dan adanja PKI di-desa² adalah sangat penting untuk mendjamin tergalangnja front persatuan tani anti-feodal di-desa serta mendjamin perkembangan perjuangn kaum tani melawan tuantanah² dan setan² desa lainnja.

Kaum nelajan jang diseluruh Djawa Barat tidak ketjil djumlahnja, pada umumnja pengorganisasiannja belum baik. Mereka djuga mendjadi korban penghisapan jang berat dari setan² desa jang meradjalela di-pantai².

Penetapan klasifikasi desa mempunjai artipenting sekali untuk bisa setjara kongkrit menentukan sasaran perluasan anggota dan organisasi PKI dan BTI. Ia djuga dapat mendorong adanja kompetisi sosialis dalam mengembangkan organisasi dan keanggotaan antar desa, ketjamatan, kabupaten dan antar provinsi, dan dengan demikian merupakan dorongan jang kuat bagi suksesnja Plan 4 Tahun Partai dan Plan BTI. Untuk seluruh Djawa Barat tugas PKI dan BTI sekarang adalah meningkatkan taraf pengorganisasian kaum tani agar meningkat dari klas IV mendjadi klas III.

2. TENTANG KADER TANI DAN NELAJAN

Setelah djelas tugas² organisasi jang harus dilaksanakan oleh PKI dan BTI di-desa², maka jang sangat menentukan pelaksanaannja adalah masalah kader, jaitu masalah memilih kader, penempatan, pendidikan, promosi dan mutasi serta masalah penghidupan mereka se-hari².

Pengalaman membuktikan bahwa aksi² kaum tani jang 1001 matjam ragamnja dan berporoskan pada Gerakan 6 Baik harus dipimpin oleh kader² tani dan nelajan dengan semangat 5 lebih : *lebih berani, lebih pandai, lebih waspada, lebih gigih, lebih tekun*. Apalagi di-tempat² dimana terdjadi aksi² buruhtani dan tanimiskin jang sangat sengit, disitu lebih² diperlukan pimpinan dengan sjarat² tersebut.

Pada umumnja kader² Partai jang bekerdja dikalangan kaum tani dan nelajan di Djawa Barat memenuhi sjarat² sebagai kader gerakan tani dan nelajan revolusioner. Dengan semangat Komunis jang tinggi mereka memimpin aksi² dan organisasi kaum tani di-desa² sehingga sekarang BTI merupakan organisasi massa jang terbesar di

Djawa Barat. Meskipun demikian, dikalangan kader tani dan nelajan masih terdapat kekurangan² jang harus diatasi dengan segera.

Laporan petugas² riset menundjukkan bahwa masih tjukup banjak komposisi badan² pimpinan Partai dan BTI tingkat ketjamatan atau desa jang sebagian masih berada ditangan kader² jang kedudukan sosialnja tanikaja. Hal ini tidak sesuai dengan komposisi keanggotaan BTI jang umumnja terdiri dari buruhtani dan tanimiskin serta sebagian ketjil tanisedang. Tanikaja dan apalagi tuantanah tidak diterima mendjadi anggota BTI. Komposisi pimpinan BTI jang tidak tepat membikin aksi² kaum tani dalam Gerakan 6 Baik, chususnja dalam melaksanakan UUPBH dan UUPA, mendjadi matjet diberbagai tempat.

Sebab pokok mengapa ada tanikaja menempati kedudukan dalam pimpinan PKI dan BTI antara lain sbb. : Mula² mereka mendjadi anggota Partai dan BTI karena mentjari perlindungan menghadapi pasangnja gerakan tani revolusioner. Akan tetapi karena tingkat kebudayaan mereka lebih madju dibandingkan dengan buruhtani dan tanimiskin maka mereka dalam waktu singkat dapat menempati kedudukan dalam pimpinan PKI dan BTI dan untuk sementara mendapat kepertjajaan kaum tani. Ketjuali itu djuga terdapat kader² jang dilahirkan dalam kantjah Revolusi Agustus '45 atau bahkan sebelumnya, jang memang sebelum ada Program Agraria Kongres Nasional ke-V Partai termasuk kader jang tjukup baik, dan umumnja mendjalankan politik Partai dengan semangat anti-imperialis jang tinggi, serta ambilbagian aktif dalam menumpas gerombolan DI-TII. Tetapi mereka bukan kader untuk revolusi agraria, dan karena itu mereka harus tjepat² diberi tugas lain.

Dalam mengachiri kegandjilan tersebut diatas, maka kita harus dengan teguh memegang garis klas Partai mengenai Comite² Partai dan pimpinan BTI, tetapi harus luwes dalam pelaksanaannja. Untuk ini anggota² Partai dan pemimpin² BTI jang berasal dari tanikaja, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan diri dengan gerakan revolusioner kaum tani, harus didorong supaya mau dimutasi kelapangan olahraga, kebudayaan atau lapangan² lain jang tidak langsung berhubungan dengan soal agraria.

Pimpinan BTI dan Partai kemudian harus berada ditangan kader² jang berasal dari atau jang sudah terudji

sepenuhnya dalam mengintegrasikan diri dengan kepentingan buruhtani dan tanimiskin yang bertekad bulat untuk melaksanakan Gerakan 6 Baik, khususnya dalam pelaksanaan UUPBH dan UUPA.

Untuk dapat tepat pada waktunya melaksanakan promosi dan mutasi tersebut diatas, perlu diintensifkan pendidikan Marxisme-Leninisme terhadap kader² dalam Komite Partai dan pimpinan BTI terutama ditingkat ketjamatan dan desa, serta terhadap aktivis² yang lahir dari aksi². Pengalaman di Djawa Barat membuktikan bahwa untuk ini harus diperluas Kursus² Kilat Aksi, Kursus² Rakjat, Panti Pengetahuan Rakjat (Panpera) dan Sekolah² Politik di-daerah² pertanian serta memberikan prioritas yang tinggi kepada kader² tani dan nelajan untuk memasuki Sekolah² Partai dan Sekolah Kader Tani ditingkat Kabupaten dan Provinsi.

Disamping itu penting sekali ditingkatkan terus-menerus pengetahuan umum kader yang bekerdja dikalangan tani dan nelajan dengan jalan memperluas penyelenggaraan kursus² PBH, Panpera, Bapera dan Unra, dan dimana mungkin kursus² kedjuruan, seperti pertanian dan perikanan. Laporan² petugas riset membuktikan bahwa kader² Partai dan BTI yang telah ditingkatkan taraf kebudayaannya merupakan pedjuang² yang gigih dan tjekatan dalam membela kebenaran politik Partai dan Manipol.

Keadaan penghidupan kader yang terlalu sulit tidak boleh dibiarkan ber-larut². Komite Partai atasan harus segera turuntangan dan memberikan bantuan sekuat mungkin untuk mengatasi kesulitan atau meringankan beban penghidupan mereka. Sikap atjuh-tak-atjuh harus dibuang djauh². Disamping itu Komite² bawahan dan BTI harus ditingkatkan kemampuannya supaya bisa berdiri sendiri dalam mengatasi kesulitan penghidupan kader di-daerahnya dengan berbagai usaha produktif setjara gotong-rojong. Sedangkan Komite dan kader atasan harus menundjukkan solidaritet Komunis yang tinggi dengan berpedoman kepada garis Sidang Pleno ke-II CC (Kongres Nasional ke-VI Partai), jaitu bahwa : bantuan materiil masih sangat terbatas tetapi bantuan moril tidak terbatas.

3. PENGALAMAN AKSI KAUM TANI DAN NELAJAN DI DJAWA BARAT

Gerakan tani di Djawa Barat mengalami gelombang pasang sesudah berhasil tertumpasnya gerombolan DI-TII dan setelah tergebleng dalam perjuangannya melawan 7 setan desa. Sedangkan gerakan nelajan masih dalam tingkat pembangunan organisasinya. Dari laporan hasil riset telah ditemukan berbagai matjam bentuk perlawanan kaum tani dan nelajan melawan ber-matjam² penghisapan dan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Objek² aksi berlimpah², sedang semangat berlawan kaum tani dan nelajan ber-kobar². Ini sangat menggembirakan bagi perspektif perjuangan kaum tani dan perkembangan organisasi tani revolusioner di Djawa Barat.

Kaum tani dan nelajan di Djawa Barat selama ini telah melantjarkan 1001 matjam aksi berporoskan Gerakan 6 Baik melawan 7 setan desa. Beberapa pengalaman diantaranya adalah seperti dibawah ini.

Kaum tani selalu memberikan perlawanan yang gigih dan berani dalam mempertahankan tanah garapan bekas tanah kehutanan atau bekas tanah perkebunan, baik di tanah garapannya maupun dipengadilan. Aksi tersebut mendapat dukungan dari kaum buruh kehutanan dan agraria dan aksi² umumnya sudah dapat dikordinasi dan dipimpin dengan baik. Dalam aksi tersebut kaum tani sekaligus melawan pensalahgunaan gerakan penghidjauan yang didalam prakteknya membiarkan tanah yang seharusnya dihidjaukan, tetapi mengusir kaum tani dari tanah garapannya yang sudah menjadi sawah, ladang dan desa yang samasekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan hidrologi dan menjegah erosi.

Di Djawa Barat ada kira² 51.750 penggarap yang sudah melaksanakan UUPBH diatas luas tanah kira² 11.500 ha (angka² BTI Djawa Barat) dan pada umumnya ini adalah hasil aksi sefihak. Angka² pemerintah daerah Djawa Barat mengenai pelaksanaan UUPA yang kebenarannya sangat diragukan, jaitu bahwa dari luas tanah-lebih 57.000 ha yang telah terdaftar sudah dilaksanakan redistribusi atas 21.182,0796 ha kepada 33.573 penggarap, menundjukkan bahwa lebih dari separo luas tanah-lebih yang sudah terdaftar belum didistribusikan. Hasil aksi kaum tani dalam melaksanakan UUPA yang betul² menguntungkan

kaum tani, semuanya adalah hasil aksi sefihak. Dengan aksi sefihak ini dibanjak daerah dapat ditemukan penggelapan² tanah-lebih oleh tuantanah. Dalam aksi² sefihak melaksanakan UUPBH dan UUPA kaum tani sekaligus melakukan aksi mempertahankan tanah garapannya, karena dalam rangka melawan aksi sefihak ini tuantanah juga kemudian melakukan tindakan² pengusiran. Dalam melaksanakan UUPBH dan UUPA kaum tani selalu gigih memberikan perlawanan² terhadap tuantanah, baik diatas sawah garapannya maupun didepan pengadilan.

Aksi² sefihak dalam rangka melaksanakan UUPBH yang dilakukan oleh kaum tani sedjak tahun 1962 telah berlangsung diberbagai daerah seperti di-kabupaten² Bandung, Tjirebon, Indramaju, Krawang dll. yang sudah menghasilkan lebihkurang 52.000 perdjandjian bagihasil 21.750 dengan surat sedangkan selebihnja tanpa surat. Padahal perdjandjian bagihasil untuk Djawa Barat harus meliputi kira² 700.000 perdjandjian (berdasarkan perkiraan luas tanah yang tidak dikerdjakan sendiri oleh pemiliknya kira² 350.000 ha dan setiap penggarap rata² menjewa 0,5 ha). Ini disatu fihak membuktikan sabotase besar²an terhadap pelaksanaan UUPBH tetapi difihak lain menundukkan gerakan tani di Djawa Barat sudah tidak bisa di-tahan² lagi dan sedang menghadapi gelombang pasang baru.

Aksi² untuk meningkatkan upah buruhtani sudah berdjalan agak merata, malahan didaerah Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, tuantanah dan tanikaja setempat harus berhubungan dengan BTI djika mereka mau mendapatkan tenaga kerdja buruhtani, karena kaum buruhtani hanya mau bekerdja djika diminta lewat BTI. Dengan demikian harga tenaga kerdja buruhtani dapat sedikit dinaikkan.

Aksi bebas gadai yang sudah berdjalan a.l. didaerah Indramaju, yang umumnya juga dilakukan setjara sefihak.

Dalam menghadapi musim patjeklik, disamping melakukan salingbantu dikalangan kaum tani sendiri, gerakan boboko juga sudah berdjalan dibanjak daerah. Dalam aksi² ini kaum tani telah berhasil bekerdjasama dengan pamongdesa yang berkemauan baik.

Disementara desa kaum tani sudah berhasil meritul penguasa² djahat didesa melalui aksi² massa.

Dikalangan kaum nelajan kegiatan yang sudah agak merata adalah arisan atau saling tolong-menolong untuk menghadapi berbagai keperluannya (chitanan, kematian dll).

Dari berbagai matjam aksi di Djawa Barat selama ini dapat dilihat bahwa kaum tani sudah berani melakukan aksi² sefihak melawan setan² desa. Berdasarkan pengalaman aksi melawan setan² desa tersebut diatas, selanjutnja perlu dikembangkan aksi²: melaksanakan tuntutan 6 : 2 : 2 dalam rangka pelaksanaan UUPBH terhadap pemilik² tanah yang masih belum melaksanakannya; meluaskan pelaksanaan UUPBH dan UUPA setjara konsekwen dengan mengutamakan kepentingan buruhtani dan tanimiskin; meritul penguasa djahat dan me-Manipol-kan kekuasaan desa; meringkus dan membasmi bandit² desa; dll.

Untuk dapat mengembangkan aksi² tersebut pengalaman yang baik perlu diluaskan dan yang kurang tepat harus dijadikan pelajaran.

4. MEMPERSIAPKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGKONSOLIDASI AKSI

Garis aksi „adil, menguntungkan, tahu batas” dan pelaksanaan tuntutan „ketjil hasil” dengan mengkombinasikan kerdja berkobar dan tekun adalah pegangan didalam mengorganisasi aksi². Dengan berpedoman kepada garis² ini Komite Partai dan organisasi massa revolusioner didorong untuk melakukan persiapan yang se-baik²nja, terutama dalam menentukan kader² pimpinan aksi yang berpengalaman dan militan. Untuk tiap aksi perlu dibentuk tim² aksi. Tim² ini bisa dibentuk mulai tingkat Provinsi sampai desa atau mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat desa. Komposisi anggota tim aksi terdiri dari anggota Komite dan anggota² pimpinan organisasi² massa revolusioner. Dalam melakukan aksi² perlu diikutsertakan sebagai „magang”, artinja tanpa diberi tanggungjawab yang berat, kader² muda yang belum berpengalaman, supaya bisa beladjar dari pengalaman aksi.

Kuntji pimpinan kegiatan aksi berada di CSS yang dibantu oleh pimpinan organisasi² massa revolusioner tingkat ketjamatan. Selanjutnja dalam menjimpunkan aksi² yang telah dilantjarkan, perlu dibentuk tim² khusus di-

beberapa daerah jang madju guna menganalisa dan menjimpulkan aksi², baik jang menang maupun jang gagal dalam segala bentuknja. Penjimpulan ini penting untuk diratakan ke-daerah² lainnja. Menurut pengalaman di Djawa Barat, jang bisa dijadikan daerah² tjontoh dalam aksi² kaum tani antara lain jalah Kabupaten Bandung, Tjiamis, Subang dll.

Pengalaman membuktikan bahwa aksi² akan bisa berdjalan lantjar, apabila sebelumnja kader² aksi diindoktrinasi dengan menjampaikan 4 *djelas*, jaitu : (1) *djelas* sasaran aksi; (2) *djelas* sandaran dan kekuatan jang melakukan aksi; (3) *djelas* tjara melaksanakan aksi; dan (4) *djelas* saat dimulai dan diachirinja aksi. Untuk dapat menjampaikan 4 *djelas* kepada massa jang akan melakukan aksi perlu diadakan rapat² pendjelasan atau rapat² tuntutan. Dalam rapat² tersebut segala fitnahan kepada kaum tani dan nelajan supaja dijawab dan sikap munafik mereka terhadap gerakan tani dan nelajan supaja ditelandjangi habis-habisan. Disamping itu selama aksi berdjalan djuga diperhukan adanja rapat² dengan massa jang sedang beraksi, untuk memberikan pendjelasan tentang perkembangan situasi aksi dan taktik² baru jang harus segera dilaksanakan. Menghadapi aksi² jang berat perlu dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan Komite² Partai satu tingkat lebih atas. Untuk lebih memperlantjar djalannja aksi perlu diadakan kontak jang terus-menerus antara tim aksi atas dengan tim aksi bawahan. Kekuatan aksi tergantung kepada pengorganisasian KTK (Kelompok Tempat Kerdja) dan KTT (Kelompok Tempat Tinggal) serta dalam mendjalankan propaganda setjara mendalam dikalangan massa jang melakukan aksi. Untuk itu, sebelum membangkitkan aksi, perlu lebih dulu dilakukan riset singkat mengenai berbagai masalah jang bersangkutan dengan aksi tersebut. Perhatian dan bantuan serta pendjelasan tentang situasi politik harus diberikan kepada kader² jang langsung memimpin aksi termasuk ketua² KTK dan KTT, agar dengan demikian mereka lebih diperteguh sikap dan tindakannja.

Dalam tiap aksi perlu ditjegah terdjadinja ketjenderungan menjerah kepada lawan karena tekanan², antjam-antjaman, pengedjaran² atau penangkapan² dan suapan-suapan, atau melakukan tindakan² nekad dan anarki. Kader² aksi supaja dibantu dan didorong untuk lebih da-

lam lagi memahami masalah pentingnja organisasi dalam aksi, memegang teguh disiplin, konsekwen melaksanakan garis² pimpinan, tetapi tidak boleh birokratis dan kaku serta kurang inisiatif.

Pengalaman membuktikan bahwa aksi² bisa berhasil baik, apabila aksi massa dikombinasikan setjara tepat dengan usaha² lewat perundingan², dengan pengertian bahwa sandaran pokok adalah aksi massa. Dalam perundingan² pimpinan aksi harus siap dengan fakta² dan argumentasi² jang melumpuhkan alasan² setan² desa. Aksi jang hanya dilakukan oleh pimpinan harus ditjegah. Tiap² aksi harus benar² bersandar pada kebangkitan dan kekuatan massa. Dengan bersandar kepada kekuatan buruh-tani dan tanimiskin atau buruhnelajan dan nelajanmiskin sebagai basis kekuatan aksi didesa, kita menarik tani-sedang atau nelajansedang kedalam aksi, menetralisasi tanikaja atau nelajankaja dan menarik pedjabat² jang Manipolis, sehingga terhimpun disekitar aksi lebih dari 90% kekuatan didesa, untuk mementjilkan dan melawan setan² desa. Pengalaman menarik massa jang luas kedalam aksi sudah terdjadi diberbagai desa di Kabupaten Bandung, dimana telah dapat dimobilisasi semua anggota keluarga kaum tani sampai ke-anak²nja kedalam aksi. Inti kekuatan dari sesuatu aksi adalah kegiatan daripada golongan massa jang berkepentingan. Untuk meluaskan dukungan dan memperkuat aksi, penting sekali diadakan aksi² di-bagian² lain dari daerah jbs.

Menentukan saat² jang tepat untuk dimulai dan diachirinja sesuatu aksi sangat penting untuk dapat memobilisasi massa se-luas²nja setjara berdisiplin dan untuk mentjegah usaha² provokasi setan² desa. Agar dapat memberikan tuntunan kongkrit dan memberikan tjontoh serta dorongan kepada kader² jang sedang memimpin aksi, kader² atasan supaja ikut aktif dalam sesuatu kegiatan aksi. Untuk dapat melaksanakan hal² tersebut supaja dilakukan setjara teratur gerakan turun kebawah oleh kader² pimpinan dengan tidak mengabaikan tugas² Partai lainnja.

Pengalaman kaum tani di Djawa Barat memperlihatkan kekurangan² penting dalam mengkonsolidasi dan meningkatkan hasil² aksi tersebut. Ini antarlain dibuktikan oleh kenjataan, bahwa dibanjak daerah sudah terdjadi banjak aksi jang berhasil, tetapi perluasan organisasi mas-

sa revolusioner tani dan perluasan Partai masih belum seimbang. Rasa puas diri karena aksi berhasil atau patah hati djika aksi tidak mentjapai hasil, masih terdapat di lingkungan sementara kader. Oleh karena itu pedoman 4 menang, jaitu : menang politik, menang organisasi, menang ideologi dan menang sosial-ekonomi, harus dipegang sedjauh mungkin didalam melakukan aksi². Pekerdjaan ber-kobar² harus benar² dikombinasi dengan pekerdjaan tekun.

Diatas segala-galanja harus bisa ditjapai menang politik, jaitu meningkatnja kesetiaan kaum tani kepada organisasinja, kepada pimpinan dan program agraria Partai. Untuk itu harus diadakan kampanye mengenai hasil aksi melalui rapat-rapat, plakat-plakat, poster-poster dan surat kabar². Kader² jang lahir dalam aksi harus segera ditingkatkan pengertian dan kemampuannja dengan memberikan pendidikan dan menariknja untuk memperkuat grup pimpinan. Dikalangan massa harus dilantjarkan kampanye memperluas keanggotaan Partai dan ormasrev, dalam rangka pelaksanaan Plan 4 Tahun Partai dan ormasrev. Menang politik per-tama² berarti tambah Komunis dan tambah anggota BTI.

Aksi² sosial-ekonomi harus selalu dihubungkan dengan aksi² politik seperti mendemokrasikan desa, rituling penguasa djahat dan me-Manipol-kan pemerintahan desa, perjuangan mengganjang „Malaysia”, menentang Armada ke-VII Amerika Serikat, dsb. Hasil aksi jang baik harus segera dikonsolidasi, misalnja, aksi kaum tani jang berhasil untuk mendapat tanah garapan dari tanah perkebunan, kehutanan atau tanah-lebih harus disusul dengan aksi untuk mendapat kredit murah, mudah dan berdjangka pandjang, untuk mendapat alat² pertanian, bibit, pupuk, pengairan dll, disamping membangkitkan swadaja dan mengorganisasi kaum tani jbs dalam koperasi² kaum tani. Dengan demikian kita selalu mengembangkan kekuatan kaum tani untuk lebih konsekwen lagi mengganjang setan² desa.

VI

KESEDARAN POLITIK KAUM TANI DAN PROPAGANDA POLITIK REVOLUSIONER DIDESA

KESEDARAN POLITIK MELUAS DAN MENINGKAT DIDESA-DESA

Hasil penelitian lebih meyakinkan kita, bahwa kebangkitan kesedaran politik dikalangan kaum tani dan nelajan adalah sedjalan dengan perkembangan PKI dan gerakan revolusioner di-desa². Di-desa², di-gunung², lembah² dan pantai², dimana PKI sudah mengindjakkan kakinja dan kemudian melakukan propaganda politik revolusioner serta membantu kaum tani mengorganisasi diri dan memimpinnja, kesedaran politik dikalangan kaum tani dan nelajan segera berkembang dengan tjepat. Kedjahatan² kaum penghisap dibongkar, kemunafikan dan ketachajulan ditelandjangi. Ber-angsur² kaum tani dan nelajan melepaskan diri dari perbudakan mental setan² desa.

Sebelum gerakan revolusioner masuk kedesa, kaum tani memandang kekuasaan feodal didesa sebagai sesuatu jang keramat, langgeng dan tak tergojahkan, dan bahwa kemelaratan dan keterbelakangan mereka adalah sudah takdir dan nasib mereka jang tjelaka tidak bisa berubah. Setelah mereka mengenal PKI, mengenal semangat, politik dan programnja, dan kemudian mengenal Manipol, mereka mengenal lebih baik keadaan jang sesungguhnya dan melihat djalan keluarnja. Bahkan di-desa² jang sudah maju, kaum tani telah memahami peranan mereka dalam penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja dan melihat kepada PKI sebagai pemimpinnja jang sedjati. Kaum tani jang sudah ambilbagian dalam gerakan revolusioner di-desa² jang tersebar disemua Kabupaten di Djawa Barat sudah mulai memahami soal² pokok revolusi Indonesia, memahami peranan Rakyat pekerdja dan chususnja kaum tani dalam revolusi, memahami politik revolusioner Republik Indonesia, terutama jang dikemukakan oleh Presiden Sukarno lewat pidato² 17 Agustus. Pendeknja kaum tani Djawa Barat

sudah sadar-politik sehingga tidak akan ada lagi satu matjam perbudakanpun yang tidak akan diganggu oleh kaum tani di Djawa Barat. Kaum tani Djawa Barat yang sudah sadar-politik ini, bangkit dan melawan ber-sama² kaum tani diseluruh Indonesia.

Di-desa² dimana gerakan revolusioner belum berkembang, kaum tani baru mengenal sebutan Manipol atau baru membuat papan² yang bertuliskan Manipol. Mereka belum mengenal isinja, dan para penguasa tidak memperkenalkan isi „Manipol”, apalagi semangatnja. Tetapi dikebanyakan desa dimana PKI sudah membentangkan sajanja, Manipol sudah diperkenalkan, baik isinja maupun semangatnja. Pedjabat² di-desa² pada umumnja tidak merasa berkepentingan untuk melaksanakan Manipol, bahkan djika dilaksanakan setjara konsekwen, merekalah yang dirugikan. Oleh karena itu, tidak hanya di-kota², tetapi djuga di-desa² berkeliaran Manipolis² munafik.

Demikian pula halnya dengan UUPA dan UUPBH. Di-desa² dimana PKI dan gerakan revolusioner belum berkembang, kaum tani belum mengenal isi UUPA dan UUPBH. Pamongpradja, pamongdesa dan pedjabat² lain tidak berusaha untuk mengerti kedua undang² negara ini, bahkan banjak yang tidak memiliki kedua undang² ini, dan yang berkemauan baik meminta undang² tsb. dari pimpinan BTI. Tetapi sebaliknya, di-desa² yang sudah ada PKI dan madju gerakan revolusionernja, kedua undang² tersebut bukan hanya dikenal oleh kaum tani, melainkan sudah diperjuangkan pelaksanaannja. Bahkan kaum tani sudah sampai kepada kesadaran bahwa hanya pelaksanaan program agraria yang radikal, jaitu „Tanah Untuk Kaum Tani” sebagaimana dirumuskan dalam Program PKI, yang akan mengachiri kemelaratn dan keterbelakangan mereka. Di-desa² ini, kaum tani berdasar pengalamannja sendiri mejakini, bahwa pelaksanaan UUPA dan UUPBH, lebih² lagi pelaksanaan landreform yang radikal, sepenuhnya tergantung pada kekuatan kaum tani sendiri dibawah pimpinan PKI. Mereka berkejakinan, bahwa pelaksanaan UUPBH dan UUPA bukan urusan bupati, tjamat, lurah atau pedjabat² lain, karena djika digantungkan pada mereka, sampai kiamatpun tidak akan ada pelaksanaannja. Pelaksanaan semuanya tergantung pada *kaum tani sendiri* dan *kaum Komunis*. Di-desa² ini kaum tani telah melakukan aksi² sefihak untuk melaksanakan kedua undang² ini, untuk

membatasi milik tuantanah atas tanah dan mengurangi penghisapan tuantanah atas dirinja.

Djika UUPA dan UUPBH dibanjak desa tidak atau kurang dikenal kaum tani dan pada umumnja matjet pelaksanaannja, maka sebabnja ialah karena pada pokoknja para pedjabat desa umumnja dirugikan oleh kedua undang² tersebut. Tetapi diatas se-gala²nja karena di-desa² itu gerakan tani revolusioner dan PKI belum meluas dan terkonsolidasi.

Dengan keluarnya kedua undang² tersebut tuantanah didesa mulai runtuh „kewibawaan”nja didepan kaum tani. Tuantanah mulai dikenal oleh petani² penggarap tanahnja sebagai penipu, karena mereka menggelapkan luas tanah dengan tjara² yang kotor², yang semuanya diketahui oleh kaum tani. Tuantanah yang biasanja me-nakut²i kaum tani dengan undang², sekarang djustru mereka yang telandjang bulat dihadapan kaum tani sebagai orang² yang membangkang terhadap undang² dan peraturan² negara. Bersamaan dengan itu „pembesar²” di-kota² yang mempunyai tanah didesa dan para pedjabat desa yang ikut membantu kedjahatan tuantanah telah djatuh pula „martabat”nja dikalangan kaum tani.

Dimata kaum tani mereka bukan pembesar atau djuragan lagi, tapi penipu² yang sudah diberi djulukan „setan desa”.

Sedjalan dengan kebangkitan kaum tani melawan tuantanah, mulai djuga bangkit kesadaran melawan kabir² yang memainkan peranan sebagai kakitangan imperialis atau kabir² kota di-desa².

Perlawanan kaum tani terhadap kabir lebih njata lagi di-daerah² dimana terdapat PPN. Perjuangan kaum tani di-daerah² ini ditudjukan untuk melawan pengusiran dari tanah² bekas perkebunan oleh kabir berbadju „Perkapen” atau „Soksi” alias „PSI gaja baru”. Perjuangan itu sekarang ini masih berlangsung untuk mempertahankan tanah² garapan bekas tanah kehutanan dan perkebunan yang sudah lama digarap kaum tani dan untuk memperjuangkan hal² yang bersangkutan dengan sistim tumpang-sari. Hal ini terdjadi di-daerah² Garut Selatan, Pengalengan (Bandung), Tjiandjur Selatan dan di-bagian² lain dari Djawa Barat.

Perlawanan² mulai tumbuh terhadap lurah² desa yang menjalahgunakan kekuasaan sebagai tengkulak. Lurah²

djihat ini ada jang mensalahgunakan kekuasaannya untuk memonopoli hasil² produksi pertanian lewat „koperasi” palsu untuk menekan harga produksi kaum tani, misalnya sampai dibawah 50% dari harga pasar, merampas kelebihan uang hasil pendjualan kaum tani dipasar jang melampaui ketetapan harga jang ditentukannya atasnama „koperasi”, serta melakukan sistim idjon.

Kesedaran politik kaum tani di Djawa Barat untuk membasmi kaum kontra-revolusioner tidak hanya meluas tetapi djuga mendalam. Hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan kaum tani pada waktu jang lalu dengan mengambil bagian aktif dalam perdjjuangan bersama ABRI dan dalam mengambil bagian aktif dalam operasi „pagar betis” untuk menumpas gerombolan DI-TII. Dalam keadaan kaum kontra-revolusioner sekarang ini mau melakukan kegiatan melalui „Madjelis Ulama” (MU), jang dalam pengertian kaum tani adalah „Masjumi gaja baru” atau „DI gaja baru”, kaum tani melawannya dengan segala djalan. Sedang gerakan rasialis bukan hanya tidak mendapat dukungan, melainkan mendapatkan perlawanan dari kaum tani. Gerakan rasialis jang membakari truk² dan bus² menambah kesulitan transport jang sudah sulit dan mengganggu lalu-lintas barang jang akibat²nja sangat merugikan kaum tani, seperti jang terdjadi di Bandung, Bogor, Tjiandjur, Garut, Sukabumi dan beberapa tempat lainnya pada tahun jang lalu.

Di-desa² sedang tumbuh kesedaran jang makin dalam tentang pengganjangan „Malaysia”. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa kaum tani aktif bersama kaum buruh mengambil-alih perusahaan² Inggris dan oleh kesedaran jang makin dalam akan perlunya mengatasi sendiri kesulitan-kesulitan pangan. Walaupun dibanjak desa para pedjabat telah melakukan tekanan² terhadap kaum tani dan bahkan ada jang melarang sembojan „mengganjang Malaysia” serta melakukan propaganda bahwa perdjjuangan ini menimbulkan kesulitan hidup, tetapi semuanya ini tidak menurunkan kesedaran politik kaum tani Djawa Barat.

Dari desa² telah lama mengalir tuntutan² berupa resolusi-resolusi dan petisi² jang ditanda-tangani oleh massa kaum tani baik sendiri² maupun ber-ramai² tentang pembentukan kabinet Gotong-Rojong berporoskan Nasakom, tentang pe-Nasakoman pemerintah² daerah, pendemokrasi-an pemerintah desa, penggantian peraturan² „26 Mei”

dengan jang menguntungkan kaum tani, penggantian pamongdesa jang djahat, pelaksanaan UUPBH dan UUPA setjara konsekwen dengan mengutamakan kepentingan kaum tani penggarap, dll.

Perdjjuangan kearah pendemokrasian pemerintah desa mulai berkembang dengan adanya tuntutan² kaum tani agar wakil² PKI, BTI dan golongan revolusioner lainnya didesa jang dikenal sebagai orang² terkemuka ikut serta dalam pemerintahan desa. Kaum tani diberbagai desa mulai menuntut diselenggarakannya rembug² desa setjara demokratis dan menuntut pemetjatan lurah² djahat serta rituling penguasa² djahat lainnya. Sedang organisasi Front Nasional jang merupakan organisasi kerdjasama partai² Nasakom dan perseorangan² mulai dituntut untuk diaktifkan, djuga Panitia² Landreform dituntut supaya diaktifkan dan Pengadilan Landreform jang berporoskan Nasakom supaya dibentuk. Di-desa² dimana PKI dan BTI sudah berkembang dan berpengaruh, kerdjasama Nasakom lebih mudah di-galang.

Makin meningkatnja kesedaran politik kaum tani merupakan djaminan bagi diperkokohnja front nasional jang berbasiskan persekutuan buruh dan tani. Ia merupakan djaminan bagi kaum tani untuk membebaskan dirinja dari penghisapan feodal jang membelenggu mereka selama ini.

Sedjalan dengan meningkatnja kesedaran politik kaum tani, meningkat pula kesedaran wanita tani dalam perdjjuangan untuk emansipasi revolusioner. Kaum wanita tani ber-sama² dengan laki² mempertahankan tanah garapan dan melawan tuantanah² djahat serta setan² desa lainnya. Perdjjuangan telah mempertebal kejakinan wanita tani bahwa perdjjuangan untuk emansipasi wanita tidak terpisahkan dari perdjjuangan melawan imperialisme dan feodalisme.

Dengan makin meningkatnja kesedaran politik kaum tani, gerakan „6 Baik” meningkat pula dan makin terdjamin sjarat guna mematahkan setiap usaha kaum rasialis dan reaksioner lainnya jang hendak menggunakan masalah sukubangsa dan perbedaan warna kulit (rasialisme) untuk memetjah-belah front persatuan nasional.

Dengan berubahnja keadaan desa jang terbelakang berangsur mendjadi maju berkat meningkatnja kesedaran politik kaum tani sebagai akibat berkembangnja dan terkonsolidasinja PKI dan BTI dilapangan politik, organisasi

dan ideologi, setjara ber-angsur² melenjap pula gejala² djelek, seperti perdjadian, djawara² djahat, tachajul dll di-banjak desa di Djawa Barat.

Kesemuanja itu sudah menggojangkan dan achirnja akan menghantjurkan kekuasaan setan² desa jang diantaranya sudah ada jang mulai segan menampakkan diri disiang hari, tetapi masih terus mengganggu dan hanja kalau di-ganjang terus mereka akan menghilang untuk se-lama²nja.

USAHA² KAUM REAKSIONER UNTUK MEMBENDUNG KESEDARAN POLITIK KAUM TANI

Untuk membendung kesedaran politik kaum tani didesa, kaum reaksioner telah menempuh berbagai matjam tjara, baik berupa membatasi kebebasan demokratis, antjaman² terhadap pemimpin² kaum tani, mensabot putusan² jang madju dari pemerintah pusat, memperalat agama dan kebudayaan sampai kepada fitnahan, kemunafikan dan teror.

Untuk membendung kebangkitan kesedaran politik kaum tani agar kekuasaan desa dapat tetap sepenuhnya mengabdikan kepentingan tuantanah dan kabir, rapat² desa telah dilaksanakan dengan tidak periodik dan tidak demokratis. Rapat² desa dilaksanakan tanpa mengikutsertakan tokoh partai² Nasakom dan wakil organisasi tani revolusioner karena takut dibongkar „borok²” pamongdesa² jang djahat. Sedang rapat² tahunan desa lebih banjak bersifat menjam-paikan instruksi². Usul² jang datang dari kaum tani bukan-nja ditampung, melainkan ditindas dengan kemarahan dan kebringasan. Oleh karena itu tuntutan² agar rapat² desa diadakan periodik dan diselenggarakan setjara demokratis makin meluas di-desa² Djawa Barat.

Organisasi Front Nasional didesa ada jang belum di-bentuk, ada jang sudah dibentuk tetapi tidak dihidupkan, dan ada pula jang tidak mengikutsertakan wakil² Nasakom. Untuk mematjetkan organisasi Front Nasional, sementara pedjabat desa atas instruksi „atasan” telah membentuk lembaga² baru seperti „Madjelis Ulama” (MU), „Lembaga Kesedjahteraan Umat” (LKU) dan sebangsanja. Tindakan mereka ini mulai mendapatkan perlawanan² dari kekuatan² revolusioner.

Karena PKI telah terbukti merupakan Partai jang me-njebakkan berkembangnja gerakan revolusioner didesa, maka kaum reaksioner dari pusat, provinsi, kabupaten,

ketjamatan sampai kedesa mentjoba merintang² pertumbuhan PKI. Dengan berbuat demikian mereka berusaha mentjegah adanya penguasa desa jang Manipolis, mentjegah djangan sampai desa² dapat dikonsolidasi setjara revolusioner dibidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Tetapi, bertentangan dengan keinginan mereka, berkat pembelaan² PKI jang teguh dan terus-menerus terhadap kepentingan² kaum tani, PKI malahan makin mendapat tempat dalam hati kaum tani dan ofensif Manipol makin meluas ke-desa². Sungguh, dasar² masjarakat lama sedang gontjang di-desa² Djawa Barat !

Untuk mempertahankan kedudukannja, kaum reaksioner tidak segan² melakukan antjaman, pengedjaran dan penangkapan dengan memindjam tangan sementara Koramil dan Pembina serta pedjabat² desa lain jang reaksioner sampai pada suapan dan fitnahan terhadap kader² PKI dan BTI. Tetapi usaha² ini ternyata tidak berhasil dan tidak akan berhasil memadamkan kebangkitan kesedaran politik kaum tani.

Dengan tidak segan² kaum reaksioner memperalat agama dengan menggunakan langgar² dan mesdjid². Mereka antara lain mengchotbahkan bahwa kehidupan kaum tani jang semakin berat dewasa ini disebabkan karena kaum tani sudah melupakan tablih² dan banjak ikut² politik. Maksud chotbah² mereka itu disamping untuk membikin kaum tani pasif terhadap Manipol, pengganjangan „Malaysia” dll, djuga dimaksudkan untuk me-nutup²i penghisapan kaum tuantanah, imperialis, kapitalis birokrat dan setan² desa lainnja jang mendjadi sebab pokok dari kemelaratn dan keterbelakangan bagian jang sangat besar dari kaum tani. Walaupun demikian, berdasar pengalamannja sendiri, kaum tani Djawa Barat sudah tjukup mengenal, bahwa chotbah² tsb. adalah merupakan kegiatan „Masjumi gaja baru” atau „DI gaja baru”.

Kaum tani dengan tadjam sekali menjindir berbagai gejala buruk dewasa ini. Mereka lukiskan dengan rasa amarah keadaan pintjang jang mereka saksikan dan alami itu dengan perantaraan kesenian seperti reog, kidung, bebodoran dll. „Salah tapi kaprah, benar belum lumrah”, „Undang² kalah karena kadang, peraturan kalah karena bebaturan, wei kalah karena dompet”, „Membawa beras sekati harus ber-hati², sekwintal ke-bintal² (ter-lunta²), satu ton tidak katon (kelihatan)”, demikian antara lain utjapan²

mereka. Sementara Bintara Pembina Wilayah yang reaksioner oleh kaum tani telah diberi nama „Pembinasa”.

Ini semua adalah pernyataan kesadaran politik revolusioner kaum tani dan nelajan terhadap kepintjangan² dan ketidakadilan yang berlaku dewasa ini di-desa² Djawa Barat.

PROPAGANDA POLITIK REVOLUSIONER DIDESA

Akibat penindasan dan penghisapan imperialisme, tuan-tanah dan setan² desa lainnja yang sudah lama berkuasa didesa, dan yang tahun² belakangan ini ditambah lagi dengan kaum kabir, telah menjejabkan kebudayaan kaum tani dan nelajan sangat terbelakang. Dengan demikian pekerdjaan propaganda politik dikalangan kaum tani dan nelajan wadajib dilakukan dengan tekun dan berkobar, dengan setjara meluas dan mendalam. Partai harus menempuh, segala djalan dan tjara untuk melakukan propaganda politik revolusioner dikalangan kaum tani dan nelajan.

Dari hasil² riset terbukti, bahwa walaupun penghidupan kaum tani sangat berat, tetapi dimana PKI menjelenggarakan kursus² PBH, Sekolah² Politik, Kursus² Rakjat dan Panpera, kaum tani telah mengikutinja dengan tekun dan gairah. Mereka menjambut kader² PKI yang sedang bertugas turun kebawah dengan penuh kehangatan. Bahkan kader² PKI tersebut telah diperebutkan oleh kaum tani untuk berkundjung kerumahnja, walaupun penghidupan mereka sangat sulit. Dalam melakukan propaganda politik revolusioner didesa adalah penting untuk melakukan andjangsana. Pada waktu andjangsana kader² PKI dapat membitjarakan berbagai hal dan melakukan propaganda politik revolusioner setjara mendalam dengan kaum tani dan nelajan.

Gerakan „3 sama”, walaupun ditudjukan per-tama² untuk riset, tetapi ia mengandung segi² propaganda dan mobilisasi yang penting. Pada waktu melaksanakan „3 sama”, buruhtani dan tanimiskin mengetahui betapa tingginja moral kader² PKI dan oleh karena itu mereka memberikan segala keterangan dan bantuan yang diperlukan, dan diantara keterangan² itu merupakan bahan² hidup untuk pekerdjaan propaganda.

Dengan melalui tjeramah² dan rapat² massa didesa kesadaran kaum tani dan nelajan meningkat tjepat. Dalam waktu yang amat singkat, kaum tani dan nelajan tidak ha-

nja mengenal lebih baik desanja, tetapi mereka mulai kenal keadaan negerinja. Bahkan mereka mulai mengerti beberapa soal internasional, seperti antarlain dibuktikan dengan pengiriman petisi² mendukung perdjuaan Rakjat Kuba melawan agresi AS, perdjuaan Rakjat Kalimantan Utara, perdjuaan kemerdekaan Rakjat Anggola dan Vietsel, seperti yang dilakukan oleh kaum tani daerah² Kabupaten² Bandung, Sukabumi, Tasikmalaja dll.

Berbagai Kursus Rakjat dan seminar mengenai masalah² tertentu didesa ternjata djuga merupakan tjara untuk melakukan propaganda politik revolusioner. Dengan seminar² tersebut kebenaran tuntutan² revolusioner kaum tani dapat dijakini setjara mendalam oleh kaum tani ber-sama² golongan lain yang madju didesa.

Kaum buruh yang sudah sadar, terutama buruh transport dan buruh agraria, sudah mulai merasa sebagai kewadjabanja untuk membantu meluaskan propaganda politik revolusioner ke-desa². Pekerdjaan ini djuga banyak dilakukan oleh kaum buruh kota yang sedang bertjuti ke-desa². Untuk meningkatkan kesadaran politik kaum tani disekitar daerah perkebunan, kehutanan dan pabrik², adalah penting kerjasama kaum buruh dengan kaum tani dan nelajan dalam bentuk aksi² bersama (aksi² dengan tuntutan yang sama), aksi² paralel (aksi² dengan tuntutan berlainan berdasar kepentingan masing², tetapi sasarannja sama), atau aksi² imbangan (aksi² dengan tuntutan yang sasarannja berlainan, tetapi bersamaan waktunja).

Kegiatan kebudayaan merupakan alat perdjuaan yang kuat untuk melakukan propaganda politik revolusioner di-desa². Kegiatan kebudayaan, disamping kegiatan politik dan organisasi, di-desa² yang tadinja dikuasai bandit² DI atau Masjumi, adalah sangat penting dalam rangka Manipol-kan desa².

Dalam pekerdjaan propaganda politik revolusioner didesa ternjata penting sekali artinja memperkenalkan sembojan-sembojan politik revolusioner lewat spanduk, poster, plakat, gambar karikatur, lewat tulisan² pada dinding, pada bangunan, batu² besar, pohon besar dsb. Djuga dapat dilakukan dengan menuliskannja pada kertas² untuk dipasang di-sanggar² desa atau, atas permintaan kaum tani, dipasang di-rumah² mereka. Para peladjar dan mahasiswa revolusioner yang sedang turun kebawah bisa membantu pekerdjaan ini. Sembojan² revolusioner ini berangsur-angsur

didjelaskan maknanya dan diuraikan isinya dalam tjeramah², rapat² dan kursus serta melalui pembitjaraan² perseorangan ditempat kerdja atau pada waktu andjangsana.

Walaupun belum luas, hasil penjelenggaraan koran² tempel dan penjebaran koran² revolusioner di-desa² adalah baik sekali. Penjebaran lektur revolusioner ternyata mempunyai peranan yang besar dalam pekerdjaan propaganda politik dikalangan kader² revolusioner didesa.

Dengan pekerdjaan propaganda politik revolusioner yang tekun dan berkobar, dengan luas dan mendalam, kesedaran politik kaum tani akan terus-menerus meningkat. Kesedaran politik dan tingkat kebudayaan kaum tani dan nelajan akan mendjadi lebih meningkat lagi dengan berkembangnja aksi² mengganjang setan² desa dibidang ekonomi dan politik. Pekerdjaan propaganda politik revolusioner di-desa² akan mendjadi lebih baik dengan lahirnja kader² baru dari aksi² kaum tani dan nelajan. Dengan demikian desa yang tadinja terbelakang, dibawah telapak kaki kaum reaksioner, berangsur-angsur akan mendjadi desa revolusioner yang terkonsolidasi dibidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Usaha tuantanah, kabir dan setan² desa lainnja untuk mempertahankan kekuasaan mereka yang penuh dan untuk mempertahankan keterbelakangan desa akan sia², meskipun mereka berbuat apa saja, termasuk melakukan fitnahan dan teror terhadap kaum tani.

VII

KAUM TANI DARI „SERBA SALAH” MENDJADI „SERBA BENAR”

Dalam keadaan dimana belum ada kebangkitan revolusioner dari kaum tani, kaum tani berada dalam kedudukan „serba salah”, „serba kalah” dan „serba tidak mempunyai hak”. Dizaman kolonial dulu petani yang berurusan dengan polisi, tanpa ada pemeriksaan sudah dianggap „salah”, karena kaum tani „tidak mungkin berada difihak yang benar”. Tidak hanya itu, anak-tjutnja dianggap anak-tjutju orang yang bersalah, karena mereka anak-tjutju orang yang pernah berurusan dengan polisi.

Setan² desa selalu mengchotbahkan, bahwa kemelaratan dan keterbelakangan kaum tani sudah merupakan takdir dan suatu keharusan masjarakat seperti dinjatakan oleh mereka : „redjeki geus di-pantji²” (rezeki sudah ditakar). Mereka djuga mengatakan bahwa kemelaratan dan keterbelakangan adalah karena kemalasan dan kebodohan kaum tani sendiri. Mereka djuga mengatakan : sebagaimana halnya ada siang dan malam, maka kalau ada orang kaya harus ada orang miskin, kalau ada orang yang memiliki tanah harus ada orang lain yang mengerdjakan.

Oleh karena itu, melihat kebangkitan gerakan tani sekarang setan² desa sangat marah dan selalu melakukan fitnah terhadap kaum tani.

Mereka mengatakan : „Sesudah ada BTI kaum tani mendjadi kurangadjar”, „BTI tukang bikin huru-hara” dan „BTI rewel”. Dalam hubungan ini kaum Komunis perlu memberikan djawaban, bahwa menurut Manipol kaum tani adalah sokoguru atau tenaga pokok revolusi. Sedang imperialisme dan feodalisme adalah musuh² revolusi Indonesia. Kalau kaum tani „kurang-adjar”, „tukang bikin huru-hara” dan „rewel” terhadap tuantanah, lintahdarat dan setan² desa lainnja, apakah ini salah? Ini tidak salah! Ini benar sekali! Bahkan ini kewadjiban. Menurut Manipol kaum imperialis dan tuantanah adalah musuh revolusi Indonesia dan harus dihapuskan. Djadi sebenarnja tak tju-

kup hanya sekedar dikurangadjadi atau direweli atau dibikin huru-hara terhadap musuh² revolusi ini. Sikap kaum tani sekarang masih terlalu lunak terhadap setan² desa,

Mereka mengatakan: „Sesudah ada BTI kaum tani membikin kita tidak tenang”. Kaum Komunis hanya dapat berkata, bahwa kalau demikian kaum tani sudah bertindak benar. Apa djadinja revolusi Indonesia ini kalau kepada musuh²nja diberikan kesempatan untuk bisa hidup tenang, „ajem tentrem”, seperti zaman pendjadjahan dulu, padahal mestinja mereka harus dihantjurkan, dan menurut Dekon harus „dikikis habis”. Mereka jang harus dikikis habis tidak seharusnya bisa tenang, sudah sewadjarnja mereka gelisah. Kaum tani sekarang masih terlalu lunak, tuantanah dan lintahdarat serta setan² desa lainnja masih terlalu banjak jang bisa tidur njenjak.

Mereka mengatakan: „Kaum tani tahunja hanya menuntut”. Dalam hubungan dengan ini, kaum Komunis harus memberikan djawaban, bahwa hasil riset memberikan bukti bahwa bangunan Sekolah Dasar jang didirikan oleh kaum tani sendiri di-desa² se-Djawa Barat adalah djauh lebih besar djumlahnja djika dibanding dengan jang didirikan oleh Pemerintah Daerah. Menurut angka resmi, sampai achir Februari 1964, di Djawa Barat bangunan Sekolah Dasar jang didirikan oleh Pemerintah berdjumlah 2.235 bangunan terdiri atas 7.160 lokal. Sedang jang didirikan oleh Rakjat, dengan sendirinja terutama kaum tani, berdjumlah 7.782 bangunan terdiri atas 24.170 lokal. Kaum tani ternjata memiliki semangat swadaja jang tinggi. Ini djuga dibuktikan terutama oleh kegiatan kaum tani jang dengan susah-pajah telah berusaha sendiri mengatasi kesulitan pangan dewasa ini, dalam rangka memperhebat konfrontasi total mengganjang projek neo-kolonialis „Malaysia”. Lagi pula, apa salahnja kaum tani menuntut? Jang dituntut kaum tani adalah haknja sendiri dan hak nenekmojangnja jang sudah ber-abad² dan terus-menerus dirampas oleh setan² desa. Oleh karena itu kaum tani adalah benar dan tidak bersalah. Kaum tani sekarang masih terlalu lunak dalam menuntut hak²nja ini.

Mereka mengatakan: „Kaum tani garong tanah” dan „penjerobot hutan sehingga menjebabkan bandjir”. Dalam hubungan dengan ini kaum Komunis perlu memberikan djawaban, bahwa tanah² hutan jang digarap kaum tani jang achir² ini dihebohkan oleh kabir² dan setan² desa lainnja

adalah tanah² datar. Sedangkan tanah hutan lama jang digarap memang ada tanah² miring, tetapi bukan hasil babatan baru kaum tani.

Kaum tani mengerti benar bahwa bandjir membahayakan dirinja dan tanamannja, oleh karena itu tidak mungkin kaum tani sengadja berbuat sesuatu untuk membikin bandjir jang akan membahayakan dirinja. Tanah² kehutanan jang dikerdjakan oleh kaum tani adalah tanah² gundul jang kajunja ditebangi atas perintah penguasa fasis Djepang untuk keperluan pertahanan dan perampokan mereka, atas perintah tentara kolonial Belanda untuk membasmi gerilja Republik, ketika perang kemerdekaan untuk memperbesar produksi pangan, atau pada masa membasmi kontra-revolusi bersendjata DI-TII diperintahkan untuk ditebangi agar mudah mengontrol lalu lintas DI-TII. Ada djuga hutan² dan kebun² jang ditebangi atas perintah pedjabat² kehutanan atau penguasa² perkebunan sendiri untuk didjual kajunja dan tidak dihutankan atau ditanami kembali, diterlantarkan oleh penguasa² tertentu dari kehutanan atau perkebunan.

Kaum tani selalu bersedia untuk melaksanakan penghidjauan daerah dan penghutanan kembali tanah² gundul dengan tanaman keras, bahan makanan, tanaman kaju untuk bangunan dan bahan² eksport, ataupun dengan menggunakan sistim tumpangsari dan sistim sebra antara tanaman² kaju dengan tanaman bahan makanan. Dengan demikian usaha² untuk manghidjaukan daerah dan penghutanan kembali tanah gundul dapat dikombinasi dengan usaha untuk meningkatkan produksi pangan. Djadi djuga dalam hal tanah kehutanan dan perkebunan jang gundul kaum tani adalah benar dan tidak bersalah. Kaum tani masih terlalu lunak dalam melawan tukang² fitnah, terutama pedjabat² kehutanan jang tani-phobi.

Mereka mengatakan: „Kaum tani adalah musuh negara dan harus ditangkap”. Tentang musuh negara, diatas sudah didjelaskan bahwa menurut Manipol musuh revolusi atau musuh negara adalah imperialisme dan feodalisme. Sedang kaum tani bukan hanya bukan musuh revolusi, melainkan sokoguru atau tenaga pokok revolusi. Tentang siapa jang musuh negara dan harus ditangkap, kenjataan menundjukan bahwa tuantanah² telah membangkang terhadap UU-PBH dan UUPA, telah menggelapkan dan memalsukan luas tanah mereka, telah mengadakan „salahbagi” dan

„hibah“ palsu. Mereka sudah menipu negara dengan membikin surat² bersegel jang palsu. Djuga kaum kabir telah mentjoleng harta-kekajaan negara dan merusak alat² produksi. Bukan kaum tani jang melanggar undang² negara dan harus ditangkap, melainkan tuantanah djahat, kaum kapitalis birokrat dan setan² desa lainnja serta „Masjumi gaja baru“, „DI gaja baru“ dan „PSI gaja baru“ jang terus-menerus merongrong negara dengan propaganda djahat dan kegiatan² subversifnja. Oleh karena itu djuga dalam hal ini kaum tani difihak jang benar dan tidak bersalah. Sampai sekarang kaum tani masih terlalu lunak dalam mengganyang perbuatan² setan² desa jang melanggar undang² negara jang madju dan anti-Republik Indonesia.

Mereka mengatakan : „BTI anti-agama dan anti-Pantjasila“. Mengenai soal ini, kaum Komunis perlu memberikan djawaban, bahwa setan² desalah jang telah memperalat agama dan Pantjasila untuk memetjah-belah persatuan nasional guna merobohkan RI dan tudjuan² jang djahat lainnja. Lagi pula jang membakar mesdjid² dan mengkorup kotum hadji bukanlah anggota² BTI atau PKI, tetapi setan² desa dan pendjahat² lain jang mengaku beragama dan ber-Tuhan. Kalau makin lama makin kurang djumlah kaum tani jang mendengarkan chotbah dilanggarlanggar dan mesdjid-mesdjid adalah karena tempat tersebut sering dijadikan mimbar tokoh-tokoh „Madjelis Ulama“, jaitu „Masjumi gaja baru“ atau „DI gaja baru“. Dalam hubungan dengan ini BTI dan kaum tani djuga benar dan tidak salah. BTI dan kaum tani menerima dan mempertahankan Pantjasila sebagai alat pemersatu seluruh bangsa. Kebenaran BTI dibuktikan oleh makin meluasnja organisasi BTI di-desa² Djawa Barat. Djustru penghisap² besar didesa dan orang² bekas gerombolan DI-TII jang terang²an menentang atau mensalahgunakan Pantjasila. Kaum tani masih terlalu lunak dalam mengganyang kaum Pantjasilais-munafik dan Manipolis-munafik di-desa².

Mereka mengatakan : „Kaum tani mensabot Koperasi Pembelian Padi (KPP)“. Kaum Komunis mengemukakan kenyataan, bahwa dalam melakukan pembelian padi telah terdjadi paksaan dan pensalahgunaan. Buktinja jalah, bahwa achirnja pembelian padi setjara paksa telah dihentikan. Sedang KPP kenjataanja adalah koperasi palsu jang dipaksakan dari atas oleh penguasa reaksioner Djawa Barat, jang samasekali tidak mewakili kepentingan kaum tani.

Hanja namanja sadja „Koperasi Pembelian Padi“, tetapi kenjataanja adalah „Koperasi Perampas Padi“, dan demikianlah badan ini dinamakan oleh petani² Djawa Barat. Adalah hak kaum tani untuk meminta pertanggungan-djawab terhadap penggunaan uang negara untuk pembelian padi. Djuga dalam hal „koperasi“ ini kaum tani berada difihak jang benar dan samasekali tidak salah. Kaum tani selama ini masih terlalu lunak dalam mengganyang penipu² dalam pembelian padi dan dalam koperasi palsu.

Mereka mengatakan : „PKI dan BTI tukang palsu fakta dengan mengatakan bahwa UUPBH dan UUPA matjet“. Tentang ini tidak perlu komentar, karena fakta² hasil riset berbitjara sendiri. Medja² kaum birokrat didaerah dan dipusat boleh penuh dengan laporan² palsu tentang „lantjarnja“ pelaksanaan UUPBH dan UUPA, tetapi fakta² membantah semuanja itu. Djadi djelaslah siapa jang memalsu fakta, pasti bukan PKI, bukan BTI dan bukan kaum tani.

Dengan masuknja PKI dan BTI serta gerakan revolusioner pada umumnja ke-desa², kebangkitan kaum tani mendukung politik revolusioner makin menghebat. Kejakinan jang sudah ber-abad² ditanamkan oleh klas² penghisap, bahwa „orang bodoh tidak mungkin djadi pintar“ dan „orang ketjil tidak bisa djadi besar“, ber-angsur² makin terkikis dari fikiran kaum tani. Berurusan dengan polisi tidak lagi dianggap otomatis bersalah, malahan tidak sedikit kaum tani jang turun-naik pengadilan dengan mendapat simpati luas sampai djauh diluar batas desanja, mereka dikalungi bunga dan sadjak² pudjaan ditjiptakan dan dideklamasikan untuk mereka. Hasil² riset-menundjukan bahwa dengan kebangkitan kaum tani banjak hal jang baik dan madju dapat ditjiptakan oleh kaum tani. Dengan kesedaran politik revolusioner dikalangan kaum tani dan nelajan, kedjahatan, kemesuman dan kebedjatan moral berangsur² dilawan dan ditelandjangi di-desa². Dengan bangkitnja gerakan revolusioner, kaum tani dan nelajan jang selama ber-abad² ditempatkan oleh setan² desa dalam kedudukan „serba salah“ mendjadi „serba benar“.

Kaum tani makin hari makin tadjam penglihatannja dalam mangikuti sikap partai² dan tokoh² perorangan serta segera mengenal siapa² jang berdiri didepan kaum tani dan memimpinnja, siapa² jang berdiri dibelakang atau disamping kaum tani sambil mentjela dan me-maki²nja, dan

siapa² pula jang berdiri ber-hadap²an dengan mereka dengan sangkur terhunus melawan kaum tani.

Segala usaha dapat ditjoba untuk membendung gerakan tani Djawa Barat, baik dari Djakarta, dari Bandung maupun dari semua desa Djawa Barat. Tetapi dengan kaum tani jang sudah sadar politik dan sudah bangkit dengan tekad revolusioner jang bulat, tidak ada bendungan jang dapat menahan ofensif Manipol ke-desa².



Dalam rangka riset di Djawa Barat banjak diadakan rapat² ketjil antara D.N. Aidit dengan petugas² riset. Gambar diatas adalah salahsatu rapat tersebut.

VIII

KEBUDAJAAN DAN MORAL REVOLUSIONER DIKALANGAN KAUM TANI DAN NELAJAN

Kehidupan kebudayaan dan moral di-desa² Djawa Barat tidak lepas dari pengaruh perpaduan sistim eksploitasi feodal dan imperialis serta masuknja kapitalisme. Tuan-tanah² dan tanikaja² lapisan atas mendirikan gedung² baru, banjak jang model „djengki”, untuk tempat-tinggal, membeli mobil atau kendaraan bermotor lainnja dan alat² rumah tangga jang modern, termasuk transistor² dan pick-up. Kebudayaan neo-kolonialis menjusup kedesa dalam bentuk madjalah² hiburan jang banjak terbit di-kota², musik ngak-ngik-ngok serta irama² India dan Malaja lewat transistor², pick-up² maupun orkes² jang dibiajai oleh sementara tuantanah, tanikaja lapisan atas, kabir dan penguasa² djahat, jang digunakan sebagai hiburan para tamu pada pesta² chitanan, perkawinan dan kesempatan² lain. Pendukung² pokok dari kebudayaan neo-kolonialis, jaitu kaum kabir, -koruptor dan kaum komprador pada umumnja bertempat tinggal menetap dikota, sehingga desa belum mengenal malam² dansa-dansi, seperti malam² twist dan lain².

Moral bedjat, jang setjara relatif berkembang dalam masjarakat desa dewasa ini, seperti beristeri banjak dan sering² tukar isteri, pelatjuran tertutup, perdjudian, mabok²an, umumnja terbatas dikalangan tuantanah, tanikaja tingkat atas, penguasa² djahat dan setan² desa lainnja. Dalam hal pelatjuran dikalangan buruhtani dan tanimiskin, adalah sebagai akibat kemerosotan ekonomi, sedang wanita-wanita tani jang terdjerumus kedjurang pelatjuran ini mentjari pasaran di-kota² dan mendjadi terlepas dari masjarakat desa. Kebanjakan diantara mereka, disamping karena kesulitan ekonomi, djuga karena korban perkawinan kanak² jang bertjerai muda, sebagai mangsa tuantanah, tanikaja, lintahdarat dan setan² desa lainnja.

Disementara desa Djawa Barat, perdjudian dikalangan sebagian kaum tani dan nelajan merupakan kebiasaan

djelek sebagai warisan zaman kolonial. Kebiasaan ini, jang sedjak dulu² dipupuk oleh kaum penghisap, adalah sendjata kaum penghisap untuk meratjuni kaum tani, untuk membikin kaum tani tetap terikat pada mereka dan dengan demikian dapat menguasai tenagakerdja dan produksinja.

Dominasi sisa² feodalisme didesa mengakibatkan sangat terbelakangnja kaum wanita tani. Tjara hidupnja dan alam pikirannja pada umumnja sangat sederhana, dipengaruhi tachajul dan mistik. Mereka mendjadi korban diskriminasi dilapangan hak waris, perkawinan dan pertjeraan, korban perkawinan dibawah umur, poligami, korban kebedjatan kcbudajaan dan moral sisa² feodal.

Anak² djuga turut mendjadi korban. Anak² buruhtani dan tanimiskin kebanyakan tidak bisa menjelesaikan Sekolah Dasar karena tekanan ekonomi. Anak² jang mestinja mendapat asuhan taman kanak² berkeliaran didesa dan terlantar samasekali dimusim turun kesawah.

Peranan organisasi massa wanita revolusioner penting sekali artinja dalam meningkatkan deradjat kaum wanita dan anak² desa. Meningkatkan deradjat kaum wanita tani dan anak² ini berarti meningkatkan kebudajaan didesa.

Untuk membela kaum tani dan nelajan serta mengembangkan kesenian Rakjat, dalam periode sebelum dan sesudah revolusi agraria, di-desa² harus dikembangkan gerakan kebudajaan revolusioner, jang mentjerminkan kebangkitan kaum tani dan nelajan dalam bentuk² kesenian sebagai manifestasi perdjjuangan melawan eksploitasi feodal. Pengembangan gerakan kebudajaan revolusioner dan pengganjangan terhadap ketjabulan dalam hiburan murah jang relatif berpengaruh didesa sekarang ini harus langsung ditanggulangi oleh Partai dan ormas² revolusioner.

Revolusi Agustus 1945 memang telah membawa perubahan-perubahan didesa, terutama dalam meningkatkan kesedaran politik maupun moral kaum tani. Tetapi khusus di Djawa Barat situasi revolusioner dalam gelombang Revolusi Agustus 1945 terhalang perkembangannja karena tentara kolonial dan kaum feodal serta komprador di Djawa Barat dalam waktu singkat dapat menguasai kembali daerah ini. Tradisi „Sarekat Hedjo” sebagai aparat kolonial diteruskan oleh kekuatan kontra-revolusi DI-TII, sehingga banjak desa dihambat perkembangannja.

Akibat tidak lantjarnja komunikasi, maka Djawa Barat mempunyai variasi perkembangan jang tidak sama, seperti

daerah² antara Djakarta-Bandung jang relatif maju, dibandingkan dengan daerah² tanah partikelir seperti Tjiasem-Pamanukan ataupun Banten. Bahkan daerah Banten Selatan merupakan daerah jang hampir terisolasi. Djuga di Djawa Barat terdapat berbagai variasi sukubangsa sebagai akibat historis dan geografis, misalnja kechususan sukubangsa didaerah Tjirebon membentang kebarat dipesisir utara, daerah Priangan Selatan dan Barat, serta daerah Banten, dimana terdapat suku² Sunda dan Djawa, daerah² sekitar Djakarta Raja sebagai kota tjampuran berbagai sukubangsa memberikan pengaruh tersendiri terhadap daerah sekitarnja. Demikian pula daerah sekitar Tangerang mempunyai beberapa kechususan sebagai hasil perkembangan pengintegrasian kaum tani keturunan Tionghoa dengan kaum tani setempat.

Merembesnja sistim eksploitasi kapitalis ke-desa² Djawa Barat sampai batas tertentu mengubah fikiran dari „tidak zakelijk” mendjadi „agak zakelijk” karena pengaruh peranan uang, meskipun belum sampai membongkar sisa² feodalisme seluruhnja. Merembesnja hubungan kapitalis dan pengaruh gerakan revolusioner dizaman kolonial dan pengaruh Revolusi Agustus 1945 telah membuka kemungkinan bagi tumbuhnja fikiran² baru, djuga tentang emansipasi wanita. Kehendak untuk maju ditjerminkan oleh semangat pemuda² tani untuk beladjar, djuga pemuda² dari keluarga tanimiskin dan buruhtani. Pada waktu sekarang kesempatan bersekolah bagi pemuda² buruhtani dan tanimiskin masih sangat terbatas, oleh karena itu mereka sangat berterimakasih pada Partai dan ormas² revolusioner jang mengadakan kursus² PBH, Kursus² Rakjat, Panti² Pengetahuan Rakjat dsb. Pemuda² jang bersekolah lanjut, umumnya anak² tuantanah, tanikaja dan tanisedang, disatu fihak memberikan pengaruh positif terhadap perubahan fikiran didesa, sedangkan difihak lain pemuda² itu-pun membawa pengaruh kebudajaan neo-kolonialis ke-desa². Mereka ikut mendjalin kebudajaan dekaden feodal dan burdjuis didesa dengan kebudajaan dekaden burdjuis kota. Sikap maju terhadap ilmu dan beladjar ditundjukan oleh desa² Djawa Barat jang relatif ekonomis agak baik, dimana kaum tani mendirikan sendiri bangunan² untuk Sekolah Dasar, karena kaum buruhtani dan tanimiskin ingin memajukan anaknja, sesuai dengan kemampuan ekonomisnja. Pengaruh² ilmu, meskipun masih belum

meluas dan mendalam kedesa, telah membawa kemadjuan pikiran dikalangan kaum tani, termasuk semakin berkurangnya kepertajaan terhadap tachajul. Tetapi difihak lain, kaum tuantanah dan kaum reaksioner didesa berkepentingan untuk mempertahankan tachajul dalam hubungan dengan kepentingan penghisapannya terhadap kaum tani. Misalnja, dengan tjara² yang menggelikan seorang tuantanah didaerah kabupaten Bandung telah membajar seorang tjenténg jang berbadan tegap supaja ber-pura² marah kepada tuantanah dihadapan kaum tani. Begitu ditampar oleh tuantanah, tjenténg itu ber-pura² gemetar dan djatuh pingsan, supaja kaum tani mengira bahwa situantanah itu sakti. Tetapi rahasia ke-„sakti“-an ini segera tertelanjungi ketika dalam suatu aksi situantanah gemetar seperti kutjing kehudjanan dan lari tungganglanggang, djatuh tergelintjir dari galangan masuk kedalam lumpur sawah, karena dari satu djurusan diburu oleh kaum buruhtani laki² jang kurus², sedangkan dari djurusan jang sebaliknya dihadang oleh wanita² tani. Makin berkembang gerakan revolusioner didesa makin banjak tachajul jang terbongkar.

Adat istiadat tatatjara slamatan² djuga makin berkurang, baik karena akibat ketidakmampuan ekonomis maupun karena gerakan revolusioner. Peningkatan kemelaratan didesa menjebabkan gelombang urbanisasi, terutama dari daerah² jang periodik mengalami patjeklik.

Untuk mempertahankan kedudukannya, supaja tetap terpandang, kaum tuantanah dan setan² desa lainnja telah menggunakan kesenian jang tadinja berasal dari kaum tani sambil mentjabulkannya. Kesenian² Rakjat, misalnja wajang golek jang merupakan sandiwara boneka jang sangat digemari Rakjat, telah mereka tjabulkan dengan dja-lan „membeli suara sinden“, sehingga dengan demikian mendesak kedudukan dalang sebagai orang pertama dan menondjolkkan kedudukan sinden jang menggiurkan mereka, sekalipun suaranya tidak seberapa. Mereka djuga berbuat merusak ronggeng, tajub, dongbret dan sebangsanja. Kaum reaksioner, djuga berusaha memasukkan kebudayaan neo-kolonialis ke-desa². Untuk itu antara lain kaum reaksioner di Djawa Barat mengorganisasi apa jang dinamakan badan kebudayaan „Puspadaya“ jang menjebarkan faham „seni untuk seni“, „seni harus bersih dari politik“, sesuai benar dengan haluan „Manikebu“, jang dalam kenjataan-

nja mempertahankan kebudayaan feodal-neo-kolonial dan melawan perkembangan kebudayaan revolusioner.

Kebedjatan moral seperti perdjudian, pentjabulan kesenian, kemunafikan adalah sisa² feodalisme dan akibat pengaruh burdjuasi kota jang mengadakan kontak dengan burdjuasi dan kaum feodal didesa.

Disamping masih bertjokolnja kebedjatan moral di-desa², sekarang sudah ada dan tumbuh kesedaran baru sebagai hasi Revolusi Agustus 1945 dan makin meluasnja PKI dan BTI serta gerakan revolusioner lainnja didesa. Adanja PKI dan BTI serta ormasrev² lainnja didesa, telah memberikan darah segar dalam kehidupan dan sikap kaum tani, sehingga sampai batas² tertentu telah memberikan pukulan terhadap adat istiadat feodal, ketachajulan, butahuruf, kesenian feodal dan tjabul serta lain²nja.

Demikian djuga perdjudian, pelatjuran dan perkelahian² antar petani, sebagai hasil politik adu-domba dan petjah-belah setan² desa, ber-angsur² melenjap. Bahkan di-desa² Djawa Barat sekarang timbul moral baru dimana sifat djelek dilukiskan sebagai tuantanah, kabir dan imperialis, sebagai setan² desa. Kaum tani sudah menjedari bahwa tuantanah, kabir dan imperialis tidak hanja memonopoli tanah² garapan jang terbaik, tetapi djuga memonopoli segala matjam kedjahatan, kemesuman, ketjabulan, kebedjatan moral dan kemaksiatan, seperti permaduan, perdjudian, pelatjuran, adu ayam, pemborosan, mabok²an dsb-nja, jang samasekali asing bagi buruhtani dan tanimiskin. Kalau dulu semua kedjahatan dan kemesuman setan² desa dapat ditutup dengan satu kali „naik hadji“, sekarang hati jang hitam dan tangan jang kotor sudah tidak bisa lagi ditutup²i dengan memperalat agama. Njanjian² patriotik dan revolusioner mulai terdengar dan meluas di-desa² Djawa Barat, djuga di-daerah² dimana pernah meradjalela „Sarekat Hedjo“ dan DI-TII. Sedang kegiatan kesenian didesa sudah banjak jang isinja progresif. Kesemuannya ini membantu meningkatkan kesedaran politik kaum tani.

Bentuk² kesenian seperti reog, pentjak-silat, wajang-golek dan wajang-kulit dengan isi revolusioner seperti lakon „Astradjingga Djuta“, ketjapi-suling, tari klasik dan modern seperti topeng dan tari-tani, sandiwara, bebodoran dll telah memainkan peranan jang sangat positif.

Di-tempat² dimana gerakan revolusioner sudah kuat, kesedaran politik dikalangan kaum tani dan nelajan me-

tingkat. Ini mendorong maju sikap² baru terhadap pendidikan, adat-istiadat, tachajul maupun kesenian. Oleh karena itu sikap yang lebih sadar dan lebih sistimatis memperbaiki pekerdjaan agitasi-propaganda, pendidikan pengetahuan umum dan pemberantasan butahuruf dengan pemeliharaan melalui memperbanjak lektur lulusan PBH dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta kegiatan sastra dan seni revolusioner akan memberikan bantuan penting terhadap pengrevolusioneran fikiran penduduk desa.

Memperbanjak kegiatan sastra dan seni revolusioner dengan mengkombinasikan dengan pekerdjaan difront politik dan ideologi serta dengan aksi² kaum tani dan nelajan, terutama aksi² sefihak melawan tuantanah dan setan² desa lainnja, akan mengubah wadjaah kebudayaan didesa. Pengalaman Djawa Barat membuktikan bahwa pembentukan sanggar² didesa adalah mungkin dan telah sangat membantu dalam mendorong maju kegiatan tersebut.

Kelemahan burdjuasi nasional Indonesia, yang belum sampai melahirkan burdjuasi industri yang memproduksi „seni barangdagangan” setjara besar²an, seperti misalnja di Djepang, membuat desa² pada pokoknja tetap didominasi oleh sisa² kebudayaan lama. Sifat agraris dan keterbelakangan komunikasi disatu fihak menghambat perkembangan, sedangkan difihak lain ketidakmampuan burdjuasi nasional Indonesia menjebabkan djuga ketidakmampuan menghantjurkan kebudayaan Rakjat di-desa². Faktor tradisi kesenian yang kuat didaerah Djawa Barat djuga merupakan faktor yang memungkinkan adanja daja-tahan yang kuat disamping tradisi perdjjuangan anti-kolonialisme yang sedjak awal² abad ke-20 sudah bersinggungan dengan desa (Sarekat Islam, Sarekat Rakjat, dll).

Pada umumnja situasi didesa sangat memungkinkan gerakan revolusioner tampil untuk memimpin perdjjuangan kebudayaan dan menjdjakannja sendjata ditangan kaum tani dan nelajan, baik dalam perdjjuangan untuk pendemokrasian dibidang politik maupun perdjjuangan untuk mendapatkan tanah garapan sampai kepada pelaksanaan landreform yang radikal. Ketjakapan kaum Komunis mengembangkan tradisi kesenian yang baik dengan semangat revolusioner dewasa ini akan merupakan bantuan besar dalam memperkuat front politik dan front ideologi di-desa².

IX

LAWAN KOPERASI PALSU, DJADIKAN KOOPERASI SENDJATA DITANGAN KAUM TANI DAN NELAJAN

Bahan² mengenai perkembangan koperasi di Djawa Barat yang didapat dari hasil² riset menundjukkan bahwa pada umumnja gerakan koperasi Rakjat pekerdja belum tjukup berkembang dan bahwa koperasi² yang sudah ada itu kebanyakan dikuasai oleh klas² penghisap, seperti tanikaja, tengkulak dan bahkan oleh tuantanah, kapitalis birokrat dan didaerah nelajan oleh djuragan. *Koperasi ditangan klas² penghisap merupakan alat monopoli yang djahat, alat untuk melakukan penghisapan terhadap kaum tani-sedang, tanimiskin dan buruhtani serta kaum nelajan pekerdja.*

Beberapa tjontoh mengenai koperasi² didesa yang dikuasai oleh kaum penghisap dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. KOPERASI DESA KEMANG, KETJAMATAN BO-DJONGPITJUNG, KABUPATEN TJLANDJUR

Koperasi desa ini dibentuk dari atas, jaitu dengan instruksi pedjabat atasan yang sekaligus mengadjukan susunan pengurus yang terdiri dari tanikaja dan tengkulak. Koperasi ini dan susunan pengurusnja seharusnya disahkan d/dam rapat anggota koperasi. Tetapi kenjataannja tidak demikian, melainkan disahkan setjara formil dalam rapat desa, karena semua penduduk desa setjara otomatis dianggap mendjadi anggota. Tjara demikian ini bertentangan samasekali dengan prinsip² koperasi, terutama dengan prinsip keanggotaan sukarela dan demokratis.

Koperasi ini merupakan pembeli tunggal dari tiga djenis hasil bumi, jaitu padi, djagung dan gula aren, dengan harga yang ditetapkan dibawah harga pasar bebas. Djika ada petani yang mendjual hasilbumi itu tidak kepada koperasi, maka kelebihan harga yang diperolehnja harus di-

setorkan kepada koperasi. Koperasi ini dapat melakukan kontrol atas pendjualan hasil bumi dengan membentuk sematjam regu pengawas terdiri dari 24 orang, antara lain terdiri dari djawara-djawara djahat, Hansip dan Bintara Pembina Wilayah. Djika petani kedatangan tidak mendjual hasilbuminja kepada koperasi, maka ia sering dipukuli oleh pengawas-pengawas tersebut. Tanikaja dan tengkulak jang menguasai koperasi ini mendapat keuntungan besar dalam mendjual hasil bumi jang dapat dikumpulkan setjara monopoli kepasar luar desa, biasanya kepada tengkulak² dikota kabupaten. Tetapi koperasi hanya mendapat keuntungan sedikit dan inipun tidak mudah dibuktikan, karena tidak terbukanya koperasi itu untuk diperiksa oleh penduduk sekalipun mereka otomatis dianggap anggota koperasi. Disamping melakukan monopoli pembelian hasil bumi dan pendjualannya, koperasi ini djuga mendjual barang² konsumsi kepada penduduk dengan harga² jang umumnya lebih mahal daripada pedagang² pengetjer didesa, sedangkan persediaan barang² itupun sangat tidak lengkap.

2. KOPERASI PERIKANAN LAUT MISAJA MINA, DESA ERETAN WETAN, KETJAMATAN KANDANGHAUR, KABUPATEN INDRAMAJU

Koperasi ini dikuasai oleh para djuragan jang merupakan penghisap² besar kaum nelajan. Semua nelajan jang bekerdja pada djuragan² dipotong setjara otomatis sebagian dari penghasilannya sebagai tjélengan koperasi, tetapi jang sebenarnya mendjadi anggota koperasi hanyalah djuragan² sadsja. Kaum buruh nelajan dihisap setjara hebat oleh djuragan, dan penghisapan itu dilakukan dibawah bendera koperasi. Misalnja, ada ketentuan bahwa kuranglebih 22% dari hasil penangkapan ikan disetorkan kepada koperasi dengan nama tjitjilan utang kepada djuragan, simpanan manasuka, simpanan wadjib dll, tetapi dalam praktek dan hakekatnja pungutan² tsb sebagian besar mendjadi bagian djuragan perahu. Hasil penangkapan ikan setelah dipotong ongkos lelang 5%, koperasi 22% dan 10% lagi untuk sematjam ongkos eksploitasi (beras bekal dan perbaikan djaring atau djala jang seharusnya ditanggung oleh djuragan), sisanya ditentukan pembagiannya untuk djuragan kira² 18%, djurumudi dan djuruarus kira² 15% dan se-

lebihnja kira² 30% baru untuk 14 orang buruhnelajan dari satu perahu. Maka sesungguhnya bagian djuragan bukannja 18% tapi lebih dari 40%.

Selain penghisapan melalui kesatuan kerdja perahu² dan kesatuan organisasi koperasi, djuragan² bersama dengan tengkulak² dengan melalui pelelangan, melakukan tekanan harga pada hasil penangkapan ikan dengan setjara praktis memonopoli pembelannya.

Salahseorang pengurus koperasi palsu ini, ialah R. R. djuga djuragan, tuantanah dan tuangaram. Ia memiliki 4 buah perahu besar lengkap dengan alat² penangkap ikan jang ditaksir berharga Rp. 1.400.000,—, tanah pegaraman seluas 1,5 ha dan tanah G.G. seluas 5 ha. Disamping itu ia memiliki tanah lebih di-desa² Bugel, Bongas, Ilir jang disewakan dan djuga memiliki perusahaan dagang ikan dengan kedok koperasi pembelian ikan. Dan lagi, ia masih mendjabat djuga sebagai seorng pengurus „Koperasi Garam Rakjat”.

3. KOPERASI GARAM RAKJAT, DESA ERETAN WETAN, KETJAMATAN KANDANGHAUR, KABUPATEN INDRAMAJU

Koperasi ini dikuasai oleh tuan-tuan pegaraman jang mendjadi pengurusnja dan melalui sistim monopoli hasil garam Rakjat menetapkan harga pembelian lebih rendah dari pasar bebas. Koperasi ini djuga berusaha memonopoli ikan untuk pengasinan dan melakukan penghisapan terhadap kaum tani pegaraman dengan sistim idjon dan gadai empang pegaraman sehingga akhirnya empang² itu mendjadi milik mereka, dan terhadap buruhtani pegaraman jang menerima upah jang sangat rendah.

Koperasi palsu lain jang djuga tjukup dikenal oleh Rakjat tentang praktek²nya jang djahat ialah „Koperasi Pembelian Padi” (KPP) jang terdapat dibanjak desa. Koperasi ini dikendalikan oleh kaum kapitalis birokrat.

Adalah tidak mengherankan bahwa Rakjat tidak suka pada koperasi² palsu itu. Koperasi² itu merugikan kepentingan Rakjat pekerdja dan hanya menguntungkan kaum tuantanah dan kapitalis birokrat. Koperasi sematjam itu lebih patut dinamakan „koperasi feodal-kapitalis-birokrat”. Didaerah Indramaju perpaduan feodalisme, kapitalisme dan birokrasi itu oleh umum dikenal dengan perpaduan

tiga huruf pertama dari nama tiga tokoh, yaitu „DDT”, yang sungguh² merupakan setan dasamuka Indramaju.

Disamping koperasi² palsu alat monopoli kaum penghisap, Rakjat pekerdja didesa Djawa Barat djuga telah mentjiptakan sebagai usaha gotongrojong dan koperasi yang sungguh² mengabdikan pada kepentingan Rakjat pekerdja. Diantarannya dapat disebut :

1. LUMBUNG² PATJEKLIK DAN ARISAN²

Lumbung patjeklik dan arisan dapat dikatakan merupakan tunas dari koperasi kredit dan terbukti telah dapat berdjalan baik diberbagai desa. Lumbung² patjeklik dan arisan² ini terutama dapat membantu kaum tani dalam melawan lintahdarat dan dalam mengatasi kesulitan²nya pada masa patjeklik. Pengalaman² yang baik dan pengalaman-pengalaman yang gagal perlu dipeladjar dengan baik untuk dapat menemukan bentuk² kegotongrojongan yang lebih baik dalam bidang perkreditan.

2. USAHA LELIURAN (ARISAN ATAU SIMPANPINDJAM), DESA SUKAMADJU, KETJAMATAN TJIMANGGIS, KABUPATEN BOGOR

Anggotanya 124 orang, simpanan wajib tiap minggu Rp. 10,—, dibuka tiap bulan dan memberi pindjaman kepada anggota yang memerlukan dari Rp. 500,— sampai Rp. 1.000,— dengan bunga 5% sebulan. Anggota yang mendapat pindjaman menggunakannya untuk membuat bilik. Usaha leliuran ini menjediakan djuga dana bantuan untuk anggota² yang kematian.

3. USAHA GOTONGROJONG, DESA SUKATANI, KETJAMATAN TJIMANGGIS, KABUPATEN BOGOR

Didirikan sedjak tahun 1948 beranggota 100 orang, dengan mengumpulkan modal sebesar Rp. 40,— membeli dua ekor sapi. Kekajaan usaha gotongrojong ini sekarang sudah mendjadi tiga ekor sapi, 7 ekor kambing, 2 ekor kerbau, 2 buah timbangan, 4 buah lampu petromax, 300 buah piring, satu bangunan Balai Pertemuan. Dengan hasil beras perelek diperoleh 2 ekor kambing. Keuntungan bagi anggota² usaha gotongrojong ini jalah dapat menggunakan

kerbau dan sapi untuk meluku, berhutang kambing, mendjam alat² seperti piring, petromax dan menggunakan Balai Pertemuan.

4. KOOPERASI² KONSUMSI

Diberbagai desa terdapat koperasi² konsumsi yang pada mulanya sudah agak berkembang, tapi kemudian mengalami kehantjuran sebagai akibat memburuknya keadaan ekonomi dan ketidakdjudjuran pengurus²nya.

Beberapa gambaran yang dikemukakan diatas sudah tentu belum mentjerminkan setjara lengkap keadaan koperasi-koperasi sedjati di-desa² Djawa Barat. Masih ada pula koperasi² keradjinantangan, koperasi peternakan dll, yang tidak semua djelek dan bahkan ada yang sungguh² mendjadi alat Rakjat pekerdja. Tetapi kesimpulan yang dapat diambil jalah bahwa di Djawa Barat sekarang koperasi-koperasi pada umumnya merupakan koperasi² palsu alat monopoli kaum penghisap, bukan koperasi yang berwatak dan untuk kepentingan Rakjat pekerdja.

Kaum tanisedang dan tanimiskin, kaum nelajansedang dan nelajanniskin, dan djuga kaum buruhtani dan buruh-nelajan harus mengangkat tinggi² pandji koperasi sedjati guna melawan penghisapan yang makin menghebat dari tukang idjon, lintahdarat, tengkulak djahat, tuantanah djahat, djuragan djahat dan kakitangan kaum kapitalis birokrat didesa. Disamping itu, kaum tanimiskin dan tanisedang serta nelajanniskin dan nelajansedang djuga harus mengibarkan pandji koperasi sedjati untuk peningkatan hasil pertanian dan hasil penangkapan ikan mereka.

Setjara khusus, berhubung dengan hasil perdjuaan untuk tanah garapan, djuga di Djawa Barat telah bermuntjulan *tanisedang baru* yang mendapat tanah dari aksi² menggarap tanah bekas perkebunan, tanah bekas kehutanan dan sedikit dari pelaksanaan UUPA, disamping tanisedang lama dan tanisedang transmigrasi lokal. Mereka semua memerlukan pengkoperasian, selain untuk mempersatukan mereka dalam melawan penghisapan, djuga untuk menghambat perkembangan spontan mereka mendjadi klas penghisap atau kedjatuhan kembali dengan lepasnya tanahgarapan mereka. Djuga dilihat dari segi politik dan ideologi, mereka harus dikoperasikan agar mereka tetap berbaris madju dalam gerakan tani revolusioner.

Praktek koperasi² palsu dan perbuatan² pengurus koperasi yang tidak djujur dan tidak tjakap telah banjak menjetjewakan massa kaum tani dan nelajan sehingga sampai batas² tertentu telah melahirkan sikap atjuh-tak-atjuh atau mentjemooahkan terhadap koperasi. Makaitu kaum Komunis dan kaum revolusioner lainnja harus tampil kedepan untuk menjelamatkan namabaik koperasi. Kita harus membangkitkan semua golongan yang tjinta koperasi sedjati untuk melawan koperasi palsu dan membangun koperasi² Rakjat pekerdja.

Perbuatan² djahat dan tjurang dari kaum penghisap didalam koperasi² harus ditelandjangi, mereka harus diusir dan diganti dengan pimpinan yang terdiri dari orang² Manipolis sedjati, djujur dan tjakap, mewakili kepentingan Rakjat pekerdja. Di-desa² yang belum ada koperasinja perlu setjara kreatif dibentuk djenis² koperasi yang diperlukan.

Ketentuan² dalam undang² koperasi yang menghambat pengembangan swadaja massa perlu diperdjuangkan untuk diubah.

Usaha² gotongrojong yang bersifat salingbantu dan saling-menguntungkan dikalangan Rakjat pekerdja perlu dikembangkan. Sekalipun usaha² itu tidak mempunyai nama resmi „koperasi“, intisari usaha² itu sepenuhnya sesuai dengan djiwa koperasi. Dalam pada itu harus dilawan usaha² menjalahgunakan tradisi dan semangat gotongrojong Rakjat untuk kepentingan klas penghisap.

Tunas² koperasi kredit seperti lumbung patjeklik, lumbung desa, lumbung bibit, arisan² dls mempunyai perspektif baik untuk dikembangkan, sedangkan RSB² (Regu² Saling Bantu) sebagai tunas koperasi produksi pertanian djuga sudah mempunyai beberapa pengalaman baik untuk dikembangkan. Koperasi produksi dikalangan kaum tani, yang anggota²nja terdiri dari tanisedang, tanimiskin dan djuga dimana mungkin buruhtani, penting untuk meningkatkan produksi kaum tani. Agar koperasi itu bisa berdjalan lantjar diperlukan koperasi² kredit yang dapat menjediakan modal kerdja. Penghimpunan dana untuk koperasi kredit disamping dari Rakjat pekerdja harus djuga diusahakan penghimpunan dana dari golongan berpunja yang demokratis.

Dengan pengertian yang djelas, bahwa gerakan koperasi tidak dapat dipisahkan dari gerakan tani revolusioner, dan

bahwa pemetjahan masalah tani dan nelajan serta tukang keradjinantangan achirnja adalah pengkoperasian, maka perlu dilakukan tindakan² dengan gerakan pendidikan yang lebih intensif dikalangan kader² revolusioner untuk :

a). Mendjernihkan dan membulatkan pengertian tentang garis politik PKI mengenai koperasi Rakjat pekerdja;

b). Menguasai garis dalam menghadapi koperasi² yang sudah ada dan yang dikuasai oleh kaum penghisap, dan dalam membangun Koperasi² Rakjat Pekerdja (KRP²) dalam hubungannja dengan peraturan² pemerintah;

c). Menguasai pengetahuan teknis koperasi (peraturan koperasi, ekonomi perusahaan, pembukuan, dsb).

Dengan bekerja berplan kaum Komunis harus mempersiapkan kader² yang ideologis baik, kader² revolusioner yang djujur dan tjakap untuk mensukseskan perdjuangan melawan koperasi² palsu dan mendjadikan koperasi sendjata ditangan kaum tani dan nelajan !

LAMPIRAN I

PEMBAGIAN KLAS^a DIDESA ERETAN WETAN, KETJAMATAN KANDANGHAUR, KABUPATEN INDRAMAJU

- Djumlah Penduduk :*
Djumlah penduduk didesa Eretan Wetan ada 4.249 djiwa, diantaranya orang dewasa berdjumlah 3.000 djiwa jang terdiri dari 1.653 orang wanita dan 1.347 orang pria.
- Sifat desa Eretan Wetan:*
Karena desa Eretan Wetan terletak ditepi pantai utara Djawa, maka desa ini adalah desa nelayan dan desa pertanian sekaligus. Diantara penduduknja terdapat tuantanah jang sekaligus djuga tuannelajan (djuraganperahu). Separah dari penduduk terdiri dari buruhnelajan. Tanimiskin sudah selesai mengerdjakan sawahnja banjak jang djuga turun kelaut mentjari tambahan penghasilan dari penangkapan ikan sebagai buruhnelajan.
- Pembagian klas^a didesa Eretan Wetan:*

Tuantanah	3
Tuannelajan (dua diantaranya djuga tuantanah) ...	11
Tanikaja	13
Nelajankaja	15
Tanisedang	64
Nelajansedang	37
Tanimiskin	300
Nelajanimiskin	250
Buruhtani	100
Buruhnelajan	1.500
Pedjabat agama (3 guru agama dan 5 orang kjai jang hidup se-mata ² dari murid mereka) ...	8
Pedagang (terdiri dari pemilik toko 14	
pemilik warung besar	50
pemilik warung ketjil 40)	104
Pekerdja merdeka atau tukang ^a (terdiri dari	
tukang tjukur	3
tukang djahit	7
tukang kemasan 4)	14
Pengusaha (tenun, keradjinantangan bambu dan perikanan)	11
Buruh (buruh perusahaan	21
buruh angkutan	15
pegawai perikanan 20)	56
Lintahdarat	12
Pelatjur	14
Lain ^a (umumnja wanita rumahtangga)	488
Djumlah semuanya	3.000

LAMPIRAN II

ANGGARAN BELANDJA BURUHTANI, TANIMISKIN, TANISEDANG DAN TANIKAJA DIDESA TEGALSARI, KETJAMATAN WANARADJA, KABUPATEN GARUT

- Buruhtani A., suami-isteri dengan dua orang anak:*
Penghasilan dalam musim panen 2 bulan dan musim patjeklik 4 bulan : Rp. 36.000,—
dengan perintjian :
upah mentjangkul (2 bulan dalam musim panen): 2 x 30 x Rp. 100,—: Rp. 6.000,—
hasil tebang kaju (4 bulan selama musim patjeklik) : 4 x 30 x Rp. 200,—: Rp. 24.000,—
hasil gatjong (derep) isteri dalam 2 bulan musim panen): 2 x 30 x Rp. 100,—: Rp. 6.000,—
Pengeluaran selama 6 bulan (satu musim): Rp. 67.050,—
dengan perintjian :
beras 1½ kg. sehari a Rp. 230,—/kg:
6 x 30 x Rp. 345,—: Rp. 62.100,—
ikan asin dan sambal:
6 x 30 x Rp. 25,—: Rp. 4.500,—
biaya sekolah anak di SDN:
6 x Rp. 75,—: Rp. 450,—
- Kekurangan*
jang diderita dalam satu musim : Rp. 31.050,—

Untuk mengatasi kekurangan ini maka keluarga buruhtani ini terpaksa mengatur makannja 3 hari sekali atau selang 2 hari sekali makan nasi, lainnja makan djagung atau bahan makanan lain.
- Tanimiskin K., suami-isteri dengan 2 orang anak:*
Penghasilan selama satu musim: Rp. 42.500,—
dengan perintjian:
hasil tanah seluas 40 tumbak:
2 x Rp. 16.000,—: Rp. 32.000,—
upah mentjangkul (2 bl.):
1½ x 30 x Rp. 100: Rp. 4.500,—
hasil gatjong isteri selama 2 bulan:
2 x 30 x Rp. 100,—: Rp. 6.000,—
Pengeluaran selama satu musim: Rp. 92.400,—
dengan perintjian:
beras 2 kg sehari :
6 x 30 x Rp. 460,—: Rp. 82.800,—

ikan asin dan sambal:

6 x 30 x Rp. 50,—: Rp. 9.000,—
biaya sekolah anak di SDN:
6 x Rp. 100,—: Rp. 600,—

Kekurangan

yang diderita dalam satu musim: Rp. 49.900,—

Dengan besarnya kekurangan ini keluarga tanimiskin ini juga tidak bisa makan nasi saban hari, dan terpaksa menggadaikan tanahnya miliknya sendiri yang umumnya jatuh ketangan pemegang gadai.

3. *Tanisedang S., suami-isteri dengan 2 orang anak:*

Penghasilan selama satu musim: Rp. 130.000,—
dengan perintjan:

hasil tanah seluas 200 tumbak:

8 x Rp. 16.000,—: Rp. 128.000,—

Untung yang didapat dari

menanam ikan sawah: Rp. 2.000,—

Pengeluaran selama satu musim: Rp. 107.100,—
dengan perintjan:

beras 2 kg sehari:

6 x 30 x Rp. 460,—: Rp. 82.800,—

ikan asin dan sayuran:

6 x 30 x Rp. 100,—: Rp. 18.000,—

ongkos mengerdjakan sawah:

25 x Rp. 180,—: Rp. 4.500,—

biaya sekolah anak:

6 x Rp. 200,—: Rp. 1.200,—

keperluan lain: 6 x Rp. 100,—: Rp. 600,—

Kelebihan tanisedang dalam satu musim: Rp. 22.900,—

Kelebihan ini digunakan untuk memperbaiki rumah dan memperbaharui pakaian. Tapi tanisedang yang anaknya 4 orang atau lebih, pasti akan kekurangan dan harus meminjam dari tuan tanah atau lintahdarat.

4. *Tanikaja I., suami-isteri dengan 4 anak:*

Penghasilan dalam satu musim: Rp. 541.000,—
dengan perintjan:

hasil tanahsawah seluas 1 ha:

20 x Rp. 16.000,—: Rp. 320.000,—

hasil ikan dari waduk, tiap

3 bulan sekali:

2 x Rp. 13.000,—: Rp. 26.000,—

hasil dari kelapa dan pohon djeruk: Rp. 25.000,—

untung dari menanam ikan sawah: Rp. 10.000,—

hasil berupa renten uang 1 musim:

10 x Rp. 16.000,—: Rp. 160.000,—

Pengeluaran selama satu musim: Rp. 213.700,—

beras 3 kg sehari:

6 x 30 x Rp. 690,—: Rp. 124.200,—

sayuran, ikan asin dll:

6 x 30 x Rp. 200,—: Rp. 36.000,—

biaya mengerdjakan sawah:

100 x Rp. 180,—: Rp. 18.000,—

biaya sekolah anak:

6 x Rp. 4.000,—: Rp. 24.000,—

biaya mengurus waduk dan kelapa: Rp. 1.000,—

keperluan lain: : Rp. 10.500,—

Kelebihan tanikaja dalam satu musim: Rp. 327.300,—

Kelebihan ini digunakan untuk mengindahkan gedung dan perabot rumah, dan juga direntenkan kepada tanimiskin dan tanisedang.

ARTI KATA-KATA

- AJAKAN**: alat dibikin dari sigaran bambu atau kawat halus, dianjam djarang, berbentuk bulat atau empat persegi, untuk menjaring (meng-ajak) tepung beras, kopi dsb., atau untuk menangkap ikan di-saluran² air.
- AJEM-TENTREM**: „*ajem*” berarti tenang dan njamin dalam hati. „*Tentrem*” berarti tenteram. „Ajem-tentrem” berarti tenang dan tenteram. Ajem-tentrem menggambarkan suasana, dimana perasaan seluruh Rakyat tenang dan tenteram, karena penghidupan mereka baik.
- AKAD**: lihat *djual akad*.
- ANARKI**: keadaan ketiadaan ketertiban, tanpa kekuasaan, pemerintahan atau hukum apapun, kekacauan.
- ANGKET (QUESTIONNAIRE)**: *enquete* (bhs. Perantjis — batja: angket) ialah penjelenggaraan usaha mendapatkan bahan² atau angka² mengenai keadaan persoalan² tertentu dalam masyarakat dengan mengedarkan daftar pertanyaan², misalnja angket tentang sjarat² kerdja bu-ruh, tentang keadaan industri dll.
questionnaire (bhs. Perantjis — batja: kestjioner) ialah formulir berisi daftar pertanyaan².
- ANDJANGSANA**: pergi menindjau, mendjenguk atau menemui tetangga. Suatu kebiasaan baik didesa jang di-kembangkan oleh aktivis² gerakan tani revolusioner untuk memberikan pendjelasan dan pendidikan setjara menda-lam kepada massa kaum tani atau untuk menggali fikiran dan kehendak serta pendapat dan sikap massa mengenai sesuatu peristiwa.
- ARGUMENTASI**: *argumen* ialah bukti, alasan² untuk mem-buktikan sesuatu, *argumentasi* ialah pemberian bukti², pembuktian, penjadian dan penguraian alasan² untuk membuktikan sesuatu.
- BAJUR**: sistim bajur jaitu menjerahkan hak mengerdjikan tanah jang dilakukan oleh tanimiskin kepada tanisedang atau tanikaja dalam batas waktu tertentu, misalnja 2 a 3 tahun tanpa memungut sewa, karena tanah itu kalau di-kerdjakan sendiri oleh tanimiskin pemilik tanah akan memakan biaja berat jang tidak terikul oleh tanimiskin. Setelah djangkawaktu perdjandjian lewat, barulah pe-milik tanah berhak memungut sewa.
- BAWON**: Padi jang diberikan kepada pengetam padi se-bagai upah. Besarnja tidak sama bagi sesuatu daerah dengan daerah lain, tergantung pada imbangan djumlah tenaga kerdja dengan luas atau banjaknja pekerdjaan. Disesuatu daerah pengetam padi mendapat bawon $\frac{1}{4}$ dari hasil padi ketamannja, didaerah lain lagi $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$ atau kadang² sampai hanja $\frac{1}{20}$ dari hasil padi ketamannja.
- BATA ATAU TUMBAK**: = ru persegi, ubin, atau tjengkal-persegi, luasnja $\pm 14 \text{ m}^2$.
Di Indonesia masih berlaku ukuran luas tanah setjara lama, dengan nama bata, tumbak, ru-persegi, ubin, tjeng-kal-persegi.
1 tjengkal (ukuran pandjang, biasanja menggunakan ga-lah) kl. $3\frac{3}{4} \text{ m}$.
1 tjengkal-persegi atau 1 bata, 1 tumbak, 1 ubin, 1 ru-persegi, berarti $3\frac{3}{4} \times 3\frac{3}{4} \text{ m}^2$, atau kl. 14 m^2 .
1 bau sama dengan 500 bata atau 7000 m^2 (0,7 ha).
- BENGKOK**: atau *kelungguhan*, sebidang tanah desa jang diserahkan kepada kepala desa dan pamongdesa sebagai upah.
Kelungguhan (Belanda: ambtsveld) berarti tanah lung-guh, atau tanah untuk kedudukan „Lungguh” jang ber-arti duduk atau kedudukan.
- BOBODORAN**: dagelan atau tukang membikin lelutjon da-lam pertundjukan rejog, doger, wajangorang, ketoprak, ludrug, sulap dsb.
- BOBOKO**: berarti bakul. Aksi boboko adalah aksi kaum tani memindjam padi, beras atau bahan makanan lain kepada tuantanah pada musim patjeklik.
- BONDJOR**: bungkus gula mangkok dari tebu, gula ke-lapa atau enau, terdiri dari kepingan² gula berbentuk gepeng-bundar, disusun dan dibungkus dengan daun ke-lapa atau daun tebu kering dsb., diikat dengan tali bam-bu. Satu bondjor gula mangkok, gula kelapa atau enau biasanja berisi 10 keping gula.
- BONGSONG ATAU BONGSANG**: kerandjang tempat buah². an dibikin dari irisan bambu tipis, dianjam djarang.
- BORG**: barang, tanah atau rumah jang digunakan untuk tanggungan pindjaman.
- BUNGA-MADJEMUK**: artinja: Bunga (rente) tidak tung-gal, melainkan bersusun. Misalnja, pindjaman Rp. 1000,— setiap bulan berbunga-madjemuk 10%. Artinja sesudah 1 bulan harus membajar kembali Rp. 1100,— atau mem-bajar bunganja sadja Rp. 100,—. Djika pindjaman be-serta bunga sesudah sebulan tidak dibajar lunas dan bu-nganja djuga tidak dibajar, maka bulan jang kedua, djum-lah pindjaman tidak lagi Rp. 1000,— melainkan mendjadi Rp. 1100,—. Dan bunga untuk bulan kedua diperhitung-

kan 10% dari Rp. 1100,—. Begitulah seterusnya sehingga dengan bunga-madjemuk itu pada sesuatu waktu, bunganya saja menjadi berlipatganda dari pokok pindjaman semula.

DEKADEN: kemerosotan, keruntuhan.

DONGBRET: berasal dari kata madjemuk „seblendong-djambret”. „Seblendong” berarti segobang atau 2½ sen. „Djambret” berarti mendjambret atau meraih setjara kasar. „Dongbret” adalah nama kesenian sedjenis tajub, yang sesudah ditjabulkan oleh tuantanah²-djahat, kapitalis birokrat dan setan² desa lainnja dengan uang „seblendong” atau sedikit uang penari² laki² dapat begitu saja „mendjambret” seniwati.

DJAWARA: djuara atau djagoan, yaitu orang yang „dise-gani” oleh penduduk desa. Pada umumnya djawara² terdiri dari elemen² gelandangan yang digunakan oleh tuantanah djahat menjadi tjenteng² atau tukangpukul² dan bersekongkol dengan penguasa² djahat dan bandit² desa lainnja.

DJUAL AKAD: mendjual dengan djandji. Akad, artinja: djandji. Mendjual akad sebidang tanah, artinja mendjual sebidang tanah dengan djandji, misalnja: akan ditebus pada sesuatu waktu yang ditentukan. Djika tidak ditebus, tanah itu djatuh ketangan pembeli, kadang² dengan mendapat sedikit uang tambahan, dan tidak djarang pula si pendjual masih mempunyai tunggakan pindjaman, karena sesudah tanahnya didjual-akad, tiap² kali menghadapi kesulitan penghidupan, ditutup dengan meminjam uang, beras atau padi kepada pembeli tanah. Djual-akad pada hakekatnja adalah gadai tanah, hasil tanahnya diperhitungkan sebagai bunga.

DJUAL-SANDAK: djual-gadai (tanah). Sandak, dari kata sanda, artinja: gadai.

DJURAGAN PERAHU PENTJARI IKAN: djuragan (madjikan) perahu penangkap ikan yang besar yang ikut ambil bagian dalam pekerdjaan menangkap ikan kelaut, atau pemilik perahu besar yang ikut bekerdja menangkap ikan kelaut, disamping mendjalankan penghisapan terhadap buruh-nelajan. Kedudukannja serupa dengan tanikaja.

ELEMENTER: yang bersifat paling azasi, paling pokok (elemen = unsur, anasir).

EMANSIPASI: pembebasan (untuk mentjapai persamaan dll.) Misalnja, gerakan emansipasi wanita, yaitu gerakan kaum wanita untuk membebaskan diri dari ikatan² lama, mentjapai persamaan hak sepenuhnya dengan pria.

EMPIRISIS: *empiri* — pengalaman; *empiris* — menurut pengalaman, berdasarkan pengalaman; *empiris* — yang hanya mementingkan pengalaman² setjara sempit, kurang memperhitungkan kesimpulan² teori yang merupakan hasil penjimpulan (generalisasi) pengalaman².

GEDENG: berarti ikat (padi).

Segedeng padi berarti seikat padi, beratnja kl. 8 kg.

GEDUNG DJENGKI: rumah gedung dengan bentuk djengki, yaitu bagian atas lebih besar dari bagian bawah (lantai), dengan atap emperan muka atau atap bagian depan diangkat keatas, lebih tinggi dari atap bagian belakang.

HADJAT: perajaan untuk mengawinkan atau meng-chitan-kan. „Punya hadjat” atau „punja kerdja”, artinja mengadakan perajaan untuk mengawinkan atau meng-chitan-kan anak, adik atau anggota keluarga lainnja.

HANSIP: singkatan dari „Pertahanan Sipil” berdasarkan apa yang dinamakan „doktrin perang wilayah”. Hansip adalah nama pasukan² bersendjata yang lengkapnja disebut pasukan² Hansip, terdiri dari pemuda² tani didesa dibawah pimpinan pedjabat² sipil, misalnja Tjamat dan Angkatan Kepolisian Ketjamatan ditingkat Ketjamatan, Kepala Desa bagi pasukan Hansip desa. Tugasnja ialah bersama ABRI mendjamin keamanan desa. Diberbagai tempat pasukan² Hansip digunakan oleh tuantanah djahat dan setan² desa lainnja untuk menakut-nakuti dan menindas kaum tani.

HIDROLOGI: pemeliharaan sumber² air dan pentjegahan bahaya banjir melalui penghidjauan tanah² gundul.

HIRASAN: pekerdjaan tjuma² tanpa upah untuk „membantu” kepala desa.

Ngahiras: „membantu” kepala desa tanpa upah, atau sama dengan „rodi”.

KATEGORI: golongan; konsep; pengertian; faham. Tjontoh: kategori dalam filsafat: ruang dan waktu, sebab dan akibat, keharusan dan kebetulan, dll.; kategori² ekonomi: upah, uang, kapital, dll.

KEREDAN: bagian kulit leher ternak yang harus diserahkan kepada lebai (lebe, modin), termasuk salahsatu beban pologoro (pajak luarbiasa). Menurut peraturan adat feodal yang diteruskan oleh kaum kolonialis, djika seorang petani memotong ternak, ketjual wadajib menjerahkan „lamusir” kepada kepala desa, bagian kaki dari lutut kebawah kepada kebajan (ordonans desa) dan kepala untuk anggota² pamongdesa lainnja, kaum tani djuga harus menjerahkan „keredan” kepada lebai yang memotong ternak itu. Lebarnja keredan ditentukan dengan menampalkan telinga ternak ke leher ternak. Kulit leher pada udjung telinga di-„kered” atau dikerat sekeliling leher. Djarak antara „keredan” (keratan) ini dengan luka sembelihan menetapkan lebar kulit leher yang harus diserahkan kepada lebai. Lebar keredan tidak sama. Tergantung pada pandjang telinga ternak dan tempat si-lebai meletakkan pisau penjembelihan pada leher ternak. Makin dekat pada tenggorokan, keredannja makin lebar.

KIDUNG: njanjian Sunda atau Djawa. Biasanja dibatja pada malam hari, pada hari² gembira, misalnja sehabis anak lahir dengan selamat atau habis mengawinkan anak. Bait² kidung pada umumnja berisi harapan² supaya segenap keluarga selamat sehat-walafiat, ataupun dibatjkan buku² sedjarah jang digemari oleh Rakjat.

KLASIFIKASI: pembagian dalam golongan², klas².

KOKOLO' ATAU SESEPUH: ketua (kolot artinja tua). Jaitu: seorang jang dipandang oleh penguasa paling ber-„pengaruh” atau ber-„wibawa” dikampung atau didesa dan pantas didjadi ketua atau sesepuh penduduk kampung atau desa.

KOLEKTELUN (Belanda: collecteloon): upah jang diteri-
ma oleh kepala desa dari sebagian hasil pemungutan padjak didesanja.
Kolektelun itu sedjak zaman pendjadjahan Belanda be-
sarnja 8% dari hasil pemungutan padjak.

KORAMIL: *Komando Rajon Militer*, jaitu suatu badan ko-
mando Angkatan Bersendjata jang ditempatkan di Ke-
tjamatan sesudah „SOB” dihapuskan, sebagai pelaksana-
an apa jang dinamakan „doktrin perang wilayah”. Ber-
laku didaerah Djawa Barat.

KORAN TEMPEL: Koran (suratkabar) jang ditempelkan
dipapan atau gedeg. Biasanja ditempatkan didepan kan-
tor partai, organisasi massa, Djawatan Penerangan, di-
pabrik, sekolah dan di-tempat² massa berkumpul lain-
nja. Koran tempel itu djuga terdiri dari berita² dan
pengumuman² setempat jang ditulistangan. Di-daerah²
dimana kritik dan otokritik sudah berkembang, koran
tempel djuga memuat kritik dan otokritik dari dan ter-
hadap tindakan pimpinan atau massa setempat.

KUKUSAN: alat untuk menanak nasi, dibikin dari bambu
dianjam berbentuk pasung.

KUWU: Kepala Desa atau Lurah.

LAMUSIR: atau lemungsir, ulur² (Djawa). Jaitu daging
punggung jang terletak dikanan-kiri tulangpunggung.
Lamusir adalah bagian daging jang terbaik. Dibanjak
daerah, lamusir termasuk beban pologoro. Kaum tani
jang memotong ternak, diwadjibkan menjerahkan daging
lamusir, sepotong kepada kepala desa, sepotong lagi ke-
pada wakil kepala desa atau djurutulis desa.

LEBE, LEBAI, AMIL, MODIN: pedjabat agama Islam di-
desa atau pamongdesa jang bertugas mengurus soal² ke-
agamaan.

LELIURAN: gotongrojong atau tolong-menolong saling-
membantu dalam pekerdjaan pertanian, membikin ru-
mah, dsb. „Leliuran” mengumpulkan uang, berarti: me-
ngumpulkan uang, masing² menjerahkan sedikit uang,
untuk ber-sama² membeli sesuatu.

LUGU BLOK: „lugu” atau „lulugu” berarti ketua atau ke-
pala. „Blok” berarti dukuh atau bagian desa kira² sama
dengan Rukun Kampung (RK). „Lugu blok” berarti ke-
tua atau kepala dukuh atau RK.

MAGANG: bekerdja tanpa upah dikantor-kantor pemerin-
tahan dengan harapan agar sewaktu-waktu ada lowongan
dapat diangkat sebagai pegawai.

MAJORITET: djumlah terbanjak, suara terbanjak, bagian
terbesar.

MAPARO: atau *maro*, menjeduai, artinja menjewa tanah
dengan menjetorkan, separuh (seperdua) dari hasil pa-
nen, atau bagi-hasil dengan pembagian 1 : 1 diantara
tuantanah dengan penggarap.

MELUKU: membadjak tanah. Asal katanja: luku atau ba-
djak.

MERLIMA: mengerdjakan tanah tuantanah dengan bagian
hanja seperlima dari hasil panen. Sedang $\frac{4}{5}$ hasil panen
untuk tuantanah sebagai sewa-tanah atau setoran.

MERTILU: mengerdjakan tanah tuantanah dengan bagian
sepertilu (sepertiga) dari hasil panen. Sedang $\frac{2}{3}$ hasil
panenan untuk tuantanah sebagai sewa-tanah atau se-
toran.

MENJIANGI: membersihkan rumput jang tumbuh disela-
sela tanaman padi, djagung dan tanaman² lain (dalam
bahasa Djawa matun).

MONOPOLI: penguasaan tunggal oleh suatu golongan atas
sesuatu hal. Misalnja: monopoli tuantanah atas tanah —
penguasaan atau pemilikan semua atau sebagian terbesar
tanah oleh tuantanah.

MUSIM BARAT: musim angin datang dari barat (musim
penghudjan).

MUTASI: perubahan dari matjam jang satu mendjadi ma-
tjam jang lain; pemindahan.

NANDUR: menanam bibit padi sawah.

NGABIHI: wakil lurah (kepala desa).

NGANTEURAN: mengantarkan makanan kepada kepala
desa untuk minta izin atau memberitahu akan mempu-
njai hadjat mengawinkan, mengchitankan, dsb.

NGEPAK ATAU NJEBLOK: memborong pekerdjaan meng-
garap sawah supaja mempunyai hak sebagai buruh pe-
ngetam padi, atau memborong pekerdjaan lain.

NORMAL: biasa, lumrah.

OJEK: bahan makanan dibikin dari singkong jang direndam
dan kemudian dihantjurkan, dikeringkan dan dimasak.
Pada musim² patjeklik, ojek merupakan bahan makanan
pokok bagi buruhtani dan tanimiskin dibeberapa daerah.

ORIENTASI: penetapan haluan, penentuan arah kepada
sesuatu.

OTOKRASI: kekuasaan satu orang, kekuasaan lalim, kekuasaan radja tanpa dibatasi oleh hukum. Umumnya kekuasaan negara² feodal bersifat otokratis.

PANDJAR: pembayaran dimuka sebagian harga barang yang akan dibeli yang bersifat mengikat. Pembayaran pandjar pada umumnya disertai ikatan atau djandji. Misalnja: dibayar uang pandjar dengan sjarat „barangnja harus didjual dengan harga tertentu kepada pemberi pandjar”, atau dengan sjarat „djika pemberi pandjar tidak djadi membeli barang tersebut, uang pandjar hilang (tak perlu dibayar kembali) atau uang pandjar dikembalikan dsb”.

PANTJEN: kewajiban membayar sedjumlah uang kepada kepala desa berdasarkan luas milik tanah. Pada hakekatnja „padjak” luarbiasa.

PAGAR BETIS: pagar dari betis. Artinja dikepung rapat oleh manusia, oleh Rakjat. Dilakukan untuk menghanturkan gerombolan² bersendjata DI-TII dengan melakukan pengepungan rapat daerah² gerombolan oleh ABRI bersama Rakjat, khususnja kaum tani.

PARALEL: sedjadjar.

PIKUL: atau *datjin* (kurang lebih 62,5 kg.). 1 Datjin sama dengan 100 kati.

PEMATANG: galengan (Djawa) untuk membatasi petak² sawah, agar tanah dan air dapat diratakan.

PEMBINA: Lengkapnja „Perwira Pembina Wilayah”. Jaitu anggota² ABRI yang ditempatkan di-desa² di Djawa Barat sebagai kelandjutan dari aparat Koramil.

PERELEK: pungutan beras pada setiap menanam nasi. Dalam gerakan *perelek* kaum wanita tani memisahkan sedikit beras yang ditanak, dikumpulkan, untuk membantu kaum tani atau daerah lain yang menderita kekurangan makan, ataupun didjual untuk membayar iuran atau sokongan Kongres organisasi.

PETAK ATAU KOTAK: bidang tanah yang dilingkungi oleh pematang (galengan), luasnja tidak sama. Petak² tanah dipegunungan lebih sempit dari petak² tanah ditanah datar.

PETISI: surat permohonan, biasanja diadjukan oleh banjak orang ber-sama² kepada pemerintah untuk menuntut sesuatu.

POLOGORO: bentuk padjak atau beban luarbiasa yang harus dipikul oleh Rakjat didesa untuk keperluan pamongdesa. Misalnja djika Rakjat mendjual atau membeli ternak, rumah, tanah dsb. harus membayar sedjumlah uang. Djika memotong ternak harus menjerahkan sebagian daging. Djika mempunyai hadjat mengawinkan atau mengchitankan, harus mengantar makanan kerumah pak lurah.

PRIORITET: pengutamaan, pengistimewaan. Memberikan prioritas kepada sesuatu ialah mengutamakan sesuatu, mendahulukan sesuatu daripada yang lain.

PROMOSI: menaikkan tingkat (kedudukan dalam pemerintahan, tingkat kekaderan dll.)

RAKSABUMI ATAU ULU²: pamongdesa yang tugasnja mengatur pembagian air untuk pertanian didesa.

RASIALISME: *ras* — induk bangsa. Kesatuan umatmanusia yang mempunyai tjiri² djasmani yang sama seperti kulit, rambut, mata, dsb. *Rasialisme* ialah faham yang didasarkan pada mem-beda²kan, mengunggulkan sesuatu ras. Rasialisme adalah faham reaksioner karena menutupi perdjuaan kelas dengan mengadu-domba bangsa dengan bangsa, ras dengan ras.

REMBUG-DESA: rapat desa, jaitu rapat penduduk desa dibawah pimpinan kepala desa. Dulu hanya pemilik² tanah sadja yang berhak mengundjungi rapat tsb. Di-desa² dimana gerakan revolusioner mulai berkembang, semua keluarga berhak hadir dan di-desa² dimana gerakan revolusioner sudah kuat, semua penduduk dewasa sudah berhak mengambil bagian dalam rapat² atau rembug² desa.

RIBA: rente, bunga pindjaman.

RISET (RESEARCH): penjelidikan, penelitian setjara ilmiah.

RODI: bekerdja tanpa upah untuk keperluan kepala desa dan pamongdesa lainnja.

RONGGENG: penari wanita mengiringi gamelan. Ronggeng sekaligus djuga penjanji.

SABIT: arit.

SEBRA: tjara kombinasi sekurang-kurangnya dua djenis tanaman, misalnja tebu dengan padi, tanaman bahan makan dengan tanaman keras kehutanan, dsb. Beberapa meter ditanami padi membudjur sepanjang tanah milik kaum tani, beberapa meter lagi ditanami tebu, begitulah seterusnya, sehingga kombinasi kedua djenis tanaman itu ber-lorek² laksana bulu kuda sebra. Sistim sebra itu sangat baik digunakan di-tanah² miring di-pegunungan², diseling-seling antara tanaman bahan makanan kaum tani dengan tanaman belukar untuk pupuk atau tanaman keras. Sistim sebra ini dipadukan dengan sistim sengkedan (terrasering, sabuk-galeng). Sistim sebra ditanah-tanah pegunungan, adalah djalan yang tepat untuk memperbesar produksi kaju²an dan buah²an, untuk mentjegah kelongsoran tanah (erosi) dan memelihara sumber² air, dan untuk memperbesar produksi bahan makanan Rakjat. Dengan menggunakan sistim sebra dapat ditjegah pengusiran sewenang-wenang terhadap kaum tani yang mengerdjakan tanah² bekas kehutanan atau perkebunan dengan dalih „untuk mentjegah erosi” dsb.

SINDEN: penjanji wanita mengiringi gamelan. Kadang² sinden djuga berketjakapan sebagai ronggeng.

STANDAR HIDUP : taraf penghidupan.

SULUR DJAGUNG : tungkul (banggal, djanggal) djagung.

SWADAJA : berdiri diatas kaki sendiri atau hidup dengan kekuatan sendiri.

TAJUB : tari dengan gamelan. Dalam tari *tajub* menari dan menjanji seorang seniwati. Didepannja menari 2 orang penari lelaki. Dibelakangnja djuga menari 2 orang penari lelaki. Seharusnja mereka menari dengan berpapasan dan dilarang singgung-menjinggung. Tuantanah² djahat dan kapitalis birokrat telah mentjabulkan seni *tajub*, dan penari² lelaki berbuat „bebas” melakukan tindakan² tjabul dan menghina seniwati *tajub*.

TANAH PARTIKELIR : tanah dengan hak-milik penuh bagi tuantanah² asing. Ditanah partikelir jang luas, Rakjat penduduk daerah itu samasekali tidak mempunjai hak atas tanah.

TEMPAH : persekot atau pandjar.

TIM (TEAM) : regu, kelompok, rombongan.

TIPIKAL : jang chas, jang mentjirikan sesuatu, sifat² jang mewakili hal tertentu.

TJAENG : ukuran banjaknja padi. 1 tjaeng berarti 5 gedeng. (1 tjaeng = 2 madea; 1 madea = 5 sangga; 1 sangga = 5 gedeng; 1 gedeng = 2 potjong (belah).

TJENTENG : mandor tuantanah jang pada umumnja djuga mendjadi „tukang-pukul” tuantanah.

TJELENGAN : tempat untuk menjimpan uang dibikin dari tabung bambu atau tanah liat.

TJETEK : dangkal.

TUDUNG : topi dibikin dari bambu.

TUGUR-TUNDAN : berdjaga-djaga dirumah kepala desa (lurah) untuk meneruskan perintah² kepada Rakjat di desa dan menjampaikan laporan² mendadak kepada Tjamat atau Kelurahan lain.

TUMPANGSARI : sistim menanam tanaman bahan makanan, seperti padi-kering, djagung, sejur-majur dan katjang-katjang disela-sela tanaman pokok perkebunan (karet, kopi, tjoklat, kelapa) atau kehutanan (djati, mahoni, akasia).

URBANISASI : pemindahan penduduk dari desa² ke-kota² akibat patjeklik dan ketiadaan kesempatan bekerdja.

VARIASI : bentuk ber-matjam².

WADUK : danau bikinan tempat menjimpan air untuk mengurangi bahaya bandjir dan memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau (untuk mengurangi bahaya kekeurangan bagi penduduk, ternak dan pertanian).

WOLETA : bahan pakaian dibikin dari rayon (kulit tumbuh-tumbuhan).

SIP no. 440/JL/1964 -- 10.000
P.I.R. 323/1964